

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Dr. Nano Prawoto



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Nano Prawoto

Pengantar Ekonomi Makro/Nano Prawoto
—Ed. 1.—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.
x, 222 hlm., 23 cm
Bibliografi: hlm. 211
ISBN 978-602-425-XXX-X

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2019.2298 RAJ

Nano Prawoto

PENGANTAR EKONOMI MAKRO

Cetakan ke-1, Agustus 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Monalisa
Kopi Editor :
Setter : Jaenudin
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan anugrah cinta dan kasih-Nya kepada hamba-hamba-Nya dan khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan buku ini.

Buku ini dimaksudkan untuk membantu dan membuka cakrawala pembaca dalam menekuni bidang makro secara teori, harapannya melalui buku ini, membantu pembaca dalam mempelajari isu-isu ekonomi dari suatu kejadian-kejadian sehingga dapat memberikan solusi dan alternatif kebijakan dalam membangun perekonomian Indonesia dan dapat dijadikan referensi baik bagi peneliti, mahasiswa maupun yang ingin belajar tentang ekonomi.

Buku pengantar makro ini, memiliki kajian yang cukup unik dari buku pengantar makro lainnya, selain melakukan analisis dengan pendekatan kuantitatif untuk memudahkan pembaca dalam mengambil suatu keputusan juga mencakup indikator-indikator penting dalam makroekonomi, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami kondisi makroekonomi. Kami sadari, bahwa dalam buku ini masih jauh untuk dapat dikatakan karya yang sempurna. Dengan hal tersebut, jika terdapat kritik dan saran yang membangun pada buku ini, dengan

senang hati penulis akan terima agar buku ini menjadi karya yang sempurna.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan akademik yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terciptanya buku ini, dan khususnya kepada istri tercinta beserta anak-anak yang selalu mensupport dalam menulis buku pengantar makro ini.

Yogyakarta, 8 Mei 2019

Penulis,

Nano Prawoto



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 RUANG LINGKUP MAKROEKONOMI	7
A. Dasar Filsafat Teori Keynes	7
B. Lima Pelaku Makro	11
C. Empat Pasar Makro	12
BAB 3 PERKEMBANGAN TEORI EKONOMI SEBAGAI PENENTU KEGIATAN EKONOMI	17
A. Pandangan Klasik	17
B. Pandangan Keynes	24
BAB 4 PENDAPATAN NASIONAL	33
A. Pengertian	33
B. Beberapa Istilah Pendapatan Nasional	35
C. Metode Penghitungan Pendapatan Nasional	43
D. Perbandingan Tingkat PDB dan Tingkat Per Kapita	48

E.	Perbandingan Pendapatan Perkapita Indonesia Dan Negara Lain	50
F.	GNP dan Permasalahan Yang Dihadapi	51
G.	Kendala Dalam Penghitungan Pendapatan Nasional	52
BAB 5	PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL	55
A.	Fungsi Konsumsi	56
B.	Fungsi Tabunga	59
C.	Hubungan Diantara MPS dan MPC	61
D.	Menghitung Pendapatan Nasional Melalui Pendekatan Dua Sektor	61
E.	Menghitung Pendekatan Nasional Melalui Pendekatan Tiga Sektor	62
F.	Kebijakan Fiskal ⁶³	
G.	Dampak Pajak terhadap Konsumsi dan Tabungan	65
H.	Pengeluaran Pemerintah	67
I.	Pengaruh Pajak Tetap (Tx0) terhadap Pendapatan Nasional	68
J.	Pengaruh Pajak Proporsional (tY) terhadap Pendapatan Nasional	68
K.	Menghitung Pendapatan Nasional Melalui Pendekatan Empat Sektor	69
L.	Perhitungan Angka Pengganda (k)	70
M.	Menghitung Angka Pengganda melalui Pendekatan Dua Sektor	71
N.	Menghitung Angka Pengganda melalui Pendekatan Tiga Sektor	71
O.	Menghitung Angka Pengganda dan Pendekatan Empat Sektor	73
BAB 6	INFLASI	79
A.	Pengertian Inflasi	80
B.	Teori Inflasi	81
C.	Penggolongan Inflasi	83

D. Dampak Negatif Inflasi	85
E. Cara Mengatasi Inflasi	85
F. Gambaran Inflasi di Indonesia	86
BAB 7 PENGANGGURAN	89
A. Pengertian	90
B. Jenis-jenis pengangguran	91
C. Pendekatan Angkatan Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja	96
D. Kriteria Produktivitas Kerja Rendah	96
E. Trend Pengangguran di Indonesia	97
F. Solusi Penanganan dari Jenis Pengangguran	100
G. Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Pengangguran	101
BAB 8 NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL	105
A. Pengertian Neraca Pembayaran Internasional	105
B. Tujuan Neraca Pembayaran Internasional	106
C. Struktur Neraca Pembayaran	107
D. Pengertian “ <i>Balance</i> ” dalam Neraca Pembayaran Internasional	110
E. Ketidakseimbangan Neraca Pembayaran	111
F. Proses Penyeimbangan Neraca Pembayaran	115
BAB 9 UANG DAN BANK	117
A. Uang	117
B. Bank	128
BAB 10 BANK SENTRAL, OTORITAS JASA KEUANGAN DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	135
A. Tujuan Bank Sentral	135
B. Otoritas Jasa Keuangan	140
C. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	145
BAB 11 PENGANTAR KURVA IS-LM	149
A. Keseimbangan di Pasar Barang	150

B. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Keseimbangan Pasar Barang-Jasa	154
C. Analisis Kesimbangan di Pasar Uang	155
D. Strategi dan Kebijakan Untuk Menggeser LM	160
E. Keseimbangan di Pasar Barang dan Pasar Uang	164
BAB 12 PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI I	69
A. Pertumbuhan ekonomi	169
B. Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi	171
C. Strategi pertumbuhan ekonomi	174
D. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Regional	175
E. Gambaran Struktur Perekonomian Daerah	176
F. Pembangunan ekonomi	178
G. Paradigma Pembangunan	180
H. Teori Pembangunan Ekonomi	181
BAB 13 PERDAGANGAN INTERNASIONAL	189
A. Pengertian	189
B. Ruang Lingkup Perdagangan Internasional	190
C. Faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan internasional	190
D. Masalah yang di bahas dalam Perdagangan international	191
E. Manfaat Perdagangan Internasional	191
F. Perdagangan Internasional Vs. Perdagangan Domestik	191
G. Teori Perdagangan Internasional	192
H. Kebijakan Perdagangan Internasional	208
DAFTAR PUSTAKA	211
GLOSARIUM	213
INDEKS	219
BIDOATA PENULIS	221



BAB 1

PENDAHULUAN

Tidak ada pembagian yang jelas antara mikro dan makro ekonomi. Bicara mikroekonomi lebih bicara hubungan ekonomi antar individu, sedangkan untuk makroekonomi bicara masalah yang jauh lebih luas yang dapat dikatakan sebagai secara keseluruhan (agregat). Dengan demikian untuk membedakan antara mikroekonomi dan makroekonomi lebih bicara pada subyak yang menjadi bahasan. Makroekonomi berkaitan dengan perilaku ekonomi secara keseluruhan.

Subjek makroekonomi adalah pendapatan nasional, kesempatan kerja, inflasi, neraca pembayaran dan lainnya yang terjadi dalam bentuk yang lebih luas setiap saat.

Tujuan makroekonomi adalah menyajikan kerangka logis untuk analisis fenomena tersebut. Apa yang menentukan pendapatan nasional meningkat dan bagaimana bisa meningkatkan kesempatan kerja dalam perekonomian? Apa yang menentukan tingkat harga? dan sebagainya. Kebijakan apa yang bisa digunakan untuk mempengaruhinya dan bagaimana cara kerjanya? Ini adalah beberapa pertanyaan yang menjadi kerangka analisis yang disajikan dan dimaksudkan untuk ditangani. Pendapatan riil, tingkat produksi, tingkat harga dan neraca pembayaran ditentukan oleh interaksi keputusan yang dibuat oleh individu saat

memecahkan masalah ekonomi mereka; keputusan tentang konsumsi dan investasi, keputusan tentang alokasi kekayaan di antara aset alternatif, keputusan tentang berapa banyak tenaga kerja untuk disewa dan dipasok, dan lainnya.

Pembagian antara mikro dan makro adalah masalah kenyamanan. Lebih mudah membedakannya, karena (1) metode analisisnya berbeda dan (2) masalahnya juga berbeda. Masalah mikroekonomi dasar adalah penentuan struktur harga relatif dan teori dasarnya adalah permintaan dan penawaran. Sedangkan masalah makroekonomi dasar adalah penentuan arus pendapatan dan struktur teoritis dasarnya adalah model aliran pendapatan.

Ilmu ekonomi memiliki dua cabang ilmu, yaitu makroekonomi yang membahas pada kinerja perekonomian dalam skala yang besar dan secara keseluruhan (agregate) berfokus pada masalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan arus perdagangan internasional. Cabang lainnya adalah mikroekonomi membahas secara detail dari perilaku pengambil keputusan individu baik dari rumah tangga atau perusahaan. Berikut adalah contoh perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi.

Contoh Perbedaan Fokus antara Mikroekonomi dan Makroekonomi

Perbedaan Ilmu Ekonomi	Produksi	Harga	Pendapatan	Tenaga Kerja
Mikroekonomi	Produksi/output pada perusahaan Secara individu	Harga dari barang dan jasa secara individu	Distribusi pendapatan dan kesejahteraan	Tenaga kerja untuk perusahaan secara individu
	Berapa banyak produksi baja	Harga pelayanan kesehatan	Upah industry	Jumlah pekerja pada industri baja
	Berapa banyak produksi mobil	Sewa apartemen	Gaji eksekutif	Jumlah ahli akuntansi
Makroekonomi	Produk nasional	Tingkat harga agregat	Pendapatan nasional	Tenaga kerja dan pengangguran dalam perekonomian
	Jumlah output semua industry	Harga konsumen	Total upah dan gaji	Jumlah lapangan kerja
	Produk Domestik Bruto	Harga produsen	Total keuntungan perusahaan	Tingkat pengangguran

Pemikiran Klasik yang paling terkenal adalah tentang mekanisme pasar, dimana semua kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Namun, mekanisme pasar tidak mampu mengatasi terjadinya yang dikenal dengan *great depression*. Keynes menawarkan solusi yang berbeda dengan Klasik yaitu pentingnya peran pemerintah melalui kebijakannya untuk menstimulasi permintaan agregat. Kebijakan pemerintah adalah dengan *fiscal policy*, *monetary policy* dan *growth or supply-side policy*. Kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan dan belanja pemerintah disebut dengan *fiscal policy*, kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral dalam menambah dan mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian disebut dengan *monetary policy*, sedangkan *growth policies* yang fokus utamanya stimulasi dari *aggregate supply*. Terjadinya *great depression* tersebut melahirkan ilmu makroekonomi dan **John Maynard Keynes** sebagai pencetusnya.

Ruang lingkup dari makroekonomi salah satunya adalah berfokus pada masalah **pertumbuhan ekonomi**. Masalah pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah jangka panjang pada makroekonomi. Dari tahun ke tahun, kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa akan mengalami peningkatan, peningkatan tersebut dibarengi dengan peningkatan pada faktor produksi baik dari jumlahnya maupun kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang dan modal, jika dibarengi dengan penambahan pada teknologi akan meningkatkan produktivitas dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan nasional atau produksi nasional terhadap barang dan jasa dari suatu negara. Konsep pendapatan nasional terdiri dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB). Konsep dari PDB adalah total nilai pasar yang di produksi dari suatu negara terhadap barang dan jasa dalam periode tertentu baik yang dilakukan oleh warga negara asing maupun domestik termasuk didalamnya aset asing. Sedangkan PNB adalah PDB ditambah pendapatan neto atas faktor luar negeri. Pendapatan neto atas faktor luar negeri adalah pendapatan atas faktor produksi yang dihasilkan warga negara domestik yang berada dan diterima oleh negara lain dikurangi dengan pendapatan atas faktor produksi warga negara asing yang diperoleh dari dalam negeri. Penghitungan PDB dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan nilai tambah atau produksi dan pendekatan pendapatan.

Permasalahan makroekonomi pada jangka pendek adalah **inflasi**, yaitu kenaikan harga dari suatu barang secara terus menerus. Dua kunci dari pengertian inflasi adalah kenaikan harga dan terus menerus, sehingga kenaikan harga satu barang atau dua barang tidak bisa disebut dengan inflasi, namun jika kenaikan harga pada barang tersebut berlangsung secara terus menerus dan meluas sehingga menyebabkan kenaikan pada harga barang lainnya dapat disebut dengan inflasi. Tingkat inflasi berbeda pada satu periode dengan periode lainnya atau perbedaan negara juga berbeda tingkat inflasinya. Inflasi yang rendah berkisar pada 3-6 persen, inflasi yang moderat atau *tolerable* berkisar pada 5-10 persen, namun inflasi yang tinggi berkisar diatas 10 persen. Angka inflasi digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terkait dengan perubahan harga barang dan jasa. pengukurannya yang sering digunakan adalah Indeks Harga Konsumen (IHK).

Salah satu faktor penting yang mengukur tingkat kemakmuran pada masyarakat adalah **tingkat pengangguran** dan hal tersebut menjadi permasalahan lain dan menjadi fokus utama dari makroekonomi. Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun atau disebut dengan usia kerja. Pengangguran dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pengangguran terselubung, setengah menganggur dan pengangguran terbuka. Keynes membagi secara jelas tentang pengangguran yaitu pengangguran sukarela adalah angkatan kerja yang tidak mau bekerja disebabkan karena tingkat upah yang berlaku (ditawarkan) dan pengangguran terpaksa adalah suatu keadaan pada tingkat pada tingkat upah yang berlaku ada orang bersedia untuk bekerja. Ditinjau berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dapat dibedakan menjadi pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran siklikal, pengangguran konjungtural, pengangguran musiman, dan pengangguran teknologi. Masalah pengangguran dapat menjadi masalah sosial yang sangat serius jika tidak diatasi dengan baik oleh Pemerintah, seperti kekacauan politik, memberikan efek negatif pada kesejahteraan masyarakat dan mengacaukan prospek pembangunan ekonomi pada jangka panjang.

Ilmu ekonomi adalah ilmu mempelajari alokasi sumber daya yang bersifat terbatas guna memenuhi kebutuhan manusia yang

tidak terbatas. Fokus utama makroekonomi lainnya berkaitan dengan masalah **perdagangan internasional**. Sumber daya yang terbatas atau langka ini menyebar di seluruh negara, maka negara yang kekurangan sumber daya akan mengimpor dan negara yang kelebihan sumber daya akan mengekspor. Kegiatan ekspor dan impor menjadi bagian penting dalam makroekonomi, istilah perekonomian terbuka berarti suatu sistem perekonomian yang mempunyai hubungan dengan negara lain dan terutama dalam menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Masalah alokasi atau hubungan bilateral dianalisis lebih lanjut antara satu negara dengan negara lain dan terjalin suatu kesepakatan. Hubungan ekonomi internasional ini dapat berbentuk perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan serta kerja sama internasional.

Ekonomi internasional dapat mencakup baik aspek mikro maupun makro. Aspek mikro misalnya menyangkut masalah jual beli secara internasional yang sering disebut dengan ekspor-impor (neraca perdagangan). Analisis mikroekonomi terkait dengan kesepakatan perdagangan secara internasional yang bergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi dan menciptakan integrasi perekonomian nasional terhadap perekonomian internasional. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lain dapat mempengaruhi pendapatan nasional ataupun kesempatan kerja, yang masalah ini merupakan topik makro. Berkaitan dengan perdagangan internasional, suatu negara akan memiliki apa yang disebut dengan neraca pembayaran yaitu suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan barang atau jasa dan transfer keuangan dan moneter antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain pada periode tertentu. Komponen neraca pembayaran terdiri dari neraca berjalan (*current account*) yang merupakan bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek (mencatat transaksi ekspor-impor barang dan jasa) dan kedua neraca modal (*capital account*) yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset jangka pendek dan jangka panjang sebagai portofolio (seperti saham, obligasi dan real estate) dalam transaksi antar negara.



BAB 2

RUANG LINGKUP MAKROEKONOMI

Tujuan utama mempelajari ilmu ekonomi adalah sebagai sarana untuk dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat dan dapat diterapkan untuk mendeteksi dan menanggulangi dalam setiap permasalahan ekonomi. Perbedaan ruang dan waktu juga memiliki perbedaan pendekatan. Makroekonomi sebagai cabang ilmu ekonomi, membahas secara detail dari aktivitas-aktivitas perekonomian dalam skala besar dan menentukan kebijakan-kebijakan yang tepat terkait dengan permasalahan kebijakan makro.

Tugas pengendalian makro adalah menjaga perekonomian berjalan dalam kondisi yang stabil, terhindar dari permasalahan-permasalahan yang datang dari kondisi internal maupun eksternal yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Otoritas moneter dan otoritas fiskal merupakan penanggungjawab dalam menjaga perekonomian suatu negara berjalan dengan baik.

A. Dasar Filsafat Teori Keynes

Memasuki tahun 1930, berlangsung depresi ekonomi terparah dan berkepanjangan. Kegiatan ekonomi sangat terkekang pada semua sektor

dan berada pada tingkat yang sangat rendah. Pengangguran merajalela yang menyebabkan menurunnya taraf hidup masyarakat. Sistem *laissez faire* atau liberalisme dan kapitalisme menjadi pusat dari kesalahan yang dialamatkan oleh kaum sosialis di negara-negara barat pada saat itu. Kegiatan perekonomian pada sistem tersebut hanya berpusat pada produsen swasta, yang sebagian besar dari mereka hanya mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga gejolak perekonomian seperti depresi, pengangguran dan inflasi tidak dapat dihindarkan. Kaum sosialis menawarkan gagasan agar faktor-faktor produksi tidak lagi dimiliki oleh pengusaha swasta, tetapi dimiliki oleh negara dan masyarakat. Gagasan yang ditawarkan oleh kaum sosialis, paling tidak mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan. Gagasan tersebut bertujuan agar motif mengejar keuntungan bukan lagi menjadi motif utama dalam menggerakkan produksi.

Teori klasik menjadi inspirasi bagi kaum sosialis, terutama tentang nilai kerja dari David Ricardo (1772-1823). David Ricardo menekankan pada barang yang nilainya dipersoalkan harus berguna atau mengandung faedah (*usefull, utility*), sebab jika barang tersebut tidak memiliki nilai guna maka tidak dapat ditukarkan dengan barang yang memiliki nilai guna. Dari sini muncul pikiran tentang perimbangan antara *supply* dan *demand*. Dengan sudut lain dalam pandangan Ricardo adalah harga barang berkaitan dengan jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan atau memperoleh barang yang bersangkutan. Inti pokok pemikiran David Ricardo ialah bahwa nilai dan harga barang bersumber pada pekerjaan tenaga manusia. Pendapat Ricardo tersebut menjadi sumber bagi para pemikir ekonomi setelahnya, salah satunya adalah Karl Marx (1818-1883). Sejalan dengan pemikiran Ricardo, Marx menganggap bahwa nilai semua komoditi adalah sepadan dengan pekerjaan (manusia) yang terkandung dalam masing-masing komoditi. Tolak ukur dari pekerjaan adalah jam kerja yang digunakan untuk menghasilkan komoditi tersebut. Marx juga menganggap bahwa tenaga kerja manusia (faktor produksi) sebagai tenaga upahan dianggap sebagai suatu komoditi yang dalam proses tukar-menukar di pasar.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh John Stuart Mill (1806-1873) dalam bukunya "*Principles of Political Economy*" menyatakan bahwa keuntungan disebabkan karena buruh mampu memproduksi lebih dari

yang dibutuhkan untuk mendukungnya. Pokok utama yang digagas oleh John Stuart Mill adalah keuntungan muncul bukan dari suatu pertukaran atau transaksi, akan tetapi terletak pada produktivitas buruh tersebut, bila buruh secara kolektif mampu memproduksi 20% lebih dari upah maka keuntungan yang didapat menjadi 20%. Kaum klasik mempercayai bahwa keuntungan diperoleh bukan dari pemerasan terhadap kaum buruh melainkan keuntungan dapat diperoleh dari peran pengetahuan, kerja kapitalis dan *entrepreneur* yang menyediakan berbagai hal seperti teknik *entrepreneur*, teknik pengambilan resiko, modal yang dibutuhkan dan keahlian manajemen untuk mengoperasikan suatu usaha.

Perbedaan pemikiran antara kedua kubu ini sangat mempengaruhi tatanan dari suatu sistem perekonomian secara global. Gejolak dan resesi perekonomian pada tahun 1930-an tidak dapat diatasi dengan baik oleh sistem mekanisme pasar. Maka muncullah aliran pemikiran baru yang dipelopori oleh John Maynard Keynes (1883-1946). Keynes mencoba memperbaiki pemikiran ekonomi dengan mengambil ide dari pemikiran klasik dan sosialis. Sampai disini, terdapat pemikiran ekonomi yang terbagi menjadi tiga aliran besar, yaitu aliran klasik dengan *laissez faire* atau kebebasan pasar, aliran sosialis yang meyakini bahwa kebebasan pasar adalah suatu kejahatan kaum kapitalis, dan aliran keynes yang menggabungkan kedua pemikiran tersebut.



John Maynard Keynes

(lahir di [Cambridge, Cambridgeshire, Britania Raya](#), 5 Juni 1883 – meninggal di [East Sussex, Inggris](#), 21 April 1946 pada umur 62 tahun) adalah seorang ahli [ekonomi asal Inggris](#). Ide-idenya yang radikal mempunyai dampak luas pada ilmu ekonomi modern. Karya-karyanya adalah *The Economic Consequences of the Peace* (1919), *A Treatise on Money*, 2 Vols (1930)

dan Keynes menjadi terkenal dengan karyanya; *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) yang merupakan reaksi terhadap Depresi Besar [Amerika Serikat](#) pada tahun 1930-an. Dalam karyanya Keynes menulis bahwa Pemerintah kadangkala harus menstimulasi pertumbuhan ekonomi, terutama pada saat [konjungtur](#) lemah.

Keynes ada pada posisi yang unik dalam sejarah pemikiran ekonomi barat, karena pada saat-saat krisis ideologi semacam itu ia bisa menawarkan suatu pemecahan yang merupakan “jalan tengah”. Ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan dalam aliran Keynes, yaitu:

- a. Hasil kajian dari pemikiran Keynes membuat tidak berlaku lagi suatu dalil kuat dalam aliran Klasik, yaitu seakan-akan kekuatan-kekuatan ekonomi cenderung berkisar ataupun dengan sendirinya menuju pada keadaan ekuilibrium dengan kesempatan kerja penuh.
- b. Tabungan perseorangan atau rumah tangga mencerminkan kebajikan dalam pola hidup masing-masing, namun adakalanya dalam keadaan tertentu, kebajikan pribadi itu yang secara bersamaan terwujud sebagai tabungan masyarakat secara menyeluruh (tabungan agregatif) justru bisa merugikan kepentingan masyarakat umum, yaitu jika pertambahan tabungan yang terkumpul tidak semuanya digunakan sebagai tambahan dalam investasi. Akibatnya ialah produksi dan pendapatan dalam masyarakat menurun, pada gilirannya pengeluaran agregatif untuk membeli hasil produksi menjadi berkurang. Dengan kata lain, permintaan efektif dalam masyarakat menjadi rendah sehingga terjadi pengangguran secara masif
- c. Keynes berpendapat bahwa kaitan antara analisis ekonomi dan kebijakan negara yang berpola intervensi aktif dibutuhkan untuk menanggulangi perubahan-perubahan pada pengeluaran agregatif dan permintaan efektif.

Dalam pandangan Keynes, ketika terjadi gejolak atau krisis pada perekonomian maka harus ada peranan pemerintah dalam menanggulangi krisis tersebut. Aliran Klasik tentang mekanisme pasar terbukti gagal dalam menanggulangi krisis tersebut, sehingga mendorong pemerintah untuk campur tangan. Keynes juga berpendapat bahwa kegiatan produksi dan kepemilikan atas faktor-faktor produksi, masih tetap bisa dipercayakan kepada pengusaha swasta, namun pemerintah juga wajib melakukan kebijakan-kebijakan yang aktif untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih baik.

B. Lima Pelaku Makro

Dalam teori makroekonomi kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi lima kelompok besar, yaitu:

1. **Rumah Tangga**, Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti tenaga kerja, bahan baku, modal dan faktor produksi lainnya. Rumah tangga konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa (output) yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya.
2. **Produsen**, biasa disebut perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi yang disebut sebagai produsen.
3. **Pemerintah**, Pemerintahan mencakup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan-kebijakannya. Contoh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal atau disebut kebijakan APBN, yang berkaitan dengan pengeluaran atau belanja pemerintah, pajak dan tranfer atau subsidi, kebijakan moneter seperti penentuan tingkat bunga diskonto, cadangan minimum bank umum di Bank Indonesia, operasi pasar terbuka dengan jual atau beli surat berharga oleh Bank Indonesia, dan kebijakan melalui himbauan moral pada bank umum. Kebijakan lainnya adalah kebijakan sisi penawaran, Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan produksi sehingga dapat menawarkan barang dan jasa dengan harga yang rendah dan mutu yang baik. Kebijakan ini antara lain seperti kebijakan pendapatan pekerja, yaitu kebijakan pemerintah yang bertujuan mengendalikan kenaikan upah pekerja, yang menekankan (a) meningkatkan kegairahan kerja, (b) meningkatkan efisiensi produksi, dengan memberikan insentif pajak (pengurangan pajak, tax holiday).

4. **Lembaga-lembaga Keuangan**, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana, dan memberikan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mempermudah transaksi dalam perekonomian.
5. **Negara-negara Lain**, peranan negara lain dalam perekonomian adalah sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian suatu negara dan sekaligus sebagai pembeli barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh suatu negara. Dengan demikian terjadi transaksi ekonomi yang disebut sebagai ekspor dan impor barang dan jasa, sekaligus transaksi modal dan keuangan internasional.

C. Empat Pasar Makro

Dalam analisis makroekonomi kita melihat kegiatan ekonomi nasional secara lebih menyeluruh dan luas dibanding dengan apa yang kita pelajari dalam mikroekonomi. Kita tidak lagi melihat pada pasar tertentu, seperti pasar beras, pasar pakaian jadi, pasar Samsung secara sendiri-sendiri. ini sesuai dengan pengertian mengenai “pengendalian umum” di atas. Di sini kita melihat pasar-pasar tersebut dan pasar-pasar barang/jasa lainnya sebagai satu pasar besar, yang kita beri nama “pasar barang”. Tetapi dalam makroekonomi kita tidak hanya mempelajari satu pasar ini saja. Perekonomian nasional kita lihat sebagai suatu sistem yang terdiri dan empat pasar besar yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu:

1. Pasar Barang
2. Pasar Uang
3. Pasar Tenaga Kerja
4. Pasar Luar Negeri

Secara garis besar, permasalahan kebijakan makro mencakup dua permasalahan pokok:

- a. Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana mengelola perekonomian nasional yang dikelola oleh otoritas moneter dan otoritas fiskal dengan

jangka waktu bulan, triwulan, kuartal, dan tahunan, agar terhindar dan tiga “penyakit makro” utama yaitu:

- a. inflasi,
 - b. pengangguran dan
 - c. ketimpangan dalam neraca pembayaran.
- b. Masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan. Masalah ini adalah mengenai bagaimana kita mengelola perekonomian kita agar ada keserasian antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Pada dasarnya masalahnya juga berkisar pada bagaimana menghindari ketiga penyakit makro seperti di atas, hanya perspektif waktunya menjadi lebih panjang (lima tahun, sepuluh tahun, atau bahkan dua puluh lima tahun).

Dalam analisa jangka pendek faktor-faktor berikut ini kita anggap tidak berubah atau tidak bisa kita ubah:

- a) Kapasitas total dari perekonomian. Investasi dalam jangka pendek masih mungkin dilakukan yaitu seperti penambahan stok barang jadi, setengah jadi maupun barang mentah, hal ini biasa dilakukan oleh pihak atau pengusaha untuk perusahaannya untuk membeli barang-barang modal. Karena bersifat jangka pendek maka pembelian barang-barang modal tersebut belum bisa menambah kapasitas produksi secara gradual.
- b) Jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja. Dalam kondisi bulanan atau triwulanan dianggap tidak mengalami perubahan.
- c) Lembaga-lembaga sosial, politik, dan ekonomi yang ada.

Selanjutnya dari segi teori, apabila kita ingin “menyetir” perekonomian kita dalam jangka pendek, kita harus melakukan kebijakan-kebijakan yang bersifat secara langsung dapat mempengaruhi kondisi perekonomian, misalnya dengan cara:

- a) Mengendalikan jumlah uang beredar,
- b) Mengendalikan suku bunga kredit bank,
- c) menerapkan pajak import,
- d) mengendalikan pajak pendapatan atau pajak penjualan,

- e) menambah pengeluaran pemerintah,
- f) mengeluarkan obligasi Negara dsb.
- g) Kebijakan-kebijakan semacam ini mempunyai ciri umum bahwa kesemuanya bisa dilakukan tanpa harus mengubah ketiga faktor tersebut di atas.

Jadi seandainya kita menginginkan kenaikan produksi dalam jangka pendek, kita bisa melakukannya dengan, misalnya:

- a) memperlancar distribusi bahan-bahan mentah kepada para produsen,
- b) mendorong pengusaha untuk mempergunakan pabrik-pabriknya secara lebih intensif (menambah giliran kerja/shift),
- c) memberikan kerja lembur kepada para karyawan dan sebagainya.
- d) Kebijakan-kebijakan semacam ini bisa menaikkan arus produksi barang/jasa tanpa mengubah ketiga faktor di atas. Kesemuanya ini adalah kebijakan-kebijakan jangka pendek. Dan kebijakan-kebijakan semacam inilah yang sering diandalkan untuk tujuan stabilisasi.

Secara jelas di atas dibahas tentang cara mengelola perekonomian nasional dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua ketentuan waktu tersebut sangat berkaitan antara satu sama yang lain. Dengan kata lain perekonomian jangka panjang yang optimal tidak dapat tercapai jika pengelolaan pada perekonomian jangka pendek tidak tepat sasaran, namun dalam beberapa hal kita tidak bisa mengkotak-kotakkan secara rinci mana jangka pendek dan jangka panjang. Karena perekonomian berjalan secara terus-menerus.

Di banyak negara berkembang, kebijakan stabilisasi tidak terlepas dari kebijakan pembangunan ekonomi yang bersifat jangka panjang. Walaupun kebijakan jangka pendek seperti yang disebutkan di atas, telah diterapkan secara tepat, belum tentu menghilangkan penyakit makro secara cepat. Sebabnya adalah bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, masalah-masalah ekonomi jangka pendek bisa disebabkan karena masalah “struktural” bahkan karena masalah “institusional”. sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, hal ini terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial pada masyarakat.

Latihan Soal

1. Jelaskan isu-isu atau fokus utama dalam teori makroekonomi yang anda ketahui?
2. Apa yang anda ketahui dengan pandangan teori Klasik tentang perekonomian?
3. The Great Depression tahun 1930an, adalah bukti bahwa perekonomian tidak secara otomatis melakukan penyesuaian dengan sendirinya. Bagaimana peran Keynes untuk mengatasi persoalan ekonomi seperti ini?
4. Sebutkan dan jelaskan lima pelaku dalam perekonomian secara makro?
5. Permasalahan kebijakan makro mencakup dua permasalahan pokok, yaitu kebijakan jangka pendek dan jangka panjang, jelaskan hal tersebut.



BAB 3

PERKEMBANGAN TEORI EKONOMI SEBAGAI PENENTU KEGIATAN EKONOMI

A. Pandangan Klasik

Munculnya aliran klasik pada akhir abad ke 18 dan awal abad 19 dalam perkembangan ilmu ekonomi menggeser aliran merkantilisme yang beranggapan bahwa logam mulia (emas) menjadi bagian penting dalam penguasaan ekonomi suatu negara. Kemudian ekonomi di barat pada abad 19 dalam revolusi industry mengalami perubahan pandangan bahwa bagian penting untuk memajukan ekonomi suatu negara adalah dengan melakukan perdagangan bebas, inilah yang menjadi tonggak sejarah perkembangan ilmu ekonomi di barat. Kemajuan teknologi, akumulasi modal dan perkembangan jumlah penduduk mendorong kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Teori ekonomi liberal mulai diimplementasikan oleh banyak negara dan berkembang di Eropa Barat sehingga mulai banyak bermunculan para pemikir yang berkontribusi dalam perkembangan ekonomi barat.

Mari kita telaah secara mendalam tentang materi pelajaran, pentingnya dan perkembangan ekonomi makro. Materi Subjek Makroekonomi: Mikro dan makro ekonomi tidak memiliki pembagian yang jelas. Ruang lingkup makroekonomi dinyatakan dengan

memberikan daftar masalah yang menjadi prioritas perhatian. Makroekonomi berkaitan dengan perilaku ekonomi secara menyeluruh. IKLAN: Subjek makroekonomi adalah pendapatan dan pekerjaan, inflasi, masalah keseimbangan pembayaran, dll. Yang terjadi dalam bentuk yang lebih ringan sepanjang waktu. Tujuan makroekonomi adalah menyajikan kerangka logis untuk analisis fenomena ini. Apa yang menentukan penghasilan dan pekerjaan? Apa yang membedakan level harga? Bagaimana ini terkait? Kebijakan apa yang dapat digunakan untuk memengaruhi mereka dan bagaimana cara kerjanya? Ini adalah beberapa pertanyaan yang kerangka analitis disajikan untuk ditangani. Interaksi keputusan yang dibuat oleh individu ketika memecahkan masalah ekonomi mereka menentukan pendapatan riil, pendapatan, tingkat harga dan neraca pembayaran; keputusan tentang konsumsi dan investasi, keputusan tentang alokasi kekayaan di antara aset alternatif, keputusan tentang berapa banyak tenaga kerja untuk dipekerjakan dan memasok, dan banyak lainnya. Meskipun keputusan ini saling bergantung satu sama lain, adalah berguna untuk membagi ekonomi ke dalam berbagai sektor pengambilan keputusan untuk memeriksa kekuatan apa yang beroperasi di setiap sektor sebelum melihat interdependensi di antara mereka.

Berikut teori perkembangan para pengamat aliran klasik :

1. Francois Quesnay
2. John Locke
3. Adam Smith
4. David Ricardo
5. Thomas Robert Malthus
6. John Stuart Mill
7. David Hume

Adapun penjabaran dari pengertian teori klasik dari para ahli ialah, sebagai berikut:

1. Francois Quesnay

Francois Quesnay (diucapkan Kennay) adalah pemimpin physiocrats dan pencipta model ekonomi pertama, *Tableau Economique*. Para pengikutnya menamakan diri mereka sebagai *physiocrat* dari bahasa Perancis, *physiocrate*, yang berarti hukum alam (*Rule of Nature*).

Physiocrat ialah kelompok ekonom yang mempercayai agrikultur menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai kemakmuran suatu negara.

Asumsi yang diajukan oleh Quesnay secara garis besar ialah terdapat tiga sektor ekonomi, pertama, bahan-bahan makanan, buah-buahan dan bahan mentah lainnya yang dihasilkan dari sektor pertanian. Kedua, barang-barang jadi yang melewati proses produksi, seperti pakaian, serta alat yang dapat menunjang pertanian dari sektor manufaktur atau industri, dan ketiga, sektor yang tidak menghasilkan nilai ekonomi, namun dapat mengklaim atas surplus output dari pertanian yaitu tuan tanah atau pemilik tanah. Biaya sewa tersebut merepresantasikan pembayaran surplus kepada pemilik tanah. Kegiatan yang dilakukan pemilik tanah dikenal sebagai Teori Sewa Physiocratic.

2. John Locke

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh John Locke pada beberapa bagian tidak berbeda jauh dengan pemikiran dari Smith terutama pada kebebasan individu dalam aktivitas perekonomian dan seminimal mungkin peran pemerintah dalam perekonomian. selain dari pada itu, Locke juga mengembangkan pemikirannya pada teori uang dan suku bunga.

Pemikiran Locke pada kebebasan individu dalam aktivitas perekonomian juga bahwa setiap individu berhak mempunyai tanah yang dapat digunakan “uang” dan modal, sehingga mereka juga berhak atas pekerjaan dan hasil pekerjaan atau upah yang akan didapat dari atas tanah tersebut. Masih menurut Locke, jika setiap individu diberi kebebasan untuk menumpuk kekayaannya dan semakin banyak kekayaan yang ditabung maka akan semakin produktif. Motif produktivitas disini adalah dengan menumpuk kekayaan.

Pemikiran yang dikembangkan oleh Locke lainnya adalah tentang uang dan suku bunga. Pada teori uang Locke menentang dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Inggris saat itu, tentang pemecahan uang logam atau mengurangi berat dari uang logam. Menurut Locke, apa yang dilakukan oleh Pemerintah saat itu merupakan kebijakan yang sia-sia, dengan Pemerintah mengurangi

berat dari uang logam tidak akan menyelesaikan masalah, namun nilai atau kekuatan pembayar dari uang ditentukan pada kandungan perak itu sendiri. Menurunkan nilai uang hanya akan membuat pedagang menginginkan lebih banyak mata uang untuk ditukar dengan barang. Sedangkan pada teori suku bunga, pandangan Locke sangat kontradiktif dengan pandangan ekonomi lainnya pada abad ke-17 yaitu Josiah Child. Perbedaannya adalah bahwa Locke menginginkan bahwa suku bunga dibiarkan mekanismenya pada pasar atau ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar. Karena penetapan suku bunga (cukup tinggi pada saat itu) tidak akan menguntungkan baik bagi pemerintah maupun bagi pedagang dan pemberi pinjaman.

3. Adam Smith (1723-1790)

Adam Smith beranggapan bahwa perlu adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah sehingga ekonomi dapat berkembang. Pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitik beratkan pada luas pasar.

Pasar terdiri dari pasar luar negeri dan pasar dalam negeri, semakin luas pasar akan menarik perhatian perdagangan internasional. Karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar. Sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat kumulatif artinya bila ada pasar yang dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja.

4. David Ricardo (1772-1823)

David Ricardo membagi masyarakat menjadi 3 (tiga) golongan masyarakat ekonomi, diantaranya:

a. Kapital

Pemimpin produksi dan pemegang peranan penting. Mereka selalu mencari untung dan menginvestasikan kembali pendapatannya yang berdampak pada kenaikan pendapatan nasional.

b. Buruh

Mayoritas masyarakat merupakan golongan buruh dan bergantung dengan golongan capital.

c. Tuan tanah

Golongan penerima uang sewa dari golongan capital.

Apabila jumlah penduduk bertambah dan akumulasi capital terus terjadi, David Ricardo beranggapan bahwa tanah yang subur akan semakin langka.

5. Thomas Robert Malthus (1766 – 1834)

Malthus berpendapat permintaan bertambah dikarenakan adanya kenaikan jumlah penduduk secara terus menerus, penambahan jumlah penduduk menuntut adanya kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain.

Menurut Malthus kenaikan jumlah kapital untuk investasi diperlukan untuk perkembangan ekonomi, hal ini berlainan dengan pendapat J.B.Say, yang mengatakan “*supply creates its own demand*” atau penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri yang berarti ketika ada barang yang di produksi maka secara otomatis akan menyebabkan munculnya permintaan terhadap barang tersebut, disebabkan kebutuhan manusia yang tidak memiliki batasan.

6. John Stuart Mill

Di dalam bukunya yang berjudul “*On Liberty*” ia menerangkan secara komprehensif konsep kebebasan, dalam upayanya mendalami keterkaitan antara ekonomi dan masalah sosial pada tahun 1848 Mill mengeluarkan karyanya dalam bentuk buku yang diberi nama *Principles of Political Economy* yang membahas permasalahan kehidupan manusia dan keikutsertaannya dalam mensejahterakan lingkungan sekitarnya termasuk dalam proses produksi, perlindungan produk dalam negeri, persaingan antar produsen dan juga masalah distribusi menggunakan uang maupun kredit.

Pandangan Mill terhadap isu ekonomi mendapat pengaruh dari Maltus, yang berpendapat bahwa tumbuhnya perekonomian akan selalu diiringi oleh sumber daya yang tetap dan peningkatan populasi penduduk yang terus meningkat. Mengutamakan kebahagiaan orang lain dalam konsep utilitarian merupakan konsep universalisme etis dimana disanalah moralitas utilitarian dibangun, Mill juga melihat munculnya perasaan bahagia di dalam persaingan pasar. Kecenderungan pasar yang bersifat egoisme

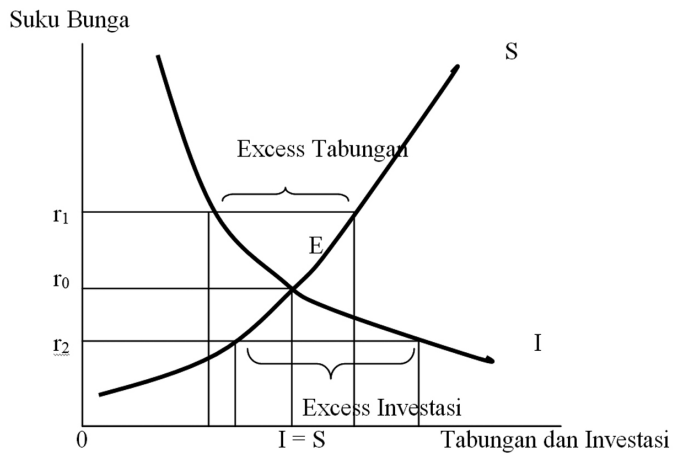
sentris berusaha di tekan oleh Mill dengan menggunakan nilai moralitas bersama, yaitu dapat dirasakannya perasaan bahagia oleh setiap pelaku pasar, pelaku usaha, distributor, produsen dan juga konsumen. Kondisi pasar yang terlalu bebas cenderung akan melahirkan kondisi menang dan kalah akan tetapi diharapkan tetap melahirkan kebahagiaan bersama yang merupakan konsekuensi atas universalisme etis ala John Stuart Mill.

7. David Hume

Hume menyumbang teori uang dan teori perdagangan nasional, ia menganalisis dampak uang terhadap tingkat suku bunga, kegiatan ekonomi, dan harga. Ia juga menjelaskan bagaimana dan mengapa negara-negara tidak mungkin mengalami ketidakseimbangan perdagangan dalam jangka waktu yang lama.

Pandangan mengenai konsep *full employment* meyakini bahwa ada beberapa hal yang mendasari keyakinan tersebut, antara lain.

- a. Fleksibilitas tingkat bunga, besaran nilai yang akan ditabung oleh rumah tangga keluarga maupun perusahaan didalam sistem perekonomian sangat terpengaruh oleh tingkat suku bunga bank. Para ahli menyimpulkan bahwa nilai dari tingkat suku bunga itu sendiri akan berubah-ubah hingga mencapai titik keseimbangannya yaitu ketika nilai tabungan = nilai investasi.



Gambar 3.1 Flexibilitas Tingkat Suku Bunga

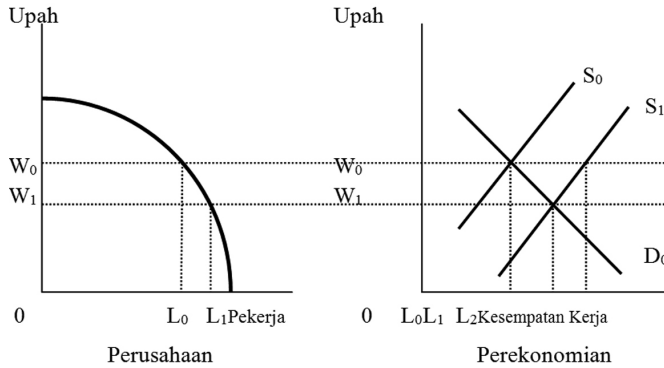
Contoh:

Ketika tingkat suku bunga yang ditetapkan sebesar 25% maka jumlah tabungan mengalami peningkatan karena bisa memberikan tingkat pengembalian yang tinggi. Namun, di sisi lain bank mengalami kesulitan dalam memberikan pinjaman dikarenakan masyarakat memilih untuk menabung dibandingkan investasi disebabkan return atas tabungan lebih tinggi. Sehingga bank menurunkan suku bunga.

Kondisi berbeda apabila suku bunga 15 %, masyarakat mengambil keputusan untuk menarik tabungan dan memilih untuk investasi. Kondisi ini menyebabkan bank kekurangan dana untuk memberikan kredit kepada investor. Upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan problem ini adalah bank akan menaikkan suku bunga tabungan sehingga masyarakat tertarik untuk menabung kembali.

Penyesuaian nilai suku bunga akan terus dilakukan sehingga terjadi titik keseimbangan, dalam kaca mata klasik titik tersebut menggambarkan kondisi full employment yaitu ketika penawaran agregat = pengeluaran agregat.

- b. Fleksibilitas tingkat upah akan mewujudkan sebuah situasi di mana jumlah permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja akan mencapai keadaan yang seimbang/titik keseimbangan dalam penggunaan konsep tenaga kerja penuh.
 - 1) Para ahli ekonomi klasik meyakini bahwa jumlah dari pengangguran dapat dihilangkan disebabkan adanya penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja. Asumsi ini berdasarkan bahwa sifat alamiah dari seorang produsen adalah selalu mencari kondisi dimana ia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum.
 - 2) Kondisi dimana jumlah keuntungan akan berada dalam kondisi yang maksimum apabila upah/keuntungan produsen setara dengan jumlah dari produksi marginal atau (biaya untuk memproduksi tambahan produk baru).



Gambar 3.2 Flexibilitas Tingkat Upah

Kondisi *Full Employment* bisa terjadi apabila perusahaan menurunkan upah pada para pekerja. Sebagai ilustrasi, perusahaan memiliki kemampuan dalam memberikan upah Rp 2.000.000 bagi 2000 pekerja. Kemudian terjadi penambahan pekerja sebanyak 300 orang agar dapat mengurangi angka pengangguran. Sehingga perusahaan hanya mampu memberikan gaji sebesar Rp.1.800.000. Kondisi ini juga untuk memaksimalkan keuntungan karena dapat memproduksi lebih banyak dari sebelumnya.

Pandangan klasik beranggapan bahwa tingkat perekonomian suatu negara ditentukan oleh:

- a. Capital
- b. Labor
- c. Quantity
- d. Technology

B. Pandangan Keynes

Keynes memaparkan kelemahan dari pandangan ekonomi klasik, yang menyatakan bahwa "*full employment*" adalah keadaan yang jarang terjadi di dalam perekonomian, dan hal tersebut disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat yang terjadi di dalam perekonomian.

Berbedanya cara pandang Keynes dan para ekonom klasik disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

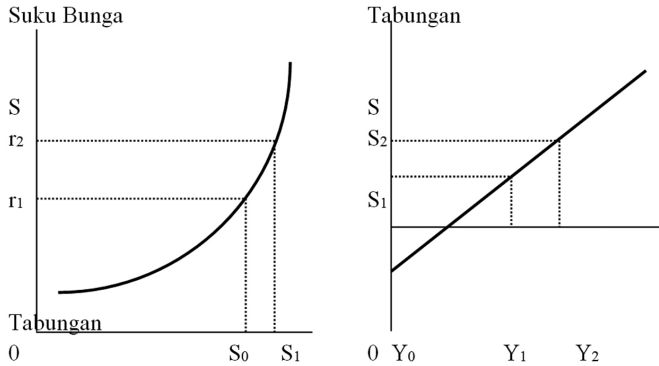
1. Faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan dan tingkat investasi dalam perekonomian.

Para ekonom klasik berpendapat bahwa tingkat suku bunga merupakan faktor penentu besarnya tabungan dan investasi, akan tetapi menurut Keynes besarnya nilai tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga tergantung kepada sebesar apakah pendapatan yang mampu diperoleh oleh rumahtangga tersebut yang berarti jika pendapatan rumah tangganya semakin besar maka akan semakin besar pula nilai tabungan rumah tangga tersebut.

Dalam bidang investasi Keynes beranggapan bahwa tingkat suku bunga merupakan faktor penentu utama di dalam menentukan besaran dari nilai investasi, besarnya nilai investasi juga ditentukan oleh faktor lain seperti keadaan perekonomian saat ini, prediksi kemajuan perekonomian di masa depan, serta tingkat perkembangan teknologi. Sehingga meskipun nilai tingkat suku bunga sedang tinggi namun apabila keadaan perekonomian sedang dalam keadaan baik, maka kegiatan investasi akan tetap berjalan.

Fungsi dari tabungan dapat ditunjukkan dengan kurva S, yaitu sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah tabungan dan nilai dari pendapatan nasional, adapun kurva S bermula dari nilai tabungan negatif, dan bentuk dari kurva S adalah menaik dari kiri bawah ke kanan atas yang menunjukkan sifat dari tabungan masyarakat, yaitu:

- a. Jika tingkat pendapatan nasional rendah maka tabungan masyarakat akan negatif, yang artinya masyarakat akan menggunakan uang di tabungan mereka sebagai biaya hidup. Kemudian setelah tingkat pendapatan nasional bertambah dan melebihi titik Y_0 maka masyarakat akan mulai menabung kembali sebagian dari pendapatannya.
- b. Jika pendapatan nasional bertambah maka, jumlah tabungan masyarakat akan bertambah. Apabila pendapatan nasional adalah Y_1 tabungan adalah S_1 dan apabila pendapatan nasional Y_2 jumlah tabungan adalah S_2 .



Pandangan Klasik

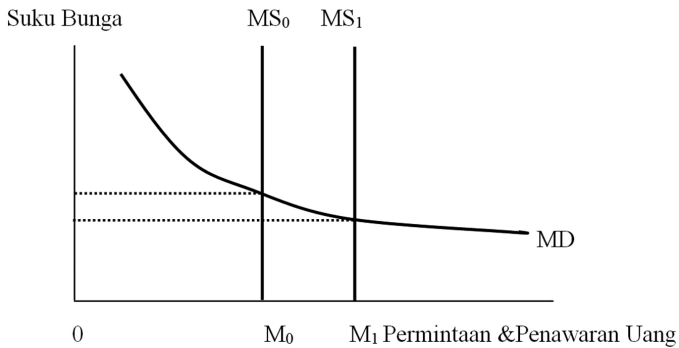
Pendapatan Nasional Keynes

Gambar 3.3 Penentu Tabungan Menurut Klasik dan Keynes

2. Penentu Suku Bunga Pandangan Keynes

Penawaran dan permintaan uang adalah penentu suku bunga, Bank sentral dan sistem perbankan adalah:

- a. Institusi yang akan menentukan jumlah penawaran uang pada waktu tertentu.
- b. Keinginan masyarakat menentukan jumlah permintaan uang.



Gambar 3.4 Pandangan Keynes Mengenai Penentu Suku Bunga

3. Hubungan pemakaian tenaga kerja oleh produsen dan tingkat upah.

Para ahli ekonomi klasik beranggapan bahwa penurunan tingkat upah tidak akan mempengaruhi biaya produksi marjinal (biaya untuk memproduksi tambahan produk baru) dengan asumsi

variabel lain tetap/*ceteris paribus*. Sedangkan Keynes beranggapan jika terjadi penurunan pada tingkat upah maka akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat daya beli masyarakat, tingkat pengeluaran, dan mengakibatkan terjadinya penurunan pada tingkat harga barang dan jasa. Berkurangnya tingkat permintaan barang dan jasa yang disebabkan oleh lemahnya daya beli masyarakat, akan mengakibatkan penurunan jumlah pada barang yang diproduksi yang artinya produsen akan mengurangi jumlah tenaga kerja. Dengan begitu jika terjadi penurunan tingkat upah maka konsep *full employment* atau tenaga kerja penuh tidak akan tercapai.

Menurut Keynes, permintaan efektif merupakan faktor penentu kegiatan ekonomi suatu negara dimana permintaan efektif akan meningkatkan tingkat produksi, adapun pengertian dari permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan kemampuan konsumen untuk membayar barang maupun jasa yang diminta di dalam sebuah perekonomian. Bertambahnya permintaan efektif di dalam sebuah perekonomian akan menyebabkan bertambahnya tingkat produksi rumah tangga perusahaan dalam perekonomian tersebut. Keadaan diatas akan ini akan berakibat terhadap bertambahnya tingkat kegiatan perekonomian, penggunaan tenagakerja dan faktor-faktor produksi.

Menurut Keynes jenis pengeluaran dalam permintaan agregat ada dua (2) jenis pengeluaran yaitu: pengeluaran konsumsi rumah tangga dan penanaman modal oleh perusahaan, namun dalam analisis makroekonomi pengeluaran pemerintah dan ekspor juga berpengaruh terhadap pengeluaran agregat. Berikut ini merupakan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat, antara lain:

a. Konsumsi dan Investasi.

Jumlah barang dan jasa yang dapat di konsumsi rumah tangga keluarga dibatasi oleh pendapatan yang mereka terima sehingga harus memilih kombinasi yang tepat dalam konsumsi, Istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan kecenderungan konsumen dalam konsumsi adalah *marginal propensity to consume* (MPC) maknanya perbandingan antar kombinasi barang dengan jumlah pendapatan yang dapat dikonsumsi jika pendapatan yang digunakan dalam konsumsi semakin besar berarti nilai MPC juga akan meningkat.

Bagi Negara yang memiliki nilai MPC rendah hal ini akan menyebabkan selisih antara produksi nasional dengan tingkat konsumsi yang semakin besar dengan asumsi *full employment*. Untuk mengatasi hal tersebut perusahaan harus melakukan investasi sebesar selisih antara tingkat produksi dan konsumsi guna tercapainya full employment namun jika investasi tidak bisa menutupi selisih yang ada maka pengangguran akan tercipta, karena keadaan tersebut dalam dunia nyata tidak selalu tercapai maka pengangguran akan selalu ada.

Terdapat dua kekuatan besar yang dapat mempengaruhi nilai investasi, yaitu tingkat bunga dan efisiensi modal. Menurut Keynes, terdapat dua sisi yang dapat menentukan besaran tingkat bunga yang berlaku, dari sisi demand yaitu jumlah permintaan uang/keinginan masyarakat untuk konsumsi dan saving akan mempengaruhi tingkat bunga. Dari sisi supply yaitu penawaran uang yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pemenuhan terhadap barang dan jasa.

Kekuatan penawaran dan permintaan akan uang dapat menentukan naik turunnya tingkat suku bunga. Ketika permintaan akan uang lebih besar dari penawarannya, suku bunga akan turun dan masyarakat cenderung lebih untuk konsumsi dari pada menabung, begitu juga ketika penawaran akan uang lebih besar dari permintaannya maka suku bunga akan naik dan masyarakat menjadi lebih cenderung untuk menabung dari pada konsumsi.

b. Pengeluaran Ekspor dan Pengeluaran Pemerintah

Eksport termasuk pengeluaran pemerintah, besarnya tingkat pengeluaran pemerintah (G) akan mempengaruhi produksi nasional karena pemerintah sendiri merupakan konsumen yang besar. Permintaan efektif ditunjukkan dengan ekspor ketika ekspor semakin besar maka produksi nasional yang dikonsumsi oleh pihak luar juga besar, berikut ilustrasi bagaimana kegiatan perekonomian ditentukan:

Tabel 3.1 Tingkat Kegiatan Ekonomi

Tingkat produksi yang akan dicapai dengan faktor produksi yang ada	Pengeluaran agregat aktual (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor)	Kegiatan ekonomi sebagai akibat perbedaan tersebut
(1)	(2)	(3)
200	257	Kebijakan Ekspansi
300	350	Kebijakan Ekspansi
400	425	Kebijakan Ekspansi
500	500	Kondisi Seimbang
600	575	Kebijakan Kontraksi
700	650	Kebijakan Kontraksi

Kebijakan pemerintah berupa ekspansi seperti mencari dan membangun faktor produksi dilakukan apabila tingkat produksi lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran agregat, kondisi ini menunjukkan tidak cukupnya faktor produksi untuk mencukupi tingkat konsumsi yang ada sekarang pada saat tingkat produksi sama dengan pengeluaran agregat aktual maka pengeluaran agregat sama dengan tingkat produksi nasional yang ada dan tidak perlu ada perubahan dalam kondisi ekonomi negara.

Kebijakan kontraksi dilakukan pemerintah apabila faktor produksi lebih besar dari pengeluaran agregat, kondisi ini menunjukkan adanya faktor produksi yang menganggur sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan diantaranya adalah, menurunkan tingkat investasi dengan menaikkan suku bunga dan membuat kebijakan yang dapat menurunkan tingkat produksi nasional seperti pembatasan dalam bentuk izin, lisensi, kuota dan lainnya.

Kemudian pandangan Keynes diteruskan oleh Aliran Neo-Keynes, aliran ini merupakan determinasi pemikiran Keynes yang diperbaharui berdasarkan penelitian empiris yang lebih baru, Neo-Keynes banyak berjasa dalam mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian dimana teori-teori tersebut menjelaskan tentang fluktuasi ekonomi (*business cycle*) dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan.

Pembahasan tentang fluktuasi ekonomi mendapat perhatian yang lebih serius pada era sesudah Keynes (Neo-Keynes), mereka membahas teori fluktuasi ekonomi secara mendalam karena mereka memerlukan teori-teori yang mampu menjelaskan apa yang menyebabkan perekonomian tidak stabil, tindakan dan kebijakan yang dapat dilakukan agar perekonomian aman terkendali.

Bagi kaum Neo-Keynes, terjadinya fluktuasi ekonomi karena dua penyebab utama. *Pertama*, rendahnya tingkat konsumsi dan terjadi perubahan-perubahan dalam tingkat investasi. *Kedua*, tidak adanya mekanisme koreksi yang mampu mendorong perekonomian pada keseimbangan *full-employment*, yang disebabkan oleh kakunya harga dan tingkat upah dalam mekanisme penyesuaian. Ketidakseimbangan perekonomian yang berkaitan dengan pengangguran dan inflasi menyebabkan kaum neo-keynesian percaya perlunya intervensi dari pemerintah sebagai langkah koreksi.

Tokoh-tokoh pemikir dari kaum Neo-Keynesian:

1. *Alvin Harvey Hansen (1887-1975)*

Alvin Hansen seorang pakar ekonomi lulusan Harvard University yang paling setia dan mengagumi karya-karya Keynes. Hansen banyak menulis karya ilmiah. Terdapat tiga buku Hansen yang paling menonjol. *Pertama*, *Fiscal Policy and Business Cycle* (1941); *kedua*, *Business Cycles and National Income* (1951) dan terakhir, *A Guide to Keynes* (1953).

Buku-buku karangan yang dihasilkan oleh Alvin Hansen, khususnya pada buku pertama dan kedua, menitikberatkan pada penjelasan tentang fluktuasi ekonomi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ekonomi berfluktuatif dan tidak lupa pada buku tersebut juga menjelaskan tentang langkah-langkah yang antisipatif terhadap gejolak perekonomian. Buku Hansen ketiga, *A Guide to Keynes*, ia menyusun kembali buku Keynes yang berjudul *The General Theory* secara sistematis.

2. *Simon Kuznets*

Kuznets berperan dalam kegiatan yang bersangkutan-paut dengan data statistik yang selanjutnya berkembang menjadi ilmu pengetahuan dengan kerangka analisis berdasarkan teknik dan metode matematika. Kuznets menulis beberapa buku yang berkaitan dengan

ekonomi antara lain: *National Income and Its Composition: 1919–1938* (1941), *Economic Change* (1953) dan *Modern Economic Growth, Rate, Structure and Spread* (1960). Dalam karyanya yang pertama Kuznets menyumbangkan pemikiran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan pendapatan nasional.

Pemikiran dari Kuznets dengan pendekatan kuantitatif-empiris, memberi gambaran yang lebih jelas bagi ekonom selanjutnya dalam mengamati gerak perekonomian secara keseluruhan, sehingga perubahan dan pola dari perekonomian dapat dipelajari menjadi lebih detail. Pola-pola yang diamati dari waktu-waktu dikenal dengan analisis time series.

3. *Wassily Leontief*

Leontief juga mengenalkan pengamatan pada perekonomian tidak berbeda jauh dengan Kuznets, perbedaannya adalah bahwa Leontief lebih menggunakan matriks yang dapat menghubungkan antara faktor-faktor produksi (input) dari setiap sektor ekonomi yang dapat dijadikan barang jadi atau hasil dari penggunaan faktor produksi (output) tersebut. Matriks dari Leontief lebih dikenal dengan analisis input-output. Dengan analisis tersebut, pengamat ekonomi menjadi lebih mudah dalam mengamati komposisi dan keterkaitan antar sektor ekonomi secara keseluruhan.

4. *Paul Samuelson*

Samuelson menyempurnakan kerangka dasar pemikiran Keynes sampai pada tingkat yang lebih maju dan dalam lingkup pembahasan yang lebih luas, ada dua hal yang berjasa dari ulasan Samuelson. Pertama, diperlihatkannya tentang hubungan timbal-balik antara faktor *multiplier* dan asas *accelerator*, yang berimplikasi bahwa *multiplier* dan *accelerator* saling memperkuat perannya dalam jalannya perekonomian secara agregat. Permintaan efektif dari masyarakat dipengaruhi oleh investasi langsung (*autonomous investment*) yang selanjutnya melalui faktor *multiplier* menyebabkan tambahan pendapatan. Permintaan efektif pun dapat diberi stimultan yang berawal dari pengeluaran konsumen selanjutnya melalui asas *accelerator* secara tidak langsung menyebabkan bertambahnya investasi (*induced investement*).

Bidang kedua adalah lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional. Samuelson memperjelas hubungan antara kebijakan fiskal dengan keseimbangan lalu lintas pembayaran internasional. Hal ini memperlihatkan peranan *foreign trade multiplier* (dampak multiplier yang berasal dari perdagangan luar negeri) dan berbagai kemungkinan penyimpangan dari keseimbangan internasional, di sini dapat dilihat adanya integrasi mengenai segi ekulibrium internasional kedalam kerangka umum teori makroekonomi.

5. *Joseph Alois Schumpeter (1883-1950)*

Schumpeter menyatakan bahwa pelaku utama dari aktivitas perekonomian adalah entrepreneur. Bukan hanya pengusaha tapi juga individu yang siap menghadapi resiko dan dapat menghasilkan produk dan teknologi dalam masyarakat.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat dalam lingkungan, masyarakat yang menghargai dan merangsang orang untuk menggali penemuan-penemuan baru, seperti lingkungan masyarakat penganut *laissez faire*. Dalam masyarakat yang demikian, insentif bagi penemuan baru lebih tinggi. Juga depresi tahun 30-an, menurut Schumpeter, bukan karena kelemahan sistem kapatalis tetapi justru karena kekuatannya, yang pada saat itu perekonomian sedang berada dalam salah satu titik terendah dalam suatu gelombang panjang. Jika ditemukan inovasi dan teknologi baru, perekonomian akan membaik kembali.

Latihan Soal

1. Jelaskan mengenai pandangan klasik kaitanya dengan fleksibilitas tingkat bunga yang berhubungan dengan penawaran dan permintaan agregat pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh.
2. Jelaskan perbedaan pandangan Keynes dan Klasik mengenai faktor penentu tingkat tabungan dan investasi dalam ekonomi.
3. Pandangan Neo-Keynes berbeda dengan Keynesian dimana perekonomian sering terjadi fluktuasi ekonomi, mengapa demikian. Jelaskan faktor penyebabnya.

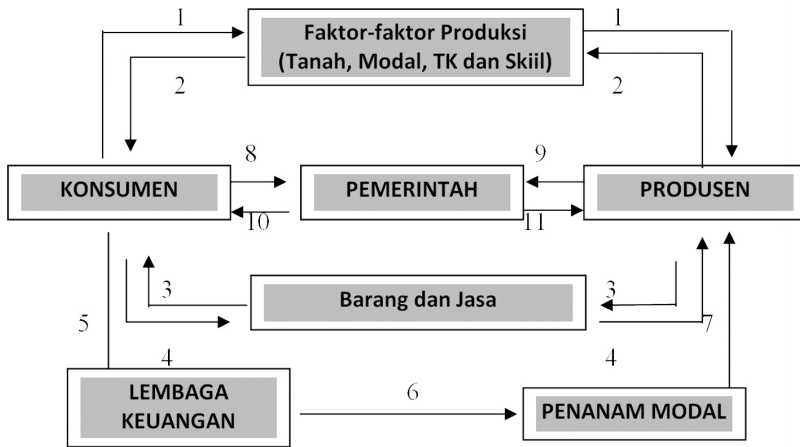


BAB 4

PENDAPATAN NASIONAL

A. Pengertian

Setiap negara memiliki kekayaan yang beragam dalam kepemilikan sumber daya baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM), dimana seluruh sumberdaya yang dimiliki suatu negara harus digunakan dengan tujuan peningkatan akan perekonomian penduduknya. Negara Indonesia mempunyai sumberdaya yang sangat berlimpah, namun tidak mungkin hanya dengan bekal itu dapat menjamin Indonesia menjadi negara maju. Dikarenakan ia pun harus mampu memberikan ketersediaan barang atau jasa yang menjadi kebutuhan dalam konsumsi penduduknya, baik melalui produksi maupun perdagangan. Maka dari itu total produksi barang dan atau jasa yang dapat dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun dapat diartikan sebagai cerminan kaya atau miskinnya negara Indonesia. Perhatikan gambar 4.1



Gambar 4.1 Sirkulasi Aliran Pendapatan

Keterangan:

1. Perusahaan meminjam FP (faktor produksi) dari konsumen
2. Produsen memberi kompensasi kepada konsumen atas FP yang digunakan
3. Konsumen membeli produk berupa barang ataupun jasa dari produsen
4. Pembelian produk berupa barang ataupun jasa dari konsumen merupakan pendapatan produsen
5. Semua pendapatan konsumen tidak seluruhnya untuk konsumsi, sebagian ditabung di lembaga keuangan
6. Sebagian pengeluaran konsumen yang tidak digunakan untuk konsumsi akan disimpan di LK (lembaga keuangan)
7. Dana yang tersimpan di LK digunakan untuk penanaman modal
8. Keuntungan perusahaan sebagian untuk membayar pajak
9. Dana yang tersedia dalam LK digunakan oleh perusahaan untuk investasi
10. Konsumen membayar pajak kepada pemerintah, Produsen membayar pajak kepada pemerintah, Pemerintah memberikan subsidi kepada konsumen, Pengeluaran pemerintah berdasarkan produk barang ataupun jasa, Pemerintah memberikan subsidi kepada produsen, Belanja pemerintah atas barang dan jasa

Dari gambar 4.1 di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan *National Income* adalah pemasukan yang diperoleh masyarakat disebabkan penjualan faktor produksi yang mereka miliki dalam proses produksi. *National Income* atau pendapatan nasional suatu Negara berasal dari seluruh sektor produksi bidang ekonomi suatu Negara dalam kurun waktu satu tahun.

Besaran *National Income* dapat disebabkan oleh beberapa factor, sebagai berikut:

1. Ketersediaan faktor produksi
2. Kemampuan tenaga kerja
3. Teknologi produksi dan,
4. Kestabilan suatu Negara.

Penjelasan mengenai pendapatan nasional tidak terlepas dari asumsi bahwa ada kata ataupun sebutan yang dianggap memiliki makna yang serupa walaupun dalam kenyataannya tidak sesuai. Adapun sebutan yang sering kali digunakan untuk menyebut pendapatan nasional antara lain: produk domestik bruto (PDB), gross national product (GNP), dan net national income (NII), dan sebutan yang saat ini kerap kali dipakai ialah PDRB (produk domestik regional bruto). Beberapa sebutan di atas merupakan kata yang dapat memperlihatkan pendapatan nasional suatu negara, akan tetapi dalam penggunaan instrumen di beberapa negara tidaklah sama yang kemudian akan memberikan makna berbeda di dalam penggunaannya. Ada beberapa sebutan untuk pendapatan nasional, ia adalah net national product (NNP), personal income (PI) dan disposable income (DI).

B. Beberapa Istilah Pendapatan Nasional

1. Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product

Produk domestik bruto adalah total dari seluruh produk baik barang maupun jasa yang telah diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu satu tahun, di dalamnya meliputi produk yang diproduksi oleh warga Negara asing (WNA) dan perusahaan asing yang melakukan proses produksi di Negara tersebut. Sebagai contoh dari perusahaan asing yang beroperasi di negara Indonesia antara lain KFC, Freeport, Mc Donald, Carrefour, namun tidak mencakup barang ataupun jasa yang

diproduksi oleh penduduk Indonesia yang berada diluar negeri. Terdapat beberapa lapangan pekerjaan yang termasuk ke dalam penghitungan *Product Domestic Bruto* (PDB) antara lain:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Pengadaan Listrik, Gas
- e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- h. Transportasi dan Pergudangan
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- j. Informasi dan Komunikasi
- k. Jasa Keuangan dan Asuransi
- l. Real Estate
- m. Jasa Perusahaan
- n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- o. Jasa Pendidikan
- p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q. Jasa lainnya

2. Produk Domestik Regional Bruto

Dengan adanya kegiatan produksi barang atau jasa di dalam wilayah hukum sebuah wilayah maka, ia akan turut memberikan kontribusi terhadap pertambahan pemasukan pada wilayah tersebut. Bagan atau struktur ekonomi pada sebuah wilayah provinsi maupun sub wilayah dibawahnya berpengaruh dan terpengaruh dari jumlah rumah produksi dalam wilayah tersebut.

Bertambahnya nilai akhir sebuah barang ataupun jasa yang mampu dihasilkan oleh perusahaan yang ada di sebuah daerah maka, akan berdampak kepada pertambahan perolehan PDRB daerah tersebut sehingga perekonomian akan semakin meningkat. Yang pada akhirnya jika terjadi peningkatan pada perekonomian daerah maka akan mendorong bertambahnya pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional.

Maka dari itu Pendapatan Daerah Regional Bruto Dengan kata lain adalah *jumlah total dari produk yang berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu daerah pada kurun waktu 1 (satu) tahun*. Hasil produksi dari perusahaan asing seperti Mc Donald, PT Danone, Pepsi dll juga akan menjadi salah satu variable peghitungan dalam kalkulasi PDRB.

Produk Domestik Bruto (PDB) Dalam perhitungannya produk domestic bruto dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDB menurut harga berlaku (*current price*) dan PDB menurut harga konstan (*constant price*). Menurut harga berlaku dikalkulasi berdasarkan harga berlaku saat penghitungan PDB dilakukan, sedangkan menurut harga konstan dihitung berdasarkan harga tahun tertentu yang ditetapkan oleh otoritas/pemerintah, sehingga mengabaikan perubahan harga-harga barang dan jasa atau mengabaikan inflasi. Produk domestik bruto menurut harga konstan juga disebut PDB riil, karena perubahan jumlah nilai PDB tersebut disebabkan secara riil oleh jumlah produksi karena perubahan harga.

Dengan mendasarkan pada nilai Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari satu periode ke periode berikutnya, maka kita dapat menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara dari PDB yang biasa juga disebut dengan pertumbuhan PDB (*GDP growth*). Pertumbuhan ekonomi inilah yang digunakan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara pada masa pemerintahan tertentu. Apabila pertumbuhan ekonomi rendah (lebih kecil dari 5 %), bahkan negatif maka bisa dikatakan pembangunan ekonomi terutama disektor produksi kurang berhasil, tapi apabila pertumbuhan ekonomi tinggi mendekati 10% bahkan lebih, maka pembangunan ekonomi dikatakan berkembang baik. Namunperlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya indikator ekonomi makro suatu negara. SelainpertumbuhanPDB ada juga pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) yang kemudian disebut *GNP growth*. Perhitungan GNP growth didasarkan pada nilai pertumbuhan GNP riil suatu periode ke periode berikutnya.

Tabel 4.2 PDB Indonesia Tahun 1999 sd 2013

Tahun	Constant Price (Rp.) Base Year 2000			Current Price (Rp.)			
	PDB (Billion)	Change (%)	PDB Non Oil and Gas	Change (%)	PDB (Billion)	Change (%)	PDB Non Oil and Gas
2013	2.770.398,50	5,82	2.636.976,00	4,88	9.083.972,20	10,72	8.415.239,50
2012	2.618.139,20	6,23	2.514.295,00	8,25	8.238.550,10	11,80	7.600.349,00
2011	2.464.676,50	6,49	2.322.763,50	6,98	7.422.781,20	14,40	6.797.879,20
2010	2.314.458,80	6,22	2.171.113,50	6,60	6.446.851,90	15,57	5.941.951,90
2009	2.178.850,40	4,63	2.036.685,50	5,00	5.606.203,40	16,12	5.141.414,40
2008	2.082.456,10	6,01	1.939.625,90	6,47	4.948.688,40	25,27	4.427.633,50
2007	1.964.327,30	6,35	1.821.757,70	6,95	3.950.893,20	18,32	3.534.406,50
2006	1.847.126,70	5,50	1.703.422,40	6,11	3.339.216,80	20,36	2.967.040,30
2005	1.750.815,20	5,69	1.605.261,80	6,57	2.774.281,00	20,84	2.548.234,30
2004	1.656.516,80	5,03	1.506.296,60	5,97	2.295.826,20	14,01	2.083.077,90
2003	1.577.171,30	4,72	1.421.474,80	5,62	2.013.674,60	10,53	1.840.854,90
2002	1.505.216,40	4,50	1.344.906,30	5,23	1.821.833,40	10,66	1.659.081,40
2001	1.440.405,70	3,64	1.278.060,00	4,90	1.646.322,00	18,46	1.467.642,30
2000	1.389.769,90	266,16	1.218.334,10	252,39	1.389.769,90	25,21	1.218.334,10
1999	379.557,80	0,85	345.732,80	1,09	1.109.979,50	0,00	1.003.590,70

Sumber: BPS, Diolah dari Data Pusat Informasi, Kementerian Perdagangan

3. Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP)

Produk Nasional Bruto ialah jumlah dari keseluruhan barang ataupun jasa yang telah diproduksi oleh penduduk di dalam sebuah Negara selama satu tahun mencakup seluruh barang ataupun jasa yang diproduksi di luar negeri oleh warga Negara yang bersangkutan akan tetapi barang ataupun jasa yang diproduksi oleh warga Negara asing di dalam negeri tidak termasuk ke dalam penghitungan.

$$\text{GNP} = \text{GDP} - \text{Pendapatan Neto Terhadap Luar Negeri}$$

Untuk mengetahui keadaan ekonomi suatu Negara dapat dilakukan perbandingan antara GDP dan GNP, sebagai berikut:

- a. Jika nilai GDP suatu Negara lebih besar daripada nilai GNP Negara tersebut maka mengindikasikan belum majunya Negara itu, dan kondisi ini akan menyebabkan terjadinya pendapatan neto ke luar negeri (*Net Factor Income to Aboard*) atau Negara tersebut mengalami kondisi dimana nilai investasi asing lebih besar dibandingkan nilai investasi Negara tersebut di luar negeri.
- b. Jika nilai GDP suatu Negara lebih kecil daripada nilai GNP Negara tersebut berarti perekonomian Negara tersebut sudah dalam klasifikasi maju karena nilai investasi luarnegeri mereka lebih besar dibandingkan investasi asing didalam negeri.

4. Produk Nasional Neto atau Net National Product (NNP)

Produk nasional neto ialah total dari produksi kotor suatu Negara atau GNP dikurangi nilai dari penyusutan modal yang terjadi. Makna dari kata Net National Produk sama dengan kata Pendapatan Nasional (*Natinal Income*), dan keduanya dapat dihitung dengan menggunakan harga pasar dalam rumusan seperti dibawah ini:

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{Penyusutan Barang-Barang Modal}$$

5. Pendapatan Nasional Neto atau Net National Income (NNI)

Pendapatan nasional bersih ialah total nilai dari produksi bersih yang dihasilkan oleh suatu Negara kemudian dikurangi dengan nilai dari pajak

tidak langsung. Pajak tidak langsung tidak termasuk dalam instrument biaya produksi namun merupakan salah satu unsur pembentuk harga pasar, dimana pajak tersebut dapat dialih tangankan kepada pihak lain. Adapun yang termasuk kedalam kategori pajak tidak langsung antara lain: Bea masuk dan cukai, PPN, dan pajak penjualan.

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak Tidak Langsung}$$

6. Pendapatan Perseorangan atau Personal Income (PI)

Pendapatan perseorangan merupakan sejumlah nilai yang berhak diterima seseorang akibat dari keterlibatannya di dalam proses produksi atau menjual faktor produksi yang dimiliki kepada produsen sebagai pelaku bisnis. Pendapatan ini tidak akan sepenuhnya di terima oleh penjual faktor produksi, dikarenakan adanya pengurangan laba yang tidak dibagikan, pembayaran pajak, tagihan asuransi, jaminan sosial dan juga dana (*transfer tpaymen*) seperti uang pensiun, uang sosial dan juga bantuan kepada panti dan sebagainya.

$$\text{Personal Income} = \text{Net National Income} + \text{transfer payment} - (\text{laba tidak dibagikan} + \text{pajak} + \text{asuransi} + \text{jaminan sosial})$$

7. Pendapatan Bersih atau Disposable Income (DI)

Pendapatan bersih ialah satuan moneter yang dapat digunakan secara langsung dalam kegiatan transaksi jual-beli ataupun *saving*. Pendapatan bebas akan berpengaruh secara langsung terhadap permintaan dikarenakan sebagian besarnya digunakan sebagai penunjang konsumsi adapun sebagian kecilnya merupakan unsur pembentuk modal dalam bentuk tabungan. Besaran pendapatan bebas diperoleh dari pengurangan pendapatan perseorangan dengan pajak langsung seperti (pajak penghasilan).

$$\text{DI} = \text{PI} - \text{Pajak Langsung}$$

Tabel 4.3 Contoh Perhitungan Pendapatan Nasional (Dinyatakan dalam Milyar Rupiah)

I	Produk Domestik Bruto (PDB)		100.000,00
	Dikurangi : Pendapatan Neto terhadap Luar Negeri		10.000,00
II	Produk Nasional Bruto (PNB)		90.000,00
	Dikurangi : Penyusutan Barang Modal		15.000,00
III	Produk Nasional Neto (NNP)		75.000,00
	Dikurangi : Pajak Tidak Langsung		7.500,00
IV	Pendapatan Nasional Neto (NNI)		67.500,00
	Ditambah : Transfer Payment		3.000,00
	Dikurangi :		
	a. Laba yang ditahan	750,00	
	b. Pajak Perseroan	2.500,00	
	c. Jaminan Sosial	1.250,00	
V	Personal Income (PI)		66.500,00
	Dikurangi : Pajak Langsung		13.000,00
VI	Pendapatan Bebas (DI)		53.500,00
	Dikurangi : Tabungan		10.700,00
	Tingkat Konsumsi		42.800,00

Karena dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam kemajuan suatu Negara nilai dari pendapatan nasional setiap tahunnya harus dihitung secara akurat, adapun beberapa peranan penting *National Income* antara lain:

a. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan

Bertambahnya pendapatan nasional suatu Negara akan memberikan dampak kepada kenaikan tingkat kesejahteraan penduduk suatu Negara begitupun jika terjadi sebaliknya, sedangkan pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai acuan dari kesejahteraan itu sendiri. Pendapatan perkapita ialah pendapatan yang diterima setiap oleh setiap warga Negara, besarnya didapat dengan cara membagi total *national income* dengan jumlah penduduk Negara itu. Sehingga jika nilai dari pendapatan perkapita di suatu Negara mengalami peningkatan maka dapat dipastikan tingkat kesejahteraan penduduk Negara tersebut akan meningkat dengan kata lain lebih sejahtera.

b. Sebagai penentu struktur ekonomi

Struktur ekonomi pada sebuah Negara dapat dilihat melalui sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar kepada pendapatan nasional suatu Negara, sebuah Negara dikatakan agraris jika kontributor utama jumlah nilai pendapatan nasional dari seluruh sektor perekonomian yang ada adalah pertanian, dimana sector lain hanya menyumbang sebagian kecilnya.

c. Sebagai penentu dalam penyusunan kebijakan

Maknanya, nilai pendapatan nasional dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perumusan dan pengambilan kebijakan-kebijakan pada bidang tertentu menurut kontribusinya terhadap nilai Pendapatan Nasional, sebagai contoh dalam sektor industri pemerintah dapat menetapkan kebijakan harga pasar, penggunaan bahan impor, prosedur pemakaian bahan kimia dalam produksi dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan di luar sektor industri sebagai penunjang dalam peningkatan pendapatan nasional.

d. Sebagai tolak ukur manfaat dalam hubungan internasional

Maknanya, sebesar apakah manfaat yang diterima sebuah Negara akibat adanya hubungan dengan Negara lain terhadap pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Manfaat ini bisa dilihat dengan cara perbandingan antara neraca pembayaran internasional terhadap neraca pendapatan nasional.

e. Sebagai pembanding intensitas perekonomian suatu Negara

Tingkat kegiatan perekonomian suatu masyarakat dalam sebuah Negara dapat dilihat melalui Nilai Pendapatan Nasional yang dimiliki Negara tersebut, maksudnya apabila dalam kurun waktu tertentu terjadi peningkatan terhadap nilai pendapatan nasional maka peningkatan nilai tersebut ini merupakan sebuah pertanda aktivitas perekonomian penduduk suatu Negara meningkat, begitupun jika terjadi penurunan dalam nilai pendapatan nasionalnya yang berarti telah terjadi penurunan dalam aktivitas ekonomi Negara yang bersangkutan.

C. Metode Penghitungan Pendapatan Nasional

Menghitung pendapatan suatu Negara dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, adapun metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan Pendapatan

Langkah yang akan digunakan dalam metode ini adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai pendapatan yang telah diterima oleh masyarakat atas dasar penjualan faktor produksi yang dimiliki dalam proses produksi sebuah perusahaan.

Faktor Produksi	Pendapatan	Simbol
Tanah	Sewa	r
Tenaga Kerja	Upah	w
Modal	Bunga	i
Skill	Profit	P

Rumus menghitung dengan metode pendekatan pendapatan, ialah:

$$Y = r + w + i + p$$

2. Metode Pendekatan Produksi

Perhitungan pendapatan nasional dengan metode produksi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah (*value added*) yang diwujudkan dengan berbagai jenis sektor yang ada dalam perekonomian, antara lain:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Pengadaan Listrik, Gas
- e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- f. Konstruksi
- g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- h. Transportasi dan Pergudangan
- i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- j. Informasi dan Komunikasi

- k. Jasa Keuangan dan Asuransi
- l. Real Estate
- m. Jasa Perusahaan
- n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- o. Jasa Pendidikan
- p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q. Jasa lainnya

Lihatlah tabel dibawah ini:

Komoditas	Nilai Produksi	Niali Tambah
Kapas	Rp. 5.000	Rp. 5.000
Benang	Rp. 10.000	Rp. 5.000
Kain	Rp. 12.000	Rp. 2.500
Kemeja	Rp. 20.000	Rp. 7.500
Jumlah	Rp. 47.000	Rp. 20.000

- a) Besaran nilai tambah pada komoditas kapas adalah lima ribu rupiah (disebabkan oleh nilai produksinya yang belum mengalami perubahan).
- b) Benang memiliki nilai tambah sebesar lima ribu rupiah yang dihasilkan dari nilai produksi kapas menjadi benang.
- c) Kain memiliki nilai tambah sebesar dua ribu lima ratus rupiah yang merupakan selisih dari nilai produksi benang menjadi kain.
- d) Kemeja memiliki nilai tambah sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah selisih dari nilai produksi kain menjadi kemeja.

Kesimpulan dari ilustrasi di atas adalah perubahan bentuk sebuah komoditas dari kmoditas awal (kapas) menjadi komoditas akhir (kemeja) menghasilkan nilai tambah sebesar dua puluh ribu rupiah (Rp 20.000). Dengan menggunakan perhitungan niai tambah akan menghilangkan kemungkinan terjadinya penghitungan ganda sehingga rumusan yang tepat pada metode ini adalah:

$$Y = NTB1+NTB2+NTB3+...NTBn$$

3. Metode Pendekatan Pengeluaran

Guna mengetahui jumlah pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran cara yang dilakukan adalah dengan menjumlahkan total pengeluaran seluruh penduduk yaitu rumah tangga yang ada di suatu Negara, sedangkan pengeluaran yang dimaksud bukanlah nilai transaksi barang jadi guna menghindari penghitungan ganda. Acuan hitung pengeluaran dari sektor rumah tangga ada empat (4):

a. Rumah tangga konsumen

Dalam rumah tangga konsumen pengeluaran yang biasa dilakukan ialah pembelian dalam bentuk barang maupun jasa guna memenuhi kebutuhan hidup mereka baik primer, sekunder maupun tersier yang biasa disebut juga dengan konsumsi (C).

b. Perusahaan atau rumah tangga produsen

Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga ini dalam rangka pengumpulan barang dan jasa dalam produksi barang atau jasa yang digunakan dalam proses yang lebih lanjut atau biasa disebut sebagai investasi (I).

c. Pemerintahan atau rumah tangga pemerintah

Beberapa contoh dari pengeluaran pemerintah adalah:

- 1) Belanja pemerintah dalam konsumsi, seperti penambahan peralatan kantor dan juga gaji pegawai.
- 2) Belanja pemerintah sebagai investasi, seperti pembangunan sarana publik (jalan, jembatan dll).

Dana yang dikeluarkan pemerintah dan swasta akan dikelompokkan dalam komponen pembentuk modal tetap domestik bruto dan perubahan stok yang biasa disebut pengeluaran pemerintah / *Government Expenditure* (G).

d. Rumah tangga luar negeri atau ekspor bersih (X-M)

Penghitungan nilai pengeluaran dalam rumah tangga ini adalah, selisih nilai ekspor kepada nilai impor dari suatu Negara dalam perdagangan internasional.

Empat sektor perekonomian di atas melakukan pengeluaran baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi yang kemudian menjadi

pembentuk dari pendapatan nasional sehingga kita mendapatkan rumusan sebagai berikut:

$$Y=C+I+G+(X-M)$$

Keterangan:

Y : pendapatan nasional

C : konsumsi

I : investasi

G : pengeluaran pemerintah

X : ekspor

M : impor

Contoh:

Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Rp 125.000
Pengeluaran investasi	Rp 150.700
Pengeluaran konsumsi pemerintah	Rp 130.000
Ekspor barang dan jasa	Rp 225.250
Impor barang dan jasa	Rp 170.500

(NB: Dalam Milyaran Rupiah)

Dari data di atas, kita dapat menghitung sebagai berikut.

No	Jenis Transaksi	Total
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	125.000
2	Pengeluaran investasi	150.700
3	Pengeluaran konsumsi pemerintah	130.000
4	Ekspor barang dan jasa	225.250
5	Impor barang dan jasa	-170.500
Produk Domestik Bruto		460.450

Berikut contoh Produk Domestik Bruto Menurut Jenis Pengeluaran, Produk Nasional Bruto, dan Pendapatan Nasional Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 (miliar rupiah), tahun 2000-2013

Tabel 4.5 PDB Berdasarkan Jenis Pengeluaran Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2010	2011	2012	2013
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	1.308.273	1.369.881	1.442.193	1.518.393
Pengeluaran konsumsi pemerintah	196.469	202.795	205.386	215.393
Pembentukan modal tetap domestik bruto	553.348	599.506	657.589	688.560
Perubahan inventori	(604)	9.034	50.371	53.768
Diskrepansi statistik ¹	13.824	4.419	22.733	(338)
Ekspor barang dan jasa	1.074.569	1.221.229	1.245.702	1.311.760
Dikurangi: Impor barang dan jasa	831.418	942.297	1.005.036	1.017.191
Produk Domestik Bruto	2.314.459	2.464.566	2.618.938	2.770.345
Pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi	(92.992)	(96.459)	(100.656)	(111.056)
Produk Nasional Bruto	2.221.467	2.368.107	2.518.283	2.659.289
Dikurangi: Pajak tak langsung neto	81.054	60.348	15.272	82.628
Dikurangi: Penyusutan	115.723	123.228	130.947	138.517
Pendapatan Nasional	2.024.690	2.184.531	2.372.063	2.438.144

Sumber: BPS (Diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 Jika kita perhatikan pada pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi bernilai negatif dari tahun 2010 sebesar -92.992 Triliun meningkat menjadi -111.056 Triliun tahun 2013, ini berarti bahwa pendapatan neto terhadap LN atas FP telah semakin negatif, atau semakin besar pendapatan neto yang lari ke Luar negeri. Dengan demikian semakin besar nilai negatifnya berarti perbedaan antara GNP dengan GDP semakin besar ($GNP = GDP +$ Produk Neto terhadap Luar Negeri). Salah satu ciri-ciri negara maju GNP lebih besar dari GDP, jika pendapatan neto terhadap LN atas FP semakin negatif maka GDP lebih besar dari GNP.

Tabel 4.6 PDB Berdasarkan Jenis Pengeluaran Tahun 2010-2013 (% kontribusi sektor)

Jenis Pengeluaran	Proporsi (%)			
	2010	2011	2012	2013
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	56,53	55,58	55,07	54,81
Pengeluaran konsumsi pemerintah	8,49	8,23	7,84	7,77
Pembentukan modal tetap domestik bruto	23,91	24,32	25,11	24,85
Perubahan inventori	(0,03)	0,37	1,92	1,94
Diskrepansi statistik ¹	0,60	0,18	0,87	(0,01)
Ekspor barang dan jasa	46,43	49,55	47,57	47,35
Dikurangi: Impor barang dan jasa	35,92	38,23	38,38	36,72
Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS (Diolah)

Dari tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan jenis pengeluaran, kontribusi terbesar adalah pengeluaran dari konsumsi rumah tangga rata-rata di atas 55 %, kemudian baru sektor luar negeri yaitu ekspor rata-rata di atas 47 % dan impor rata-rata di atas 37 %, dan seterusnya sektor yang lainnya.

D. Perbandingan Tingkat PDB dan Tingkat Per Kapita

Guna memahami perbandingan tingkat perkapita dua Negara alangkah baiknya kita dapat mengetahui hubungan antara jumlah penduduk, pendapatan nasional dan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita berperan penting terhadap penentuan tingkat kesejahteraan penduduk suatu Negara. Angka pendapatan perkapita dihitung dari pendapatan nasional sebuah negara pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk Negara tersebut, dalam pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa pendapatan nasional dapat dilihat dari beberapa pendekatan.

Pada umumnya sebagian besar Negara akan memilih metode pendekatan produksi dalam penghitungan pendapatan nasional Negara mereka. Konsep pendekatan produksi dalam penghitungan pendapatan perkapita digambarkan dalam jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat atau sering disebut dengan istilah produk domestic

bruto (PDB) atau produk nasional bruto (PNB), pada umumnya cara perhitungan pendapatan perkapita yang dilakukan banyak Negara di dunia ada dua (2) macam, yaitu:

1. Dilihat dari komponen produk domestic bruto (PDB)

$$\text{PDB perkapita} = \frac{\text{PDB tahun-n}}{\text{Jumlah penduduk tahun-n}}$$

2. Dilihat dari komponen produk nasional bruto (PNB)

$$\text{PNB perkapita} = \frac{\text{PNB tahun-n}}{\text{Jumlah penduduk tahun-n}}$$

Tabel 4.7 Pendapatan Per Kapita Negara Asia Tenggara Tahun 2009-2013 (US\$)

No.	Negara	2009	2010	2011	2012	2013	Rerata Pertumbuhan
1	Singapore	37.220	41.122	50.714	57.238	61.567	13,56
2	Brunei	31.180	33.000	36.521	47.200	55.111	15,63
3	Malaysia	7.350	8.373	8.617	14.603	17.776	27,01
4	Thailand	3.760	4.608	5.281	8.643	10.849	31,59
5	Indonesia	2.050	2.946	3.469	4.380	5.302	27,19
6	Philippines	2.050	2.140	2.255	3.725	4.691	25,22
7	Vietnam	930	1.224	1.362	3.725	3.750	54,26
8	Laos	2.255	1.177	1.204	2.435	3.260	22,65
9	Myanmar	750	800	804	1.400	1.490	21,93
10	Kamboja	610	795	912	1.246	2.579	47,16
Sumber: World Bank							

Kesimpulannya adalah bahwa berdasarkan rumus perhitungan maka pendapatan nasional (PDB) dan jumlah penduduk merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan perkapita, naik turunnya PDB atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pendapatan perkapita.

Sehingga kita tidak bisa mengandalkan komponen pendapatan nasional semata untuk bisa mengetahui kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara. Meskipun pertambahan pendapatan nasional

besar tetapi pertambahan penduduknya juga besar maka pendapatan perkapitanya tetap kecil. Oleh karena itu agar pendapatan perkapita besar maka kita harus mampu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

E. Perbandingan Pendapatan Perkapita Indonesia Dan Negara Lain

Indonesia termasuk kedalam Negara yang sedang berkembang maka dari itu jika perbandingannya adalah Negara maju maka akan terlihat jelas perbedaan dari segi pendapatan perkapita, namun jika perbandingannya adalah sesama Negara berkembang Indonesia tidaklah begitu terpaut jauh.

Untuk melihat perbandingan pendapatan suatu Negara, kita dapat melihat pengelompokan bank dunia terhadap Negara-negara di Dunia berdasarkan pendapatannya yaitu: Tinggi, Menengah Tinggi, Menengah ke bawah dan Rendah dalam tabel berikut.

Tabel 4.8 Pengelompokan Negara di Dunia Menurut Bank Dunia

No.	Kelompok Negara	Perkapita (US\$)
1.	Berpendapatan rendah (<i>low income</i>)	Kurang dari 765
2.	Berpendapatan menengah ke bawah (<i>low middle income</i>)	766 – 3.035
3.	Berpendapatan menengah tinggi (<i>upper middle income</i>)	3.036 – 9.385
4.	Berpendapata tinggi (<i>high income</i>)	Lebih dari 9.386

Sumber: Bank Dunia

Berdasar dari pengelompokan oleh bank dunia Indonesia berada pada kelompok Negara dengan pendapatan menengah tinggi dengan pendapatan perkapita sebesar \$3.197 per tahun per juli 2017.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kegunaan dari kalkulasi pendapatan perkapita antara lain:

1. Sebagai pembanding tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai sumber perbandingan tingkat kesejahteraan penduduk antar negara.
3. Sebagai salah satu dasar dalam pengambilan kebijakan perekonomian.

4. Sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa depan.
5. Sebagai penghitung standar hidup suatu negara.

Pendalaman materi tentang pendapatan nasional dengan maksud untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal di suatu Negara. Selain diatas tujuan lain dari itu adalah:

1. Barometer kemajuan perekonomian suatu negara
2. Standar perumusan kebijakan pemerintah
3. Perbandingan belanja pendapatan masyarakat
4. Perbandingan perekonomian antar daerah maupun Negara dalam tingkat perkembangan ekonomi dan pembangunan.

F. GNP dan Permasalahan Yang Dihadapi

Adapun beberapa permasalahan yang terdapat pada kasus penghitungan *gross national product* adalah:

1. Besarnya GNP

Besarnya GNP suatu negara tergantung pada sumberdaya alam, kualitas dan kuantitas SDM, persediaan barang-barang modal atau investasi, ketenangan situasi politik, dan orde-orde yang dianut oleh negara.

2. Susunan GNP

Susunan GNP sangat bergantung pada struktur ekonomi suatu negara. Akan sangat sulit bagi Negara tanpa sektor dominan dalam struktur perekonomiannya, karena tidak ada sektor penopang perekonomian.

3. Stabilitas GNP

GNP sebagai barometer kehidupan ekonomi suatu negara, bisa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut berkaitan erat dengan gerak konjungtur (*bussines cycle*). Pada masa konjungtur berada pada fase ekspansi atau prosperity, GNP akan mengalami peningkatan. Sebaliknya pada masa kontraksi atau konjungtur berada pada fase menurun, maka GNP juga ikut menurun.

4. Bagian yang diterima oleh produsen

Proses produksi berlangsung karena menggunakan faktor-faktor produksi sehingga para pemilik faktor-faktor produksi

mendapatkan bagian. Permasalahannya adalah berapakah besarnya dari GNP tersebut akan diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi tersebut. Persoalan ini kemudian memunculkan masalah pembagian pendapatan.

5. Bagian yang diterima oleh negara

Pemerintah akan menarik sebagian GNP berupa pemungutan pajak. Pajak tersebut akan dipergunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pemungutan pajak menimbulkan masalah perpajakan dan efek-efeknya terhadap perekonomian secara lebih luas.

G. Kendala Dalam Penghitungan Pendapatan Nasional

Dalam menentukan besaran pasti dari nilai pendapatan nasional sangatlah sukar sehingga banyak Negara yang menentukan pendapatan nasionalnya berdasarkan perkiraan saja. Namun perkiraan tersebut dapat dipercaya, karena telah mendekati kebenaran. Tidak mampunya banyak Negara dalam menghitung nilai pasti dari pendapatan nasional dikarenakan hambatan-hambatan yang ada, adapun hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Kurang tersedianya catatan data statistik.

Kekurangan ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain;

- a. Kurang lengkapnya data yang tersedia
- b. Terbatasnya jumlah tenaga bidang statistik, dan
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik.

2. Terjadinya penghitungan ganda.

Penghitungan ganda dapat menyebabkan terlalu besarnya nilai dari pendapatan nasional sehingga jauh dari nilai yang sebenarnya.

3. Sukarnya pemisahan antara barang jadi dan setengah jadi.

Dikarenakan setiap barang yang harus diproduksi lebih lanjut termasuk dalam kategori barang setengah jadi, maka barang tersebut tidak bisa dimasukkan dalam penghitungan pendapatan nasional.

Setelah mempelajari seluk beluk pendapatan nasional tentunya kita akan mulai berfikir tentang tindakan apa yang dapat menambah pendapatan suatu Negara, bebrapa hal dibawah ini dianggap mampu mendorong hal tersebut antara lain:

1. Peningkatan pembangunan nasional khususnya dalam sektor ekonomi.
2. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Peningkatan peran pihak swasta dalam kontribusi mereka terhadap pertumbuhan perekonomian.
4. Mensupport pertumbuhan industry kecil dan rumah tangga sebagai penopang bagi industry menengah keatas.
5. Membuka lebar keran investasi melalui peraturan menteri dalam negeri maupun pinjaman modal asing.

Pada dasarnya sistem tersebut ialah sebuah tata cara dalam penghimpunan informasi mengenai penghitungan:

1. Niali produksi dari seluruh barang dan jasa di suatu negara.
2. Berbagai jenis nilai dari pengeluaran atas diciptakannya produk nasional.
3. Total pendapatan yang dapat dibawa pulang oleh beraneka ragam faktor produksi yang dipakai dalam proses produksi nasional.

Ada tiga cara yang dapat dilakukan dalam menghitung nilai dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian, sebagaimana telah dijelaskan dalam materi sebelumnya. Antara lain:

1. Cara Pengeluaran

Pendapatan nasional dengan metode perhitungan pengeluaran adalah seluruh pengeluaran untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat diproduksi oleh suatu negara.

2. Cara Produksi atau Cara Produk Neto

Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai produksi barang atau jasa yang direpresentasikan dari berbagai sektor (berjumlah 17 sektor ekonomi) dalam suatu perekonomian.

3. Cara Pendapatan

Pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang didapat dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam pendapatan nasional

Latihan Soal

1. Apa yang anda ketahui dengan pendapatan nasional itu, jelaskan sirkulasi aliran pendapatan dari berbagai sektor sehingga membentuk model perekonomian.
2. Jelaskan konsep pendapatan nasional produk domestik bruto (PDB) dan produk nasional bruto (PNB) dan apa yang membedakan dari dua konsep tersebut.
3. Dalam perhitungan pendapatan nasional ada tiga pendekatan. Jelaskan secara rinci dan berikan contohnya dengan data tentatif.
4. Jelaskan apa yang anda ketahui berikut ini, dan berikan contoh perhitungannya:
 - a. Pertumbuhan ekonomi
 - b. Pendapatan perkapita
 - c. Negara yang Low income, low middle income, upper middle income, dan high income
5. Jelaskan kesulitan yang timbul dalam perhitungan pendapatan nasional yang anda ketahui.



BAB 5

PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatan nasional adalah indikator penting dalam perekonomian nasional dan perlu mendapat perhatian khusus dalam penghitungannya. Suatu perekonomian akan dapat direncanakan perkembangannya secara nyata jika penghitungan pendapatan nasionalnya dihitung secara benar. Dalam menghitung pendapatan nasional diawali dengan pemahaman tentang perekonomian yang masih sederhana yaitu perekonomian dua sektor hingga perekonomian yang lebih kompleks yaitu perekonomian empat sektor. Sistem Perekonomian Sederhana atau sering disebut perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Pendapatan didapatkan dari faktor-faktor produksi antara lain Gaji, Upah Sewa, bunga, dan keuntungan. Kondisi keseimbangan terjadi apabila pendapatan dan pengeluaran seimbang.

Terdapat dua jenis kegiatan ekonomi dua sektor, yaitu:

1. **Sektor Tertutup** yaitu perekonomian yang tidak melakukan kegiatan diluar seperti ekspor impor.
2. **Sektor Sederhana** yaitu kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Biasa disebut tertutup sederhana.

Berikut alur kegiatan perekonomian dua sektor:



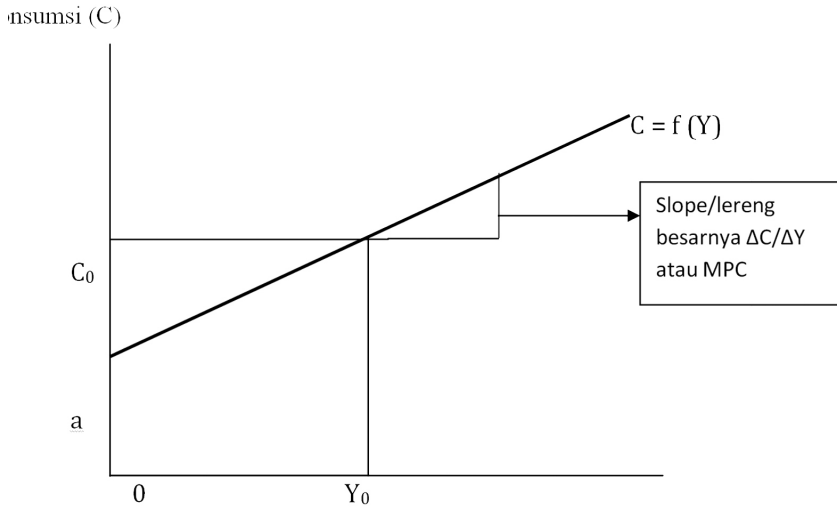
Gambar 5.1 Sirkulasi Pendapatan Nasional dua Sektor

Aliran-aliran pendapatan dua sektor memiliki ciri-ciri di antaranya:

1. Balas jasa yang dilakukan oleh sektor perusahaan atas penggunaan faktor produksi dari sektor rumah tangga adalah gaji dan upah, sewa, bunga dan laba.
2. Pendapatan rumah tanggadigunakan untuk mengonsumsi barang yang diproduksi perusahaan.
3. Pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi ditabung di institusi-institusi keuangan atau di bank.
4. Pengusaha ketika ingin berinvestasi akan meminjam tabungan keluarga yang terdapat di lembaga keuangan.

A. Fungsi Konsumsi

Konsumsi adalah keseluruhan penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu tingkat pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat suku bunga, bagi hasil, tingkat harga dan sebagainya. Namun secara sederhana konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan.



Gambar 5.2. Fungsi Konsumsi

Karakteristik kurva konsumsi:

1. Tingkat konsumsi [C] ditunjukkan dengan sumbu tegak pada kurva.
2. Pendapatan disposable (Y_d) ditunjukkan dengan sumbu datar. Y_d adalah pendapatan yang siap dibelanjakan
3. Kurva konsumsi mempunyai kemiringan (*slope*) positif. Apabila pendapatan mengalami kenaikan, maka nilai Konsumsi juga akan naik
4. Kurva konsumsi memotong sumbu C diatas nol

Fungsi konsumsi:

Karena perekonomian dua sektor belum ada pemerintah belum ada pajak, maka $Y_d = Y$

$$C = a + bY$$

Di mana:

- C : konsumsi seluruh Rumah Tangga (agregat)
- a : konsumsi ketika pendapatan nol (otonom)
- b : slope garis atau kemiringan
- Y : pendapatan nasional

Terdapat dua pengertian mengenai konsep kecenderungan mengkonsumsi. *Pertama*, kecenderungan mengkonsumsi marginal (*Marginal Propensity to Consume*). *Kedua*, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*Average Propensity to Consume*).

1. Kecondongan Mengkonsumsi Marginal/MPC (*Marginal Propensity to Consume*)

Perbandingan di antara penambahan konsumsi (C) yang dilakukan dengan penambahan pendapatan disposable (Yd) yang diperoleh. Nilai MPC dapat dihitung dengan menggunakan: $MPC = \frac{DC}{DYd}$.

2. Kecondongan Mengkonsumsi Rata-rata/APC (*Average Propensity to Consume*)

Perbandingan di antara jumlah pengeluaran konsumsi (C) dengan jumlah pendapatan disposable. Nilai APC dihitung dengan menggunakan: $APC = \frac{C}{Yd}$.

Contoh perhitungan MPC dan APC:

Tabel 5.1 Kecenderungan Mengkonsumsi Marginal dan Rata-Rata

Pendapatan Disposable	Pengeluaran Konsumsi	Kecenderungan Mengkonsumsi Marginal	Kecenderungan Mengkonsumsi Rata-rata
CONTOH 1: KONDISI MPC DALAM KEADAAN TETAP			
Rp 700	Rp 600	100/300= 0,33	600/700=0,85
Rp 800	Rp 700		700/800=0,87
Rp 1.000	Rp 900		900/1000 = 0,9
CONTOH 2: KONDISI MPC SEMAKIN KECIL			
Rp 500	Rp 650	150/300 = 0,5	650/500= 1,3
Rp 570	Rp 710	140/300=0,46	710/570= 1,24
Rp 680	Rp 810	130/300= 0,43	810/680= 1,19
CONTOH 3: KONDISI MPC SEMAKIN BESAR			
Rp 370	Rp 500	130/300 = 0,43	500/370= 1,35
Rp 510	Rp 650	140/300= 0,46	650/510= 1,27
Rp 700	Rp 850	150/300=0,5	850/700= 1,21

B. Fungsi Tabunga

Pendapatan yang tidak digunakan disebut tabungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan, yaitu tingkat pendapatan.

Fungsi Tabungan:

$$Y = C + S$$

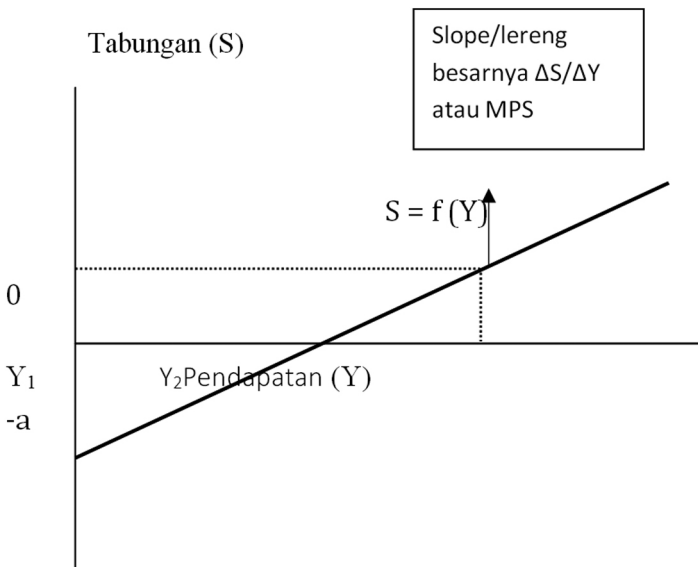
$$S = Y - C$$

$$S = Y - (a + bY)$$

$$S = -a + (1-b)Y$$

Kurva tabungan:

1. Kurva tabungan mempunyai slope positif
2. Titik -a merupakan konsumsi otonom dan bernilai negatif
3. Pada titik Y_1 terlihat $S = 0$



Gambar 5.3 Fungsi Tabungan

Misalkan diketahui:

$$C = 200 + 0,65 Y$$

Maka S dapat dicari dengan menggunakan formula:

$$Y = C + S$$

$$S = Y - C$$

$$S = Y - (200 + 0,65 Y)$$

$$S = Y - 200 - 0,65 Y$$

$$S = -200 + (1 - 0.65 Y)$$

$$S = -200 + 0,35 Y$$

Terdapat dua pengertian mengenai konsep kecenderungan marginal. *Pertama*, kecenderungan menabung marginal (*Marginal Propensity to Save*). *Kedua*, kecenderungan menabung rata-rata (*Average Propensity to Save*).

1. Kecenderungan Menabung Marginal/MPS (*Marginal Propensity to Save*)

Perbandingan antara penambahan jumlah tabungan (S) dengan penambahan jumlah pendapatan dispendabel (Yd). Nilai MPS dihitung menggunakan : $MPS = \Delta S / \Delta Y_d$

2. Kecenderungan Menabung Rata-rata/APS (*Average Propensity to Save*)

Perbandingan antara penambahan jumlah tabungan (S) dengan jumlah pendapatan dispendabel (Yd), Nilai APS dapat di hitung menggunakan: $APS = S / Y_d$

Contoh Menghitung MPS dan APS

Tabel 5.2 Kecenderungan Menabung Marginal dan Rata-Rata

Pendapatan Disposibel	Pengeluaran Konsumsi	Tabungan	Kecenderungan Menabung Marginal	Kecenderungan Menabung Rata-rata
KONDISI MPS DALAM KEADAAN TETAP				
Rp 300	Rp 500	Rp-200	100/300= 0,33	-200/300=-0,66
Rp 450	Rp 600	Rp-150		-150/450=-0,33
Rp 700	Rp 700	Rp 0		0/700=0
Rp 950	Rp 850	Rp 100		100/950= 0,10
KONDISI MPS MAKIN BESAR				
Rp 300	Rp 450	Rp-150	60/300= 0,2	-150/300= -0,5
Rp 410	Rp 480	Rp-70	65/300 = 0,21	-70/410= -0,17
Rp 590	Rp 620	Rp-30	70/300= 0,23	-30/590= -0,05
Rp 850	Rp 700	Rp 150	80/300= 0,26	150/850= 0,17

C. Hubungan Diantara MPS dan MPC

MPS dan MPC memiliki formula sebagai berikut.

$$MPC + MPS = 1$$

$$APC + APS = 1$$

$$Y_d = C + S$$

Tabel 5.3 MPC dan MPS

CONTOH 1: KONDISI MPC DAN MPS TETAP						
Yd	C	S	MPC	MPS	APC	APS
200	150	50			0.75	0.25
400	300	100	0.75	0.25	0.75	0.25
600	450	150	0.75	0.25	0.75	0.25
800	600	200	0.75	0.25	0.75	0.25
CONTOH 2: KONDISI MPC DAN MPS BERUBAH						
200	150	50			0.75	0.25
400	250	150	0.5	0.5	0.625	0.375
600	400	200	0.75	0.25	0.6667	0.3333
800	575	225	0.875	0.125	0.7188	0.2813

D. Menghitung Pendapatan Nasional Melalui Pendekatan Dua Sektor

Berikut cara menghitung pendapatan dengan pendekatan dua sektor:

$$Y = C + I \text{ dimana } C = a + bY$$

$$Y = (a + bY) + I$$

$$Y - a + bY + I$$

$$Y - bY = a + I$$

$$(1 - b) Y = a + I$$

$$Y = a + I / 1 - b$$

Contoh Soal:

Diketahui:

$$C = 10 + 0,70Y$$

$$I = 5 \text{ (dalam milyar)}$$

Pertanyaan :

Berapa pendapatan nasional sebuah negara?

Jawaban:

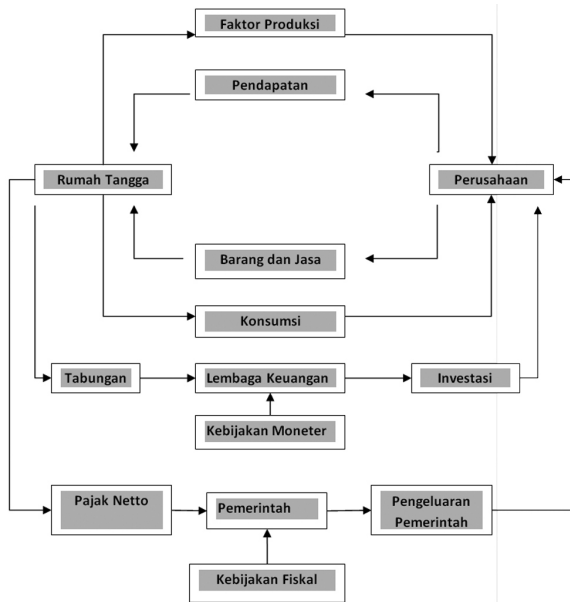
$$\begin{aligned} Y &= \frac{a + I}{1 - b} \\ &= \frac{10 + 5}{1 - 0,70} \\ &= \frac{15}{0,30} \\ &= 50 \text{ miliar rupiah} \end{aligned}$$

E. Menghitung Pendekatan Nasional Melalui Pendekatan Tiga Sektor

Perekonomian tiga sektor merupakan perekonomian dua sektor dengan ada tambahan peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Terdapat perubahan penentuan proses keseimbangan pendapatan nasional, sebagai berikut.

1. Pajak yang dipungut pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat karena adanya pengurangan atas konsumsi rumah tangga.
2. Pemerintah dapat menaikkan pajak sehingga menyebabkan kenaikan perbelanjaan agregat.

Selain untuk pengeluaran konsumsi dan menabung, rumah tangga juga harus membayar pajak. Keseimbangan perekonomian terjadi, apabila nilai investasi ditambah pengeluaran pemerintah jumlahnya sama dengan tabungan ditambah dengan pajak.



Gambar 5.4 Diagram Aliran Melingkar Perekonomian Tiga Sektor

Perekonomian tiga sektor disebut perekonomian tertutup karena belum terjadi proses ekspor dan impor.

F. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya kehidupan ekonomi masyarakat melalui anggaran belanja negara atau APBN.

1. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memperoleh dan membelanjakan untuk terlaksananya pembangunan nasional. Atau dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara.

Contoh kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah adalah apabila terjadi inflasi, pemerintah akan melakukan pengelolaan keuangan dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan stabilitas harga, penggunaan tenaga kerja penuh dan laju pertumbuhan

serta perkembangan ekonomi yang pantas. Proses yang dilakukan pemerintah dengan cara memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga akan mempengaruhi pendapatan nasional (Y) dan kesempatan kerja (N).

Terdapat tiga jenis kebijakan fiskal:

a. Kebijakan Fiskal Ekspansioner

Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara meningkatkan belanja dan/atau menurunkan pajak sehingga dapat meningkatkan permintaan agregat perekonomian.

b. Kebijakan Fiskal Kontraksioner

Kebijakan yang bertujuan mengontrol inflasi dengan cara mengurangi belanja pemerintah dan/atau meningkatkan pajak sehingga dapat menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian.

c. Kebijakan Fiskal Sisi-Penawaran

Kebijakan fiskal dapat secara langsung mempengaruhi bukan saja permintaan agregat, namun juga penawaran agregat. Sebagai contoh, pemotongan tarif pajak akan memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi atau investasi barang modal, karena mereka memperoleh pendapatan setelah pajak yang lebih besar yang kemudian dapat dibelanjakan. Selain itu kebijakan perbaikan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, jembatan, pasar dan sebagainya maka juga akan berdampak meningkatkan penawaran agregat.

2. Jenis-jenis Pajak

a. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya. Pajak ini dipungut oleh orang dalam suatu negara tertentu. Contoh: pajak tontonan.

- b. Pajak subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada diri orangnya (subjeknya), keadaan dari wajib pajak dapat memengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contoh : PPh.
 - c. Pajak langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: PPh (pajak penghasilan)
 - d. Pajak tidak langsung
Pajak tidak langsung adalah beban pajak yang pungutannya dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh : PPN (Pajak pertambahan nilai).
3. Tarif Pajak
- Berdasarkan sifatnya, tarif pajak digolongkan menjadi empat kelompok seperti berikut.
- a. *Pajak regresif*
Tarif pajak dengan menggunakan persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak.
 - b. *Pajak proporsional:*
Tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak.
 - c. *Pajak progresif*
Tarif pajak dengan menggunakan persentase yang semakin menaik atau meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak.
 - d. *Pajak konstan*
Tarif pajak dengan menggunakan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak atau besarnya pajak yang dibayarkan jumlahnya tetap.

G. Dampak Pajak terhadap Konsumsi dan Tabungan

Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable (Y_d). Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T . Maka: $\Delta Y_d = -T$

Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan RT. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable, maka : $\Delta Y_d = -T = \Delta C + \Delta S$. Disamping tergantung pada perubahan pendapatan disposable pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan:

$$\Delta C = MPC \times \Delta Y_d \text{ atau } \Delta C = MPC \times (-T)$$

$$\Delta S = MPS \times \Delta Y_d \text{ atau } \Delta S = MPS \times (-T)$$

Sama dengan:

$$T = \Delta Y_d = (MPC \times T) + (MPS \times T)$$

Contoh:

$$C = 100 + 0,75 Y$$

$$I = 50$$

Pemerintah mengenakan pajak tetap sebesar 10, sehingga kenaikan pajak akan mempengaruhi konsumsi masyarakat

$$C = 100 + 0,75 Y_d$$

$$S = -100 + 0,25 Y_d$$

$$\text{dimana } Y_d = Y - T_x + T_r$$

$$\text{dimana } Y_d = Y - T_x + T_r$$

Sehingga

$$C = 100 + 0,75 (Y - 10)$$

Sehingga

$$S = -100 + 0,25 (Y - 10)$$

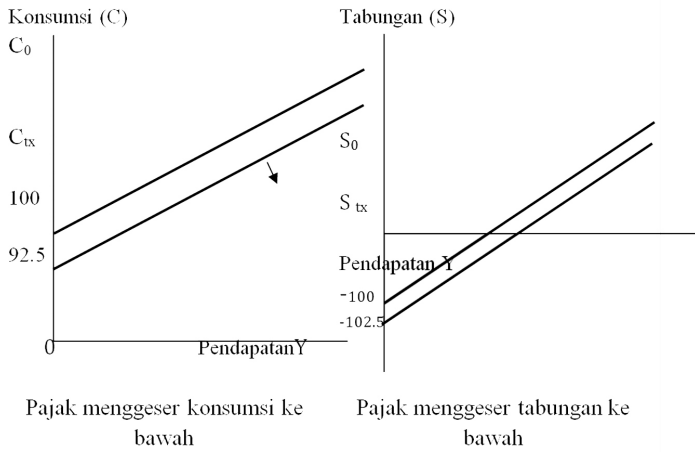
$$C = 100 + 0,75 Y - 7,5$$

$$S = -100 + 0,25 Y - 2,5$$

$$C = 92,5 + 0,75 Y$$

$$S = -102,5 + 0,25 Y$$

*



Gambar 5.5 Pengaruh Pajak Terhadap Konsumsi dan Tabungan

H. Pengeluaran Pemerintah

Pajak yang sudah terkumpul dipakai untuk kegiatan - kegiatan pemerintah untuk pembangunan negara. Berikut beberapa penentu pengeluaran pemerintah:

1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima: pemerintah harus membuat proyeksi berapa kira-kira jumlah pajak yang akan didapatkan. Semakin banyak jumlah pajak yang dikumpulkan, maka semakin banyak belanja pemerintah yang akan dilakukan.
2. Tujuan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai: kegiatan untuk pembangunan ekonomi dan menyelesaikan permasalahan negara memerlukan dana yang banyak dan pengeluaran sering melebihi dari pajak.
3. Pertimbangan politik dan keamanan: kekacauan politik dan kerusuhan akan meningkatkan pengeluaran pemerintah sehingga menjadi penentu dalam menyusun anggaran belanja pemerintah.

I. Pengaruh Pajak Tetap (T_x) terhadap Pendapatan Nasional

Berikut pengaruh pajak tetap di dalam perhitungan pendapatan keseimbangan tiga sektor.

$$Y = C + I + G \text{ dimana } C = a + bY_d$$

$$Y = a + b(Y - T_x + T_r) + I + G$$

$$Y = a + bY - bT_x + bT_r + I + G$$

$$Y - bY = a - bT_x + bT_r + I + G$$

$$(1-b) Y = a - bT_x + bT_r + I + G$$

$$Y = a - bT_x + bT_r + I + G / 1-b$$

Contoh Soal:

Diketahui =

Hitungan dalam milyar

$$C = 200 + 0,55, Y_d, I = 30, G = 15, T_x = 9, T_r = 5$$

Pertanyaan = Berapa pendapatan keseimbangan tiga sektor?

Jawaban =

$$Y = \frac{a - bT_x + bT_r + I + G}{1 - b}$$
$$= \frac{200 - 0,55(9) + 0,55(5) + 30 + 15}{1 - 0,55}$$

$$= 327 \text{ miliar rupiah (dibulatkan)}$$

J. Pengaruh Pajak Proporsional (tY) terhadap Pendapatan Nasional

Berikut pengaruh pajak proporsional di dalam perhitungan pendapatan keseimbangan tiga sektor.

$$Y = C + I + G \text{ dimana } C = a + bY_d$$

$$Y = a + b(Y - tY + T_r) + I + G$$

$$Y = a + bY - btY + bT_r + I + G$$

$$Y - bY + btY = a + bT_r + I + G$$

$$(1 - b + bt) Y = a + bTr + I + G$$

$$Y = a + bTr + I + G / 1 - b + bt$$

Contoh Soal:

Diketahui =

Hitungan dalam milyar

$$C = 100 + 0,75Y_d, I = 20, G = 11,25, T_x = 0,2, Y, Tr = 5$$

Pertanyaan =

Berapa pendapatan keseimbangan tiga sektor?

Jawaban =

$$Y = \frac{a + bTr + I + G}{1 - b + bt}$$

$$= \frac{100 + 0,75(5) + 20 + 11,25}{1 - 0,75 + 0,15}$$

$$= 337,5 \text{ miliar rupiah}$$

K. Menghitung Pendapatan Nasional Melalui Pendekatan Empat Sektor

Berikut cara menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan empat sektor:

$$Y = C + I + G + (X - M) \text{ dimana } (C = a + bY_d \gg Y_d = Y - T_x + Tr)$$

$$Y = a + b(Y - T_x + Tr) + I + G + (X - M)$$

$$Y = a + bY - bT_x + bTr + I + G + (X - M)$$

$$Y - bY = a - bT_x + bTr + I + G + (X - M)$$

$$(1 - b) Y = a - bT_x + bTr + I + G + (X - M)$$

$$Y = a - bT_x + bTr + I + G + (X - M) / 1 - b$$

Contoh Soal:

Diketahui =

Hitungan dalam Milyar

$$C = 100 + 0,55Y_d, I = 20, G = 16, T_x = 12, Tr = 10, X = 8 \text{ dan } M = 6$$

Pertanyaan =

Berapa jumlah pendapatn nasional empat sektor?

Jawaban =

$$Y = \frac{a - bTx + bTr + I + G + (X - M)}{1 - b}$$
$$= \frac{100 - 0,55(12) + 0,55(10) + 20 + 16 + (8-6)}{1 - 0,55}$$
$$= 111 \text{ milyar rupiah (dibulatkan)}$$

L. Perhitungan Angka Pengganda (k)

Fungsi perhitungan *multiplier* dalam sebuah perekonomian biasanya digunakan sebagai perencanaan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang. Pemerintah bisa membuat skenario bahwa pada tahun yang akan datang angka pertumbuhan ekonomi naik menjadi 10 % misalkan, maka perhitungan *multiplier* inilah dapat digunakan dalam perencanaan peningkatan seberapa besar investasi, pajak, transfer yang ditargetkan untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 10% tersebut.

Adanya perubahan belanja agregat pada perekonomian tiga sektor disebabkan oleh investasi, pengeluaran pemerintah, anggaran belanja dan pajak. Dan keempat jenis ini akan ditentukan besarnya *multiplier*.

Dalam menghitung nilai *multiplier* menggunakan pemisalan-pemisalan sbagai berikut.

1. Fungsi konsumsi yaitu $C = a + bY_d$.
2. Menggunakan dua sistem pajak. Pertama, pajak tetap dan kedua pajak proporsional
3. Fungsi investasi awalyaitu I dan fungsi pengeluaran pemerintah yang awal adalah G.

$$Y_{\text{sek}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta I$$

Di mana K merupakan angka pengganda.

M. Menghitung Angka Pengganda melalui Pendekatan Dua Sektor

$$Y = \frac{a + I}{1 - b} \Rightarrow \text{Multiplier Investment (I): } K = \frac{1}{1 - b}$$

Contoh:

Diketahui:

Hitungan dalam milyar

$C = 20 + 0,75Y$, $I = 10$, maka pendapatan keseimbangan sebesar 120.

Pertanyaan =

Jika ada penambahan nilai investasi senilai 4, berapa jumlah (Y_d sek)?

Jawaban:

$$K = \frac{1}{1 - b} = \frac{1}{1 - 0,75} = 4$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta I$$

$$\Delta Y = 4 \cdot 4 = 16$$

$$Y_{\text{sekr}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$Y_{\text{sekr}} = 120 + 16 = 136 \text{ milyar rupiah}$$

N. Menghitung Angka Pengganda melalui Pendekatan Tiga Sektor

$$Y = \frac{a - bTx + bTr + I + G}{1 - b}$$

$$\Rightarrow \text{Multiplier Taxes (Tx): } K = \frac{-b}{1 - b}$$

$$\Rightarrow \text{Transfer of Payment (Tr): } K = \frac{b}{1 - b}$$

$$\Rightarrow \text{Investment (I): } K = \frac{1}{1 - b}$$

$$\Rightarrow \text{Government Expenditure: } K = \frac{1}{1 - b}$$

Contoh soal =

Diketahui =

Hitungan Milyar

$$C = 20 + 0,75Y_d, I = 10, G = 8, T_x = 6, T_r = 5, X =, M = 3$$

Pertanyaan =

- Berapa jumlah pendapatan sekarang (Y_{sek}), jika ada penambahan pajak senilai 4.
- Berapa jumlah pendapatan sekarang (Y_{sek}), jika ada penambahan pembayaran transfer senilai 4.
- Berapa jumlah pendapatan sekarang (Y_{sek}), jika ada penambahan investasi senilai 4.
- Berapa jumlah pendapatan sekarang (Y_{sek}), jika ada penambahan pengeluaran pemerintah senilai 4.

Jawaban:

- Adanya penambahan nilai pajak

$$K = \frac{-b}{1-b} = \frac{-0,75}{1-0,75} = -3$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta T_x$$

$$\Delta Y = (-3) \cdot 4 = -12$$

$$Y_{\text{sekarang}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$Y_{\text{sekarang}} = 153 + (-12) = 141 \text{ milyar rupiah}$$

- Ada penambahan nilai pembayaran transfer

$$K = \frac{b}{1-b} = \frac{0,75}{1-0,75} = 3$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta T_r$$

$$\Delta Y = 3 \cdot 4 = 12$$

$$Y_{\text{sekarang}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$Y_{\text{sekarang}} = 149 + 12 = 161 \text{ milyar rupiah}$$

- Ada penambahan nilai investasi

$$K = \frac{1}{1-b} = \frac{1}{1-0,75} = 4$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta I$$

$$\Delta Y = 4 \cdot 4 = 16$$

$$Y_{\text{sekarang}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$Y_{\text{sekarang}} = 149 + 16 = 165 \text{ milyar rupiah}$$

- d. Ada penambahan nilai pengeluaran pemerintah

$$K = \frac{1}{1-b} = \frac{1}{1-0,75} = 4$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta G$$

$$\Delta Y = 4 \cdot 4 = 16$$

$$Y_{\text{sekarang}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$Y_{\text{sekarang}} = 149 + 16 = 165 \text{ milyar rupiah}$$

O. Menghitung Angka Pengganda dan Pendekatan Empat Sektor

$$Y = \frac{a - bTx + bTr + I + G}{1 - b}$$

$$\Rightarrow \text{Multiplier Taxes (Tx)}: K = \frac{-b}{1-b}$$

$$\Rightarrow \text{Transfer of Payment (Tr)}: K = \frac{b}{1-b}$$

$$\Rightarrow \text{Investment (I)}: K = \frac{1}{1-b}$$

$$\Rightarrow \text{Government Expenditive}: K = \frac{1}{1-b}$$

$$\Rightarrow \text{import (x)}: K = \frac{1}{1-b}$$

$$\Rightarrow \text{Export}: K = \frac{1}{1-b}$$

Contoh Soal =

Diketahui =

Hitungan Milyar Rupiah

$$C = 20 + 0,75Y_d, I = 10, G = 8, Tx = 6, X = 4, M = 3$$

Pertanyaan:

1. Berapa jumlah (Y_{sek}), jika ada penambahan (T_x) senilai 4.
2. Berapa jumlah (Y_{sek}), jika ada penambahan (T_r) senilai 4.
3. Berapa jumlah (Y_{sek}), jika ada penambahan (I) senilai 4.
4. Berapa jumlah (Y_{sek}), jika ada penambahan (G) senilai 4.
5. Berapa jumlah (Y_{sek}), jika ada penambahan (X) senilai 4.
6. Berapa jumlah (Y_{sek}), jika ada penambahan (I) senilai 4.

Jawaban:

1. Jika ada penambahan nilai pajak

$$K = \frac{-b}{1-b} = \frac{-0,75}{1-0,75} = -3$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta T_x$$

$$\Delta Y = (-3) \cdot 4 = -12$$

$$Y_{\text{sekarang}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$Y_{\text{sekarang}} = 153 + (-12) = 141 \text{ milyar rupiah}$$

2. Jika ada penambahan nilai pembayaran transfer

$$K = \frac{b}{1-b} = \frac{0,75}{1-0,75} = 3$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta T_r$$

$$\Delta Y = 3 \cdot 4 = 12$$

$$Y_{\text{sekarang}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$Y_{\text{sekarang}} = 153 + 12 = 165 \text{ milyar rupiah}$$

3. Jika ada penambahan nilai investasi

$$K = \frac{1}{1-b} = \frac{1}{1-0,75} = 4$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta I$$

$$\Delta Y = 4 \cdot 4 = 16$$

$$Y_{\text{sekarang}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$Y_{\text{sekarang}} = 153 + 16 = 169 \text{ milyar rupiah}$$

4. Jika ada penambahan nilai pengeluaran pemerintah

$$K = \frac{1}{1-b} = \frac{1}{1-0,75} = 4$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta G$$

$$\Delta Y = 4 \cdot 4 = 16$$

$$Y_{\text{sekarang}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$Y_{\text{sekarang}} = 153 + 16 = 169 \text{ milyar rupiah}$$

5. Jika ada penambahan nilai ekspor

$$K = \frac{1}{1-b} = \frac{1}{1-0,75} = 4$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta X$$

$$\Delta Y = 4 \cdot 4 = 16$$

$$Y_{\text{sekarang}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$Y_{\text{sekarang}} = 153 + 16 = 169 \text{ milyar rupiah}$$

6. Jika ada penambahan nilai impor

$$K = \frac{-1}{1-b} = \frac{-1}{1-0,75} = -4$$

$$\Delta Y = K \cdot \Delta M$$

$$\Delta Y = (-4) \cdot 4 = -16$$

$$Y_{\text{sekarang}} = Y_{\text{sebelum}} + \text{Tambahan } Y (\Delta Y)$$

$$Y_{\text{sekarang}} = 153 + (-16) = 137 \text{ milyar rupiah}$$

Latihan Soal

1. Diketahui data makroekonomi negara ABC sebagai berikut :

$$C = 200 + 0,75 Y_d \quad I = 100$$

$$G = 75 \quad T_x = 0,2 Y$$

$$T_r = 10$$

Pertanyaan:

- Berapakah besar Pendapatan Nasional keseimbangan?
- Berapakah besar Saving keseimbangan?

- c. Berapakah besar Pajak keseimbangan?
 - d. Bagaimana kondisi APBN negara tersebut? jelaskan!
2. Diketahui data perekonomian dalam perekonomian terbuka sbb :
- a. Konsumsi Otonom : 150
 - b. MPS : 0.15

Dimana konsumsi merupakan fungsi dari Y_d

- a. Investasi : $I = 50$
- b. Pengeluaran Pemerintah : $G = 350$
- c. Pajak : $T_x = 20\%$
- d. Subsidi : $Tr = 60$
- e. Ekspor : $X = 175$
- f. Impor : $M = 125$

Pertanyaan:

- a. Berapakah pendapatan keseimbangan?
 - b. Berapakah konsumsi C keseimbangan?
 - c. Berapakah saving S keseimbangan?
 - d. Berapakah pajak T_x keseimbangan?
3. Dalam suatu perekonomian terdapat $C = 20 + 0,75 Y$, jika Investasi (I) pada tahun 2014 besarnya per tahun = 40 miliar dan investasi (I) pada tahun 2015 berubah menjadi 80 miliar per tahun. Dari data tersebut carilah besarnya pendapatan nasional keseimbangan pada tahun 2015
4. Diketahui dalam perekonomian terbuka terdapat fungsi:
- a. Konsumsi $C = 10 + 0,8 Y_d$
 - b. Impor $M = 2$ triliun
 - c. Investasi $I = 20$ triliun
 - d. Pem. $G = 10$ triliun
 - e. Pajak $T_x = 7$ triliun
 - f. Tranfer $Tr = 2$ triliun
 - g. Ekspor $X = 6$ triliun

Dari data tersebut:

- 1) Tentukan Y (pendapatan)
 - 2) Tentukan C (konsumsi)
 - 3) Tentukan S (tabungan)
 - 4) Carilah Y keseimbangan yang baru jika investasi naik sebesar 5 triliun dan belanja pemerintah naik 10 triliun
5. Diketahui suatu perekonomian terdapat data sbb:
- a. Konsumsi $C = 20 + 0,75 Y_d$
 - b. Impor $M = 5 + 0.05 Y$
 - c. Periode sebelum tahun 2014:
 - 1) Besarnya investasi $I = 40 T$ per tahun
 - 2) Pengeluaran pem $G = 60 T$
 - 3) Tranfer $Tr = 40 T$
 - 4) Pajak $T_x = 20 T$
 - d. Periode setelah tahun 2014:
 - 1) Investasi $I = 50 T$
 - 2) Pengeluaran Pem $G = 60 T$
 - 3) Tranfer $Tr = 60 T$
 - 4) Pajak $T_x = 40 T$

Dari data tersebut dengan *multiplier*, hitunglah: Pendapatan nasional keseimbangan, Konsumsi nasional keseimbangan, Saving nasional keseimbangan pada periode setelah tahun 2014



BAB 6

INFLASI

Pendapatan nasional atau permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu masalah yang ada dalam perekonomian. Perubahan harga-harga barang dan jasa dengan jangka waktu yang relatif lama atau yang biasa disebut dengan inflasi juga merupakan satu dari masalah perekonomian. Pada perekonomian selain pendapatan nasional, tingkat pengangguran, ketidakseimbangan neraca pembayaran, inflasi juga merupakan indikator yang penting. Tidak sedikit negara yang awalnya memiliki perekonomian maju dengan presentasi pertumbuhan yang baik kemudian mengalami kemunduran dengan tiba-tiba yang diakibatkan oleh inflasi yang meningkat tajam. Peningkatan inflasi banyak menyebabkan penerunan daya beli konsumen terhadap sektor produksi. Tingginya inflasi disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri banyak disebabkan karena menipisnya persediaan barang jasa khususnya barang pokok, permintaan barang dan jasa yang tinggi. Faktor eksternal seperti adanya krisis di negara lain, perubahan nilai tukar uang dalam negeri pada dollar yang terus meningkat. Tingkat inflasi merupakan salah satu sumber jatuhnya perekonomian negara. Oleh sebab itu inflasi juga dikatakan sebagai penyakit ekonomi yang harus dijaga keseimbangannya.

A. Pengertian Inflasi

1. Inflasi terjadi apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, baik berupa harga output, harga faktor produksi dan semua barang-barang modal. (Samuelson dan Nordhaus, 1993: 293).
2. Inflasi(Mankiw,2006)

Berdasarkan para pendapat ahli tersebut terkait inflasi dapat disimpulkan secara mayoritas adanya proses harga barang-barang naik dan terus-menerus dalam waktu yang relatif panjang karena disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa atau pada suatu periode tertentu nilai uang menurun. Hal tersebut bukan berarti menandakan jika adanya kenaikan dari berbagai macam barang dengan jumlah presentase yang sama. Ada kemungkinan kenaikannya tidak bersamaan. Kenaikan harga barang-barang disini adalah barang-barang dan jasa-jasa yang sering dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat di negara itu. Jadi satu negara dan negara yang lainnya dalam perhitungan inflasi mempunyai macam barang yang bisa berbeda juga. Namun hal terpenting adalah peningkatan harga umum barang secara terus-menerus selama suatu periode tertentu.

Saat ini, perhitungan tingkat inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga. Berikut adalah beberapa indeks yang digunakan untuk mengukur inflasi, yaitu:

1. Indeks biaya (*consumer price index*)
2. Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*)
3. GNP (*Gross National Pruduct*) deflator

Indeks biaya hidup atau secara nasional biasa disebut indeks harga konsumen (IHK),

Pengukuran biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa dalam kebutuhan sehari-hari. Barang dan jasa yang dimaksud dapat beraneka ragam.

Indeks 9 bahan pokok dengan 62 ragam merupakan ciri dari Indonesia. Setiap barang dan jasa yang dimaksud tersebut juga memiliki arti yang berbeda bagi seseorang, sehingga angka indeks diberi angka penimbang tertentu untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan.

Angka penimbang

Angka penimbang dapat diperoleh dari besaran presentase pengeluaran tertentu pada pengeluaran secara keseluruhan. Besarnya presentase dapat berubah dari tahun ke tahun sehingga perlu adanya revisi jika mengalami perubahan. Misalnya jika terdapat penyaluran listrik baru di suatu desa, presentase pengeluaran untuk minyak tanah pada pengeluaran jumlah keseluruhan akan berkurang. Perubahan angka penimbang tersebut menyebabkan perubahan pada indeks harga. Laju inflasi diketahui dengan cara mengukur presentasi kenaikan atau penurunan indeks harga dari tahun ke tahun (atau bulan ke bulan). Contoh kasus indeks biaya hidup tahun 2006 sebesar 201,5 kemudian tahun 2007 meningkat menjadi 214,2, maka:

$$\text{Laju Inflasi} = \frac{214,2 - 201,5}{201,5} \times 100\% \text{ 6,3\%}$$

Indeks perdagangan besar memfokuskan pada sekumpulan jumlah barang pada tingkat perdagangan besar. Hal tersebut mengartikan jika harga bahan baku, barang setengah jadi, barang mentah termasuk dalam golongan hitungan indeks harga. Terkadang indeks harga tersebut berbanding lurus dengan indeks biaya hidup.

Lain halnya dengan GNP (*Gross National Product*) Deflator yang tidak seperti indeks harga dan indeks biaya hidup. GNP Deflator terdiri dari jumlah barang dan jasa yang telah dihitung dalam perhitungan GNP, jumlah yang diperoleh GNP Deflator meliputi jumlah barang dan jasa yang dihitung dalam perhitungan GNP, jumlah yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan dua indeks yang telah dijelaskan sebelumnya. GNP deflator dihitung dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku/ADHB) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan (ADHK)):

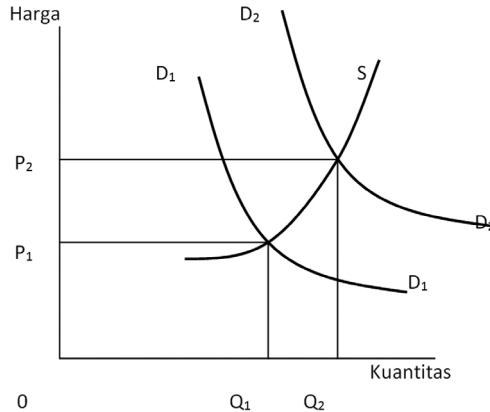
$$\text{GNP Deflator} = \frac{\text{GNP Nominal}}{\text{GNP Riil}} \times 100\%$$

B. Teori Inflasi

Inflasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu inflasi tarikan permintaan dan dorongan biaya, artinya inflasi bisa disebabkan oleh sisi permintaan dan juga sisi penawaran, antara lain:

1. Inflasi Tarikan Permintaan (*demand pull inflation*)

Inflasi yang disebabkan adanya permintaan barang dan jasa oleh masyarakat yang terus meningkat dengan tajam sehingga mengakibatkan tingkat harga secara umum naik (misalnya peningkatan pembelanjaan oleh perusahaan/rumah tangga).

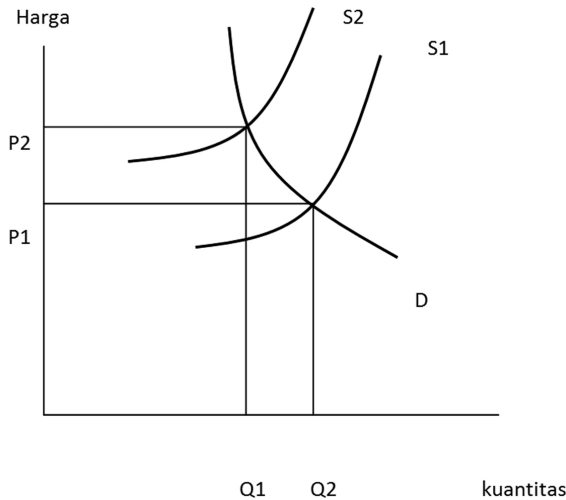


Gambar 15.1. Terjadinya *Demand Pull Inflation*

Sehubungan dengan kurva di atas, asumsikan perekonomian menunjukkan adanya perpotongan antara kurva permintaan D_1 dan kurva penawaran (S) dengan tingkat harga P_1 dan tingkat output riil. Kemudian terjadi pergeseran kurva, kurva permintaan bergeser ke kanan D_1 ke D_2 , pergerakan diakibatkan adanya peningkatan permintaan sehingga menyebabkan pengeluaran yang berlebih terhadap permintaan barang atau jasa. Pergeseran kurva permintaan meningkatkan output riil (Q_1 ke Q_2) dan tingkat harga (P_1 ke P_2) yang diakibatkan pergeseran kurva permintaan dari bawah ke atas tingkat harga yang menyebabkan inflasi adalah arti dari *demand pull inflation*. Contoh terjadinya kenaikan permintaan barang bisa dikarenakan adanya kenaikan gaji/upah pegawai secara nasional, kondisi menjelang lebaran dan lainnya.

2. Inflasi Dorongan Penawaran (*cost push inflation*)

Inflasi yang disebabkan adanya peningkatan biaya produksi dengan ditunjukkan ciri-ciri peningkatan harga barang dan turunya produksi (harga barang mentah dari luar negeri meningkat, harga BBM mengalami peningkatan)



Gambar 15.2 Proses *Cost Push Inflation*

Berdasarkan kurva pada gambar 15.2 yang dipaparkan jika kurva penawaran bergerak ke kiri (S_1 ke S_2) dan harga khusus mengalami peningkatan akan terjadi inflasi dorongan biaya. Naik turunnya harga dan output juga disebut “*stagnansi inflasi*”.

C. Penggolongan Inflasi

1. Penggolongan berdasarkan atas besarnya laju inflasi

Penggolongan inflasi terbagi menjadi tiga kategori, antara lain:

a. Inflasi Meranyap (*Creeping Inflation*)

inflasi yang disimbolkan dengan rendahnya laju inflasi yaitu kurang dari 10% per tahun. Dalam jangka waktu yang sama peningkatan harga berjalan lambat dengan persentase yang kecil.

b. Inflasi Menengah (*Gallopning Inflation*)

Terjadi jika adanya peningkatan harga yang cukup besar dan berjalan dalam waktu yang relatif pendek yaitu antara 10% hingga 50% per tahun. Dampak yang diberikan yaitu jumlah uang yang minimum yang dipegang oleh masyarakat hanya dapat digunakan sebagai transaksi sehari-hari.

c. Inflasi Tinggi (*Hyperinflation*)

Inflasi yang memberikan dampak negatif akibat peningkatan harga yang mencapai 5 atau 6 kali dari jumlah biasanya, konsumen rumah tangga tidak memiliki keinginan untuk menginvestasikan atau menyimpan uang. Hal tersebut terjadi jika pemerintah sedang mengalami defisit anggaran belanja dan ditunjukkan dengan laju inflasi lebih dari 50% per tahun.

2. Penggolongan berdasarkan asal inflasi

Berdasarkan asal munculnya inflasi, maka inflasi digolongkan menjadi dua jenis, antara lain:

a. *Domestic inflation*

Domestic Inflation merupakan inflasi yang timbul dari dalam negeri yang disebabkan, antara lain:

- 1) Meningkatnya permintaan masyarakat pada barang-barang di pasar, disisi lain peningkatan penawaran atas barang itu tidak dapat diimbangi dengan laju permintaanya.
- 2) Percetakan uang baru turut membiayai defisit anggaran belanja
- 3) Harga jual meningkat akibat adanya peningkatan biaya produksi barang dalam negeri

b. *Foreign inflation*

Foreign Inflation adalah inflasi yang berasal dari mancanegara, yang mempunyai dampak, antara lain:

- 1) Indeks Biaya Hidup (IBH) secara langsung mengalami peningkatan karena barang-barang tersebut tergolong barang impor.
- 2) Indeks harga secara tidak langsung mengalami peningkatan. Peningkatan diakibatkan karena biaya ongkos produksi yang menggunakan bahan mentah atau teknologi, mesin mengalami peningkatan meningkat.
- 3) Harga didalam negeri secara tidak langsung mengalami peningkatan karena barang-barang impor yang masuk ke dalam negara.

D. Dampak Negatif Inflasi

Efek yang timbul dari inflasi diantaranya adalah:

1. Efek Terhadap Pendapatan (*Equity Effect*)

Sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Masyarakat yang dirugikan karena pendapatan riil masyarakat menurun, kemudian masyarakat yang diuntungkan adalah orang yang memanfaatkan situasi tingkat inflasi yang tinggi dengan spekulasi yang merugikan masyarakat banyak, dan dalam ekonomi syariah dilarang.

2. Efek Efisiensi

Pola alokasi faktor produksi khususnya proses produksi dapat mengalami perubahan seiring adanya pengaruh dari inflasi. Permintaan akan suatu barang spesial cenderung akan berdampak pada kenaikan yang lebih besar dari barang-barang lain dimana kenaikan barang produksi dapat merubah distribusi faktor produksi yang tersedia.

3. Efek Terhadap Output

Biasanya kenaikan inflasi akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga output turun atau produksi turun. Namun dalam jangka pendek biasanya kenaikan inflasi disebabkan adanya kenaikan produksi. Keadaan ini biasanya ditandai dengan kenaikan harga barang terlebih dahulu kemudian kenaikan upah. Dengan begitu keuntungan pengusaha dapat naik dan keuntungannya dapat menaikkan jumlah produksi. Dalam jangka panjang dipastikan inflasi akan menurunkan daya beli dan menurunkan output.

E. Cara Mengatasi Inflasi

Banyak negara cara mengatasi inflasi bisa berbeda karena penyebab inflasi masing-masing negara bisa berbeda. Secara umum cara menyelesaikan permasalahan inflasi dapat diselesaikan melalui beberapa kebijakan antara lain:

1. Kebijakan Moneter

Sasaran kebijakan moneter terfokus melalui jumlah uang yang beredar. Bank setral dapat menggunakan kebijakan moneter dengan perubahan cadangan minimum bank, dengan mengubah tingkat

suku bunga diskonto, operasi pasar terbuka, dan himbauan moral kepada bank umum. Contoh pengendalian inflasi dapat dilakukan oleh bank sentral dengan meningkatkan cadangan minimum agar jumlah uang lebih kecil sehingga laju inflasi dapat tertekan. Bank Indonesia sekarang cara mengendalikan inflasi dilakukan dengan cara pengendalian yang disebut *Inflation Targetting Framework (ITF)*, yaitu penentuan suku bunga BI-rate yang ditetapkan setiap awal bulan.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan yang terdiri dari pengeluaran pemerintah dan perpajakan secara langsung yang dapat berpengaruh terhadap harga. Kebijakan fiska.

Menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi harga. Pengurangan permintaan total dan inflasi yang dapat ditekan merubapkn salah satu dari kebijakan fiskal.

3. Kebijakan dan yang berkaitan dengan output

Jumlah output yang terus meningkat mampu tercapai dengan adanya kebijakan yang dapat menurunkan bea masuk sehingga harga impor cenderung naik dan harga turun. Sehingga kenaikan output dapat memperlambat laju inflasi. Dalam jangka pendek pemerintah juga bisa melakukan dengan Operasi Pasar Terbuka (OPT) melalui lembaga pemerintah Bulog untuk memasok barang-barang kebutuhan pokok di pasar-pasar dengan harga relatif lebih murah.

4. Kebijakan penentuan harga dan *indexing*

Kebijakan terjadi karena adanyapenetapan harga tertinggi (*ceilling price*) untuk harga barang-barang tertentu dan indeks harga tertentu untuk upah atau gaji.

F. Gambaran Inflasi di Indonesia

Inflasi adalah harga-harga yang secara umum meningkat dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar disebabkan oleh berbagai faktor seperti konsumsi rumah tangga yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi juga disebut menurunnya nilai mata uang secara terus menerus.

Tabel 5.1 Perkembangan Inflasi Indonesia

Bulan	2010		2011		2012		2013		2014**)	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Januari	118,01	0,84	126,29	0,89	130,9	0,76	136,88	1,03	110,992)	1,07
Februari	118,36	0,3	126,46	0,13	130,96	0,05	137,91	0,75	111,28	0,26
Maret	118,19	-0,14	126,05	-0,32	131,05	0,07	138,78	0,63	111,37	0,08
April	118,37	0,15	125,66	-0,31	131,32	0,21	138,64	-0,1	111,35	-0,02
Mei	118,71	0,29	125,81	0,12	131,41	0,07	138,6	-0,03	111,53	0,16
Juni	119,86	0,97	126,5	0,55	132,23	0,62	140,03	1,03	112,01	0,43
Juli	121,74	1,57	127,35	0,67	133,16	0,7	144,63	3,29	113,05	0,93
Agustus	122,67	0,76	128,54	0,93	134,43	0,95	146,25	1,12	113,58	0,47
September	123,21	0,44	128,89	0,27	134,45	0,01	145,74	-0,35	113,89	0,27
Oktober	123,29	0,06	128,74	-0,12	134,67	0,16	145,87	0,09	114,42	0,47
November	124,03	0,6	129,18	0,34	134,76	0,07	146,04	0,12	116,14	1,5
Desember	125,17	0,92	129,91	0,57	135,49	0,54	146,84	0,55	119	2,46
Tingkat Inflasi		6,96		3,79		4,3		8,38		8,36

Sumber : BPS

Tabel 14.1 menunjukkan jika rata-rata dari inflasi tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Sehingga hal tersebut menandakan jika pendapatan riil perkapita negara Indonesia terjadi peningkatan dibandingkan pada saat tahun-tahun sebelumnya. Tetapi disisi lain, peningkatan harga yang disebabkan perubahan kurs rupiah harus diwaspai oleh pemerintah. Karena dapat berdampak pada barang-barang yang bukan berjenis makanan (perlu diketahui agar non makanan relatif tidak signifikan terhadap inflasi, bobot hitungan inflasi terhadap barang yang bukan berjenis makanan harus relatif kecil. Dengan begitu, kenaikannya tidak signifikan terhadap inflasi). Agar perekonomian kita stabil, pemerintah perlu menjaga keseimbangan neraca pembayaran.

Latihan Soal

1. Jelaskan apa yang anda ketahui dengan inflasi itu dan mengapa inflasi termasuk dalam dikategorikan sebagai penyakit dalam perekonomian.
2. Jelaskan bagaimana cara menghitung angka inflasi yang anda ketahui. Berikan contoh perhitungan inflasi tersebut dengan data tentatif.
3. Apa yang anda ketahui dengan *demand pull inflation* dan *cost push inflation*. Apa yang membedakan dari kedua penyebab inflasi tersebut.
4. Jelaskan dan beri contoh inflasi yang dipengaruhi atau berasal dari faktor di luar negeri.
5. Suatu negara akan mengalami penurunan perekonomian jika terjadi inflasi, jelaskan apa yang anda ketahui dampak-dampak yang ditimbulkan adanya inflasi tersebut.



BAB 7

PENGANGGURAN

Pengangguran adalah masalah lain dalam perekonomian selain indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi rendah, tingkat inflasi tinggi, ketidakseimbangan neraca pembayaran dan lainnya. Hampir tidak ada negara di dunia ini mempunyai tingkat pengangguran nol persen, hampir semua negara mempunyai pengangguran yang menjadi masalah sudah berabad-abad yang lalu. Negara yang mempunyai pengangguran rendah bahkan dibawah 4 persen bisa dikatakan negara tersebut dalam keseimbangan penuh (*full employment*). Bahkan negara majupun tidak terlepas dari pengangguran. Hanya di negara maju mereka mendapat subsidi yang cukup untuk biaya kehidupannya. Tingkat pengangguran yang tinggi harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Pemerintah baik pusat atau daerah harus berupaya menyediakan lapangan kerja, sehingga pengangguran dapat diturunkan, selain itu peningkatan sumber daya manusia adalah salah satu cara dalam mengatasi pengangguran.

Model pengangguran di negara miskin berkembang dan di negara maju biasanya berbeda. Di negara berkembang model pengangguran biasanya bersifat konjungtur, artinya lebih banyak pengangguran karena perubahan ekonomi dinegaranya, ketika kondisi ekonomi memburuk maka pengangguran tinggi. Lain halnya di negara maju

angka pengangguran biasanya model pengangguran yang alamiah atau friksional, mereka menganggur karena menginginkan penghidupan yang lebih layak lagi. Pada dua dasawarsa terakhir model pengangguran di negara berkembang dan maju nampaknya tidak begitu berbeda, model pengangguran konjungtur karena perubahan ekonomi relatif mendominasi keadaan di negara-negara tersebut.

A. Pengertian

Pengangguran merupakan seseorang yang tidak melakukan kegiatan atau tidak melakukan pekerjaan apapun, sedang mencari kerja, selama seminggu hanya bekerja kurang dari dua hari, atau yang dalam tahap berusaha memperoleh pekerjaan yang pantas. (BPS)

Peenggauran berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 1985 mengartikannya sebagai seseorang yang mencari pekerjaan atau berusaha mencari pekerjaan yang tidak memiliki batasan waktu satu minggu saja, namun dapat dilakukan dalam periode sebelumnya selama dalam kurun waktu satu minggu sebelum pencacahan masih berada pada status masih menunggu respon dari lamaran. Menurut Sukirno (2004) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada perekonomian baik secara aktif mencari pekerjaan atau belum memperoleh pekerjaan.

Perhitungan tingkat pengangguran diperoleh dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang tidak bekerja atau menganggur dengan jumlah Angkatan Kerja (AK). Sedangkan angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja dikurangi dengan penduduk non angkatan kerja (siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga). Kemudian ada istilah yang disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya jumlah penduduk angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak semua jumlah penduduk dilibatkan dalam perhitungan tingkat pengangguran dikarenakan dalam jumlah penduduk tersebut terdapat penduduk bukan usia kerja, seperti anak-anak usia muda di bawah 15 tahun dan penduduk usia tua di atas 64 tahun.

Tiga faktor dasar yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, antara lain ketidaksamaan hasil yang diperoleh dengan jenjang pendidikan akhir dengan lapangan pekerjaan, ketidakseimbangan

permintaan dan penawaran tenaga kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperoleh masih rendah. Umumnya lapangan kerja yang dibutuhkan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan atau keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Pada umumnya perusahaan hanya membutuhkan tenaga kerja yang sudah siap pakai, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang sesuai kriteria, tetapi pada kasus nyata, tidak banyak SDM yang siap pakai tersebut. Ketersediaan tenaga kerja justru tidak sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan.

B. Jenis-jenis pengangguran

Berdasarkan akibatpenyebabnya, pengangguran dikelompokkan menjadi tiga macamantara lain pengangguran friksional, struktural dan konjungtur.

1. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran disebabkan adanya gelombang konjungtur, yaitu adanya kemunduran dalam kegiatan ekonomi. Jenis Pengangguran konjungtur tersebut disebabkan adanya perubahan pada tingkat kegiatan ekonomi, jika tingkat kegiatan ekonomi meningkat maka tingkat pengangguran rendah dan sebaliknya jika tingkat kegiatan ekonomi menurun maka pengangguran tinggi. Secara mikroketika perusahaan dalam kondisi maju maka akan membutuhkan karyawan atau tenaga kerja untuk pengembangan usahanya. Kebalikannya jika usaha suatu perusahaan tersebut mengalami kerugian terus-menerus akan menyebabkan pengurangan pegawai dengan cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pengangguran ini baik dinegara maju dan berkembang relatif dominan dibanding dengan jenis pengangguran lainnya, karena langsung berhubungan dengan kondisi ekonomi di negara tersebut.

2. Pengangguran Struktural

Penyebab terjadinya pengangguran struktural karena terdapat struktur ekonomi yang mengalami ekonomi. Perubahannya menyebabkan perlunya ada perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan perusahaan butuhkan. Namun tenaga kerja tidak dapat menyesuaikan adanya perubahan keterampilan baru tersebut. Misalnya adanya pergeseran ekonomi sektor

pertanian menjadi sektor industri. Pada sektor pertanian akan terjadi pengurangan tenaga kerja, namun pada sektor industri akan terjadi peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja atau karyawan yang sudah bekerja lama pada sektor pertanian, mayoritas tidak dapat meninggalkan pekerjaannya dengan mudah berpaling ke sektor industri. Pernyataan tersebut diakibatkan pada sektor industri memerlukan karyawan atau tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan ahli dalam bidangnya.

Pada dasarnya ada tiga hal yang dapat mempengaruhi pengangguran struktural, antara lain: mobilitas tenaga kerja, kecepatan perubahan struktural serta aspek regional dari adanya struktural yang berubah tersebut. Pada kasus karyawan yang memiliki mobilitas tinggi, pendidikan tinggi dapat menyebabkan perubahan antar sektor berlangsung lebih cepat dan hal tersebut meminimalkan pengangguran struktural. Kecepatan struktural yang berubah pun turut berpengaruh. Dapat dimisalkan jika adanya perubahan yang sangat cepat, karyawan akan melewati masa sulit untuk beradaptasi. Peran aspek regional sangatlah penting, misalnya peranan sektor pertanian di Jawa Tengah mengalami penurunan. Hal itu akan berdampak pada pengangguran struktural meskipun hanya sementara. Karena perubahan sektor industri yang terus meningkat telah terjadi di Provinsi Jawa Barat. Sehingga menyebabkan biaya dan tambahan waktu untuk mereka yang awalnya bekerja di sektor pertanian Provinsi Jawa Tengah berpindah sebagai karyawan di sektor industri Provinsi Jawa Barat.

3. Pengangguran Friksional

Pengangguran friksional diakibatkan adanya kesulitan penyesuaian dalam mencari pekerjaan dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Sulitnya penyesuaian yang dimaksud tidak hanya berbentuk waktu yang dibutuhkan namun juga prosedur pelamaran dan seleksi, karena faktor jarak atau sedikitnya mendapatkan informasi. Jenis pengangguran ini juga dapat terjadi akibat kurangnya fasilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru berada di lokasi yang tidak sesuai dengan si pencari pekerjaan. Contohnya seseorang pencari kerja terkumpul di Semarang sedangkan lowongan pekerjaannya tersedia di luar Semarang. Selain itu juga dapat juga terjadi akibat tidak mengetahui letak dimana lowongan

perkerjaannya dan perusahaan yang menawarkan lowongan pekerjaan juga tidak mengetahui keberadaan calon karyawan yang sesuai dengan ahli dalam bidangnya. Pengangguran ini bisa terjadi karena sementara menganggur karena menginginkan pekerjaan yang lebih layak.

Di bagian lain masih banyak jenis pengangguran yang bisa diungkap, yang dilatarbelakangi oleh keadaan yang berkaitan dengan kelebihan tenaga kerja, kondisi alam, lama jam kerja, jumlah pendapatan, latarbelakang pendidikan dan sebagainya. Berikut adalah model pengangguran yang banyak terdapat di negara-negara berkembang:

a. Pengangguran Musiman (*seasonal unemployment*)

Pengangguran yang disebabkan akibat adanya perubahan musim. Pengangguran tersebut banyak terjadi di sektor pertanian, pada saat musim hujan para petani kerap bekerja di sawah namun sebaliknya pada saat paceklik atau kemarau panas matahari sangat terik para petani banyak yang tidak bekerja atau menganggur dan menunggu musim berikutnya. Pada saat mereka menunggu musim kemarau terlewati, para petani tersebut digolongkan sebagai penganggur musiman.

b. Pengangguran Setengah Menganggur (*under unemployment*)

Pengangguran yang terjadi dikarenakan mereka bekerja tidak lebih dari 35 jam per minggu dan bukan dalam kesehariannya. Pengangguran ini banyak terjadi di negara miskin berkembang, dikarenakan sebagian besar penduduknya berpendidikan rendah, sehingga lapangan kerja yang ada tidak sesuai kemampuan tenaga kerja yang ada. Dalam keadaan seperti ini mereka kadang bekerja kadang tidak bekerja (*srabutan*), sehingga jam kerja per minggu rendah.

Pengangguran setengah menganggur terbagi kedalam dua kelompok:

- a. Setengah Penganggur Terpaksa, kelompok ini untuk para pekerja yang bekerjanya dibawah jam kerja secara normal dan masih mencari pekerjaan atau menerima pekerjaan lainnya.
- b. Setengah Penganggur Sukarela, kelompok ini bekerja dibawah jam kerja normal namun tidak sedang mencari pekerjaan atau

tidak bersedia menerima tawaran pekerjaan lain meskipun upah yang ditawarkan lebih tinggi.

Presentasi jumlah pendidik setengah pengangguran memiliki manfaat yang dapat menjadi bahan model pemerintah dalam meningkatkan kegunaan tingkat utilisasi, dan produktivitas pekerja.

Indikator pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang bekerja dengan jam kerja di bawah model (kurang dari 34 jam perminggu dengan Indikator ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Perhitungan Setengah Pengangguran:

$$= \frac{\sum \text{pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

Misalkan data tentatif, berdasarkan data tahun 2014, persentase penduduk usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang bekerja dibawah 35 jam seminggu berjumlah 30.213.692 orang sedangkan jumlah angkatan kerja 2014 berjumlah 103.973.387 orang. Sehingga tingkat setengah pengangguran pada tahun 2014 sebesar 29%.

Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja mereka seperti penambahan balai latihan kerja.

c. Pengangguran Tersembunyi (*Disguised unemployment*)

Pengangguran tersembunyi ini terjadi karena perekonomian dimana terjadi kelebihan supply tenaga kerja, sehingga terdapat pengangguran tidak kentara karena kelebihan tenaga kerja tersebut. Tenaga kerja ini jika dialihkan dari sektor yang satu ke sektor yang lainnya maka tidak mengurangi produksi, jadi standar upah jauh

dibawah standar normal. Mereka kelihatannya bekerja tetapi upah yang mereka peroleh tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan dasar keluarganya.

d. **Pengangguran Terbuka (*open unemployment*)**

Selain pengangguran menurut sebab terjadinya diatas, pengangguran terbuka adalah pengangguran yang benar-benar belum tertampung di sektor ekonomi. Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali, maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan namun belum memulai untuk bekerja. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan pemerintah bagi kebijakan pembukaan lapangan kerja baru. Disisi lain, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun di suatu negara.

Indikator yang sudah diutarakan di atas dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang sedang mencari pekerjaan, dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran

$$= \frac{\sum \text{orang yang mencari kerja}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

Misalkan data tentatif, hasil dari data sensus penduduk tahun 2015 misalkan diketahui jumlah yang mencari pekerjaan sebanyak 5.231.652 orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 98.433.125 orang. Sehingga tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2015 adalah:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{5.231.652}{98.433.125} \times 100\% = 5\%$$

Hasil besaran angka pengangguran terbuka memiliki dampak sosial yang banyak karena seseorang yang tidak bekerja akan tidak memiliki upah atau pemasukan. Semakin tinggi angka pengangguran

terbuka maka semakin besar potensi bahaya sosial yang ditimbulkan, seperti kejahatan, namun jika angka pengangguran terbuka rendah maka kondisi sosial dalam masyarakat akan lebih stabil. Alasan tersebut banyak dijadikan sebagai tolak ukur oleh pemerintah untuk keberhasilan pembangunan.

C. Pendekatan Angkatan Kerja dan Penggunaan Tenaga Kerja

Orang bekerja dan menganggur perbedaannya tidak mengidentifikasi apakah berkaitan dengan tingkat pendapatan dan produktivitas seseorang. Pada dasarnya orang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Ada orang yang bekerja 40 jam seminggu atau lebih tetapi pendapatannya rendah, sedang yang lain bekerja kurang dari 20 jam mempunyai penghasilan yang jauh lebih besar. Pendekatan angkatan kerja yang membedakan orang bekerja dan menganggur menyebabkan masalah sehingga dikembangkan pendekatan lain yaitu pendekatan penggunaan tenaga kerja (*labor utilization approach*). Pendekatan penggunaan tenaga kerja memfokuskan pada seseorang cukupkah tenaga kerja tersebut dapat bermanfaat dalam kerja dengan melihat produktivitas dan jam kerja serta pemasukan yang diperoleh. Berdasarkan pendekatan angkatan kerja dibedakan menjadi tiga golongan, antara lain (1) orang yang menjadi pengangguran yaitu sama sekali tidak sedang berkerja dan berusaha mencari pekerjaan, (2) setengah pengangguran itu mereka yang dalam pekerjaannya kurang dimanfaatkan dalam segi jam kerja, produktivitas, dan upah, (3) orang yang sedang bekerja dengan waktu penuh. Orang yang menjadi setengah pengangguran dibedakan berdasarkan jumlah jam kerja, produktivitas kerja dan upah.

D. Kriteria Produktivitas Kerja Rendah

Penyebab terjadinya orang berproduktivitas rendah karena empat kemungkinan, yaitu pertama disebabkan minimnya ketrampilan. Terkadang orang kurang terampil dalam pekerjaan karena rendahnya pendidikan akhir yang dimiliki. Pengalaman yang dimiliki seseorang menandakan jika pendidikan yang ia terima pada saat dibangku

sekolah terkadang umum dan tidak dapat secara langsung diterapkan dalam dunia pekerjaan. Dampaknya adalah orang yang memiliki pendidikan akhir lebih tinggi masih tetap saja memiliki produktivitas kerja yang rendah. Seseorang yang baru memulai pekerjaannya cenderung memiliki pengalaman produktivitas yang masih rendah. Rendahnya produktivitas kerja dapat ditingkatkan keahliannya dengan berlatih diluar atau di tempat kerja. *Kedua*, kurangnya sarana dan prasarana penunjang fasilitas seperti kurangnya alat kerja yang dibutuhkan, kurangnya organisasi dan manajemen dari pimpinan. *Ketiga*, rendahnya tingkat kesehatan dan gizi. *Keempat*, rendahnya produktivitas kerja diakibatkan rendahnya tingkat upah dan sistem pengupahan yang tidak memberikan pengupahan intensif bagi karyawan yang berprestasi baik. Rendahnya upah yang diperoleh tidak mampu mendorong gairah untuk bekerja. Upah rendah mengakibatkan tingkat kesehatan dan konsumsi terbatas dan produktivitas kerja menurun juga.

E. Trend Pengangguran di Indonesia

Pertama, dilihat dari karakteristik penganggur itu sendiri. Berdasarkan Sakernas (Survei Tenaga Kerja Nasional), sekitar dua pertiga penganggur yang ada, berusia muda yaitu penduduk berusia 15-24 tahun. Proporsi penganggur muda ini terus meningkat beberapa tahun terakhir ini dari 15,5 persen pada tahun 1997 menjadi 24,1 persen pada tahun 2001, tahun 2003 menjadi 27,9 persen, dan 29,6 persen pada tahun 2004. Bahkan penganggur kelompok usia 15-19 tahun meningkat dari 28,7 persen menjadi 34,6 persen pada tahun 2005. Fenomena ini apabila tidak segera diatasi dapat menjadi sumber frustrasi kelompok usia produktif dan bisa menjadi pemicu keresahan atau gejolak sosial.

Tabel 16.1 Penduduk berumur 15 dan Angkatan Kerja Tahun 201-2013

Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu	2011		2012		2013
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb
Penduduk berusia lebih dari 15 Tahun	170.7	171.76	172.86	173.93	175.1
Angkatan Kerja	119.4	117.37	120.41	118.05	121.19
a. Bekerja	111.3	109.67	112.8	110.81	114.02
b. Pengangguran Terbuka	8.12	7.7	7.61	7.24	7.17
Bukan Angkatan Kerja	51.26	54.39	52.45	55.87	53.91
Pekerja Tak Penuh	34.19	34.59	35.55	34.29	35.71
a. Paruh Waktu	18.46	21.06	20.68	21.52	22.15
b. Setengah Penganggur	15.73	13.52	14.87	12.77	13.56
Prosentase Pengangguran					
1. Pengangguran Terbuka	6.80	6.56	6.32	6.13	5.92
2. Pengangguran terbuka dan setengah pengangguran	19.97	18.07	18.67	16.95	17.10
3. Pengangguran Terbuka dan Paruh waktu	35.44	36.03	35.84	35.18	35.38

Sumber: BPS diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah angkatan kerja 121,19 juta orang, dari angkatan kerja tersebut jumlah pengangguran terbuka sebesar 5,9 persen, pengangguran terbuka dan setengah pengangguran 17,1 persen, dan pengangguran terbuka dan paruh waktu sebesar 35,38 persen. Dari data tersebut ternyata penduduk yang bekerja dibawah jam kerja dengan gaji dibawah standar sebesar 42,87 juta, hal ini menunjukkan pemerintah kurang serius dalam menangani pengangguran dikarenakan dari tahun ketahun jumlah pengangguran terbuka dan paruh waktu semakin meningkat, tahun 2011 februari 35,4 juta menjadi 35,38 juta pada februari tahun 2013.

Kedua, ada kecenderungan meningkatnya angka pengangguran terdidik dalam dua tahun terakhir ini. *Artinya*, bahwa kesulitan untuk memperoleh pekerjaan bukan hanya dialami oleh angkatan kerja yang tak terdidik, tetapi juga angkatan kerja terdidik. *Ketiga*, kecenderungan bergesernya lapangan kerja yang tersedia dari yang produktif ke kurang produktif dan semakin menyempitnya lapangan kerja di sektor formal. Hanya sekitar 30 persen angkatan kerja yang bekerja saat ini terserap di sektor formal, sisanya tertampung di sektor informal yang notabene dengan ketrampilan rendah (*low skilled*) dan gaji rendah (*low paid*).

Tabel 16.2 Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 tahun keatas Tahun 2011-2013

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	2011				2012				2013	
	Feb		Ags		Feb		Ags		Feb	
1	23.369.166	21	22.548.234	20.56	22.887.689	20.29	21.463.539	19.37	21.595.613	18.94
2	31.748.682	28.53	31.628.943	28.84	32.622.571	28.92	32.411.385	29.25	33.020.536	28.96
3	21.221.429	19.07	20.694.804	18.87	20.293.225	17.99	20.222.488	18.25	20.284.370	17.79
4	26.084.441	23.44	25.969.950	23.68	26.621.462	23.6	26.749.088	24.14	27.946.593	24.51
5	8.858.027	7.96	8.828.467	8.05	10.377.858	9.2	9.950.572	8.98	11.174.077	9.8
Jumlah	111.281.744	100	109.670.399	100	112.802.805	100	110.808.154	100	114.021.189	100
Keterangan										
Lulusan SD Kebawah		49.53		49.4		49.21		48.62		47.9
Lulusan SMP Kebawah		68.6		68.27		67.2		66.87		65.69
Lulusan SMA Kebawah		92.04		91.95		90.8		91.01		90.2

Sumber : BPS diolah

F. Solusi Penanganan dari Jenis Pengangguran

Pengangguran friksional tersebut tidak dapat lagi diabaikan meskipun secara teoritis jangka panjang waktu pengangguran dapat diminimalisir melalui penyedia informasi pasar kerja yang lebih lengkap. Sehingga penanganan harus berupa usaha untuk mengintensifkan dan memfokuskan pada informasi pasar kerja. Intensif yang dimaksudkan adalah informasi disebar luaskan dalam jumlah yang sepadan. Penyebaran informasi secara ekstensif artinya untuk menjangkau lokasi sesuai letak geografis sejauh mungkin, para pencari kerja cepat memperoleh informasi tersebut sehingga penawaran dan permintaan tenaga kerja cepat menemukan titik keseimbangannya.

Pada saat kondisi baru, pengangguran struktural memiliki ketrampilan yang kaku. Sehingga solusi dari masalah tersebut adalah harus mengarahkan untuk ikut serta program latihan dan mengulangi latihan tersebut. Program untuk menemukan apa saja yang menjadi kebutuhan, latihan sangat bermanfaat guna untuk memperoleh program latihan efektif. Terkait keberadaan latihan dapat meminta jasa dari Dewan Latihan Kerja Nasional di Depnaker Pusat maupun Dewan Latihan Kerja Daerah untuk mengadakan studi kebutuhan latihan ini. Pengangguran struktural juga ditampung dalam sektor informal. Pada kenyataannya sektor informal lebih efektif dalam menanggulangi masalah pengangguran, minimal menjadi jaring pengaman untuk masalah sosial yang dapat menimbulkan fenomena pengangguran struktural.

Pengangguran musiman terjadi akibat adanya masalah yang muncul saat *off-season*. Berbeda saat kondisi sedang *on-season*, para pencari kerja tidak perlu meninggalkan domisili untuk sementara maupun selamanya. Solusi yang dapat diterapkan antara lain yaitu menjadi migrasi musiman ke daerah lain, meskipun begitu hal ini membutuhkan biaya yang lebih mahal jika dilihat dari sisi biaya sosialnya. Solusi lain dengan melakukan kegiatan yang bersifat *off-farm* atau *non-farm* di daerah tertinggal atau pedesaan yang memiliki alur kegiatan musiman yang rutin. Sebagai kepala dari suatu desa atau penguasa lokal lingkungan tersebut dapat menentukan kegiatan *off-farm*. Aktifitas ini memberikan keuntungan dimana dapat mengikat para pencari kerja tersebut masih tetap berada dalam desa. Sehingga aktifitas atas keberhasilan mereka tersebut

berdampak positif, mereka mampu mengembangkan dan memajukan desanya.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi ke depan di arahkan pada sektor padat karya. Sehingga Pemerintah saat ini sangat gencar untuk meningkatkan kinerja para pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang produktif, bukan hanya UKM yang bersifat informal. Permasalahannya adalah bagaimana UKM dapat menjadi lahan subur? Program Pemerintah selama ini hanya mewajibkan BUMN menyisihkan satu hingga tiga persen labanya untuk memberdayakan UKM yang kurang produktif usahanya. BUMN memandang jika program yang dilakukan Pemerintah membuat mereka kurang fokus terhadap *core business*. Di sisi lain pembinaan untuk UKM menjadi terkapling sesuai dengan kepentingan BUMN masing-masing. Alangkah baiknya jika dana yang digunakan tersebut di *pool*, misalnya adanya badan yang dikhususkan untuk mengelola prioritas tertentu. Sehingga dana yang diperoleh dari 158 BUMN lebih terarah dan lebih terjamin penggunaannya. Porsi UKM yang diberdayakan juga jelas, tidak lagi berdasarkan kepentingan masing-masing BUMN namun berdasarkan kepentingan sektoral UKM dan kekuatan riilnya dalam membuka lapangan pekerjaan.

Penanggulangan pengangguran perlu dilakukan peningkatan kualitas dan skill sumber daya manusia, dengan mengupayakan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Selain pendidikan, kesehatan juga perlu ditekankan lagi untuk mendapatkan tingkat produktifitas SDM lebih unggul. Memberikan fasilitas kepada para migran yang berada di dalam negeri ataupun ke luar negeri. Pemerintah memperbaiki penciptaan lapangan kerja melalui lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan UKM. Membuat tim kecil untuk melakukan identifikasi dan pengetatan perundangan untuk diamandemen terkait program pasar kerja dan pelayanan terhadap pelanggan.

G. Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Pengangguran

Pemerintah kini tengah melakukan berbagai upaya untuk dapat menekan angka pengangguran. Upaya itu antara lain telah ditetapkannya Inpres No.3/2006 sebagai paket kebijakan untuk terciptanya iklim investasi yang kondusif, yang meliputi aspek perpajakan, kepabeanaan, infrastruktur, ketenagakerjaan dan daya saing UKM. Paket kebijakan

tersebut diharapkan akan lebih efektif dan dapat dirasakan manfaatnya, terutama dengan terpuruknya sektor riil, sehingga dapat menyerap pekerja yang lebih banyak. Pemerintah harus melakukan upaya agar pertumbuhan barang dan jasa terekspor dengan lebih baik dan investasi yang mampu menyerap sektor ketenagakerjaan tersedia lebih berkualitas. Kehadiran investor diharapkan mampu memberikan imbas positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan memecahkan problem pengangguran. Salah satu langkah pengentasan pengangguran oleh Disnakertrans adalah melalui program transmigrasi. Tahun 2007 DIY mendapat jatah transmigrasi dari pemerintah pusat sebanyak 540 KK. Jumlah peminat transmigrasi pada 2007, sudah ada 617 KK dengan target keberangkatan 225 KK. Meski peminat banyak, masih terkendala minimnya ketersediaan lahan di tujuan penempatan. Kebijakan lain berupa revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan perdesaan.

Selain itu solusi pengangguran dapat dilakukan dengan mengembangkan lembaga kerja yang profesional. Lembaga kerja atau *job center*, dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat mendampingi dan menyalurkan calon tenaga kerja. Lembaga kerja dapat dikembangkan, antara lain SDM (*brainware*), perangkat lunak dan keras (*software* dan *hardware*), serta manajemen dan keuangan. Lembaga dapat bekerja sama dengan jaminan sosial penganggur. Cara lainnya yaitu dengan memilih kualitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Untuk mendapatkan kualitas TKI yang baik. Pemerintah Daerah dapat memulai program tersebut dengan memanfaatkan lahan, gedung, perbankan, keuangan dan aset lainnya yang tersedia dilengkapi dengan lembaga pelatihan (*training center*) guna untuk meningkatkan skill para calon tenaga kerja. Pemerintah juga meningkatkan regulasi para calon tenaga kerja yang ingin bekerja di Luar Negeri seperti Filipina. Untuk mengatasi besarnya jumlah penganggur dan memenuhi permintaan tenaga kerja ahli, saat ini pihak Depnakertrans mengembangkan program `Indonesia Youth Employment Network` (I-YEN) sejak 2004. Dalam program I-YEN ini, pihaknya akan mendidik para pengangguran berusia muda dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Selain itu, dalam program tersebut, para pemuda diberikan latihan kerja ke beberapa unit usaha ataupun industri yang memiliki kerjasama dengan pihak Depnakertrans. Program I-YEN ini

diyakini dapat menciptakan tenaga kerja muda yang ahli dan siap pakai serta mampu bersaing di era globalisasi ini. Depnaker bukan pencipta lapangan kerja, tapi mempersiapkan orang bagaimana dapat masuk ke lapangan kerja dengan cara mempersiapkan tenaga kerja muda ahli yang siap pakai.

Tahun 2007 pemerintah sangat agresif menggulirkan program pengurangan pengangguran dan kemiskinan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program dengan anggaran Rp 51 triliun itu menjangkau sekitar 33 provinsi, 2.891 kecamatan, dan 33.527 desa/kelurahan atau 31,92 juta orang miskin di Indonesia. PNPM bertumpu pada proyek-proyek padat karya, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan desa mandiri energi, pembukaan lahan kelapa sawit, tebu, dan jarak sebagai sumber energi alternatif, diperkirakan mampu menciptakan lapangan kerja bagi 12,5 juta orang hingga 14,4 juta orang per tahun.

Program pengurangan pengangguran yang dilakukan pemerintah tidak bersifat instant, melainkan memiliki sasaran jangka panjang, dari hulu hingga hilir. Selain melaksanakan program nyata di lapangan, pemerintah juga merancang sistem pendidikan berorientasi kerja. Dalam kaitan ini, Depnakertrans dan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) telah menyetujui adanya perubahan sistem pendidikan nasional yang awalnya bersifat *output oriented* menjadi *job oriented*. Jika sebelumnya perbandingan sekolah umum dengan kejuruan sangat jauh (sekitar 70:30), kelak proporsinya diubah menjadi 60:40 atau 30:70. Sasarannya agar lulusan sekolah menengah bisa langsung bekerja atau siap membuka lapangan kerja. Besarnya komposisi lembaga pendidikan kejuruan akan menciptakan *link and match* dunia pendidikan dan lulusannya dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha. Komposisi seperti ini telah banyak diterapkan negara-negara lain di Asia maupun di Eropa, dan terbukti mampu menekan laju pengangguran.

Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi sektoral karena penciptaan lapangan kerja berkorelasi positif dengan laju pertumbuhan sektor. Sektor yang tumbuh lebih cepat, seperti sektor perdagangan atau industri, menciptakan lapangan kerja lebih besar. Agar tingkat pengangguran menurun membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta kemampuan ekonomi yang lebih luas dalam menciptakan lapangan kerja. Hal tersebut menuntut kebijakan

dengan fokus yang tajam, institusi yang kuat, kerja yang keras, serta kesadaran dan kesabaran yang memadai agar masalah pengangguran tertangani secara berkelanjutan. Angka pengangguran tidak ditentukan oleh lapangan kerja baru yang tercipta saja, tambahan angkatan kerja baru yang masuk ke pasar tenaga kerja yang besarnya cukup fluktuatif juga sangat diperlukan. Terlebih pada daerah yang memiliki angka pengangguran tinggi perlu didorong untuk menciptakan lapangan kerja, baik melalui kebijakan investasi daerah maupun APBD. Dari Sakernas Agustus 2006, sekitar 62,7 persen pengangguran terbuka berada di Jawa khususnya di Jawa Barat (23,4 persen atau hampir seperempat dari total penganggur terbuka). Pemecahan masalah pengangguran dan kemiskinan kemudian diimbangi oleh pemerataan pembangunan dengan mendorong pembangunan di luar Jawa lebih cepat. Yang tidak kalah penting adalah dukungan institusi yang kuat, mekanisme yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dimaksud benar-benar terjabarkan dengan baik, termasuk oleh daerah. Terakhir, yang juga menentukan adalah kesadaran yang tinggi bahwa masalah pengangguran merupakan tantangan besar yang harus ditangani bersama. Karena, kunci keberhasilan penanganan pengangguran dan kemiskinan ada pada pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat luas.

Latihan Soal

1. Jelaskan apa yang anda ketahui dengan pengangguran itu, mengapa terdapat pengangguran dalam perekonomian.
2. Jelaskan istilah berikut ini : tingkat pengangguran, angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja dan usia kerja.
3. Pengangguran bisa disebabkan karena konjungtur dan persoalan struktural. Jelaskan hal tersebut, mengapa bisa terjadi demikian.
4. Di negara berkembang persoalan pangangguran musiman, setengah menganggur, dan pengangguran tersembunyi sering terjadi. Jelaskan istilah pengangguran tersebut dan mengapa bisa terjadi demikian dan bandingkan dengan negara maju.
5. Jelaskan upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran tersebut, penjelasan secara rinci berdasarkan penyebab pengangguran yang ada.



BAB 8

NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL

Perekonomian modern sekarang ini sudah tidak ada lagi yang disebut perekonomian tertutup (*close economy*), semua negara di dunia ini melakukan transaksi ekonomi tidak hanya terbatas di dalam negara itu sendiri, namun melakukan transaksi ekonomi dengan negara lain atau disebut perekonomian terbuka (*open economy*). Perekonomian terbuka dikarenakan kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya yang ada disekitarnya terbatas, sehingga perlu melakukan perdagangan dengan negara lain. Disinilah terjadinya tukar menukar barang dan jasa, bahkan terjadi arus aliran modal dari satu negara ke negara lainnya. Suatu negara dalam mengatur dan mengelola transaksi ekonomi internasional inilah, maka diperlukan sebuah catatan resmi oleh pemerintah yang disebut neraca pembayaran (*balance of payment/BOP*)

A. Pengertian Neraca Pembayaran Internasional

Neraca pembayaran internasional didefinisikan sebagai suatu catatan resmi yang sistematis yang berisi hubungan ekonomi atau transaksi antar penduduk dari suatu Negara dengan Negara lainnya yang dinilai dalam mata uang pada kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Transaksi tersebut meliputi transaksi berjalan (*current account*), yaitu transaksi ekspor dan impor barang/jasa, pendapatan dari investasi, pendapatan atau kompensasi tenaga kerja dan tranfer pemerintah. Kedua, disebut transaksi modal (*capital account*), yaitu transaksi pada tranfer modal dan tranfer finansial berupa investasi langsung dan investasi portofolio.

Karena neraca pembayaran suatu negara mencatat transaksi ekonomi internasional baik barang/jasa dan modal yang dilakukan oleh suatu penduduk dengan penduduk negara yang lainnya. Maka penduduk tersebut dapat dikatakan sebagai berikut.

1. Orang perorangan/individu

Orang perorangan atau individu yang tidak mewakili pemerintah suatu negara (misalnya para turis), penduduk yang bersifat individu tersebut mereka mempunyai tempat tinggal di suatu negara dan mereka melakukan kegiatan atau kunjungan di negara lain.

2. Perusahaan atau Badan hukum

Suatu perusahaan yang berbadan hukum dari suatu negara melakukan transaksi ekonomi di negara lain. Transaksi tersebut bisa dengan perusahaan di negara lain atau individu yang menyebabkan adanya transaksi internasional. Cabang-cabang perusahaan di negara lain di luar negeri dianggap sebagai penduduk luar negeri.

3. Pemerintah

Badan-badan pemerintah dikatakan sebagai penduduk dari negara yang diwakili oleh penduduknya di negara lain yang menimbulkan transaksi ekonomi internasional. Misalnya, para diplomat kedutaan besar dianggap sebagai penduduk dari negara yang mereka wakili. Transaksi yang mereka lakukan di negara lain merupakan transaksi ekonomi internasional.

B. Tujuan Neraca Pembayaran Internasional

Penyusunan neraca pembayaran dilakukan oleh pemerintah suatu negara dengan maksud dan mempunyai beberapa tujuan, sebagai berikut.

1. Untuk membukukan seluruh transaksi ekonomi internasional yang terjadi antara penduduk dalam negeri dan penduduk luar negeri.

2. Untuk mengetahui struktur dan komposisi transaksi ekonomi internasional suatu negara, misalkan barang/jasa yang di ekspor atau di impor.
3. Untuk mengetahui mitra utama suatu negara dalam melakukan transaksi ekonomi dengan negara kita dalam hubungan ekonomi internasional.
4. Mengetahui posisi keuangan internasional suatu negara, misalkan berapa cadangan devisa negara tersebut.
5. Sebagai salah satu indikator yang akan dipertimbangkan oleh IMF atau negara donor untuk memberikan bantuan keuangan, terutama negara yang mengalami kesulitan *balance of payment*.
6. Sebagai salah satu indikator fundamental ekonomi satu negara selain tingkat inflasi, pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran dan sebagainya.
7. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, seperti melakukan ekspor dan impor, hubungan utang piutang, hubungan penanaman modal, dan hubungan lainnya yang menyangkut neraca pembayaran.
8. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan di bidang moneter dan fiskal.
9. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap perekonomian nasional seperti pendapatan nasional.
10. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan Internasional.

C. Struktur Neraca Pembayaran

Struktur neraca pembayaran (*balance of payment*) secara umum dapat dilihat seperti berikut ini.

1. Neraca transaksi berjalan (*current account*)
 - a. Ekspor dan impor barang (neraca perdagangan/*balance of trade*)
 - b. Ekspor dan impor jasa (*service account*)
 - 1) Pendapatan kompensasi tenaga kerja
 - 2) Pendapatan dari investasi

- 3) Jasa TKI/TKA, dll
 - c. Tranfer pemerintah (*unilateral account*)
2. Neraca modal (*capital account*)
 - a. Tranfer modal
 - b. Tranfer finansial (investasi langsung, investasi portofolio)
3. Perubahan cadangan devisa (a+b)
4. Kesalahan hitung dan transaksi illegal
5. Perubahan moneter (c+d)

Struktur dalam penyusunan Balance of payment (BOP) di atas harus mengacu pada aturan internasional seperti yang telah ditetapkan dalam Balance of Payment Texbook yang diterbitkan oleh IMF. Komponen-komponen yang termuat dalam Balance of Payment Texbook yang terdiri dari komponen sebagai berikut.

1. Neraca Transaksi Berjalan (*current account*)
 - a. Current account terdiri atas neraca perdagangan (*balance of trade*), neraca jasa (*service account*), dan neraca transaksi sepihak (*unilateral account*).
 - b. Neraca Perdagangan (*balance of trade*)

Dalam neraca ini dicatat seluruh transaksi ekspor dan impor barang dengan ketentuan bahwa ekspor sebagai transaksi kredit atau positif dan impor barang dicatat sebagai transaksi debit atau negatif.
 - c. Neraca Jasa (*service account*)

Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa yang meliputi komponen seperti; pembayaran bunga, biaya transportasi, biaya asuransi, remittance (jasa TKI/TKA, fee/royalty teknologi dan konsultasi), *tourisme*.
 - d. Unilateral Account (neraca transaksi sepihak)

Neraca transaksi sepihak merupakan transaksi sepihak yang umumnya terdiri atas bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari/ke luar negeri, tanpa kewajiban untuk membayar kembali, yang biasanya disebut juga transfer pemerintah. antara lain termasuk di dalamnya hadiah (*gift*),

bantuan (*aids*), dan transfer unilateral (*unilateral transfer*) lainnya.

2. Neraca Modal (*capital account*)

- a. Capital account ini terdiri atas ekspor dan impor modal, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
- b. Transaksi modal bisa terjadi arus masuk modal atau penanaman modal asing langsung, dan juga sebaliknya penanaman modal keluar negeri. Dalam capital account termasuk didalamnya adalah hutang piutang jangka panjang dan hutang piutang jangka pendek.
- c. Berbeda dengan pencatatan pada current account maka dalam capital account berlaku ketentuan bahwa, transaksi impor modal dicatat sebagai transaksi kredit atau positif, transaksi ekspor modal dicatat sebagai transaksi debit atau negatif.

3. Perubahan Cadangan Devisa (*reserve account*)

- a. Reserve account adalah neraca yang menunjukkan perubahan cadangan atau saldo devisa yang diperoleh dari tahun yang bersangkutan dari hasil penjumlahan saldo current account dan saldo capital account.
- b. Perubahan cadangan devisa atau saldo devisa dari tahun yang bersangkutan ini pada dasarnya sudah menunjukkan posisi keuangan internasional suatu negara berdasarkan transaksi yang tercatat pada current account dan capital account.
- c. Jika saldo reserve account menunjukkan angka positif, maka dapat dikatakan bahwa posisi BOP dalam keadaan surplus dan sebaliknya jika menunjukkan angka negatif dikatakan BOP dalam keadaan defisit.

Data neraca pembayaran Indonesia terutama neraca jasa hingga sekarang selalu tercatat dalam posisi negatif atau debit. Keadaan ini dikarenakan transaksi impor lebih besar daripada transaksi ekspor, khususnya untuk pembayaran bunga, biaya transportasi, biaya asuransi, dan remittance. Satu-satunya jasa yang positif adalah jasa dari turis karena banyak turis asing yang datang ke Indonesia daripada turis Indonesia yang ke luar negeri. Posisi negatif atau defisit dari neraca jasa ini juga mencerminkan masih relatif rendahnya kualitas SDM Indonesia sebagai penghasil jasa, walaupun secara kuantitatif lebih banyak TKI

Indonesia yang bekerja di luar negeri tetapi dengan penghasilan yang rendah dibandingkan dengan TKA yang bekerja di Indonesia dengan bayaran yang lebih tinggi.

Neraca pembayaran dikatakan seimbang jika perubahan cadangan devisa sama dengan nol artinya uang masuk dan uang yang keluar sama, namun dalam transaksi internasional biasanya terjadi defisit atau surplus. Defisit jika perubahan cadangan devisa sama dengan negatif, artinya uang yang masuk lebih sedikit dibanding uang keluar. Surplus jika perubahan cadangan devisa sama dengan positif, artinya uang yang masuk lebih banyak dibanding uang keluar. Uang masuk dan uang keluar disini adalah valuta asing yang biasanya dalam bentuk uang kuat (*hard currencies*) seperti US dollars, Yen Jepang, Euro Eropa, Pound Inggris dan sebagainya, yang sering digunakan sebagai alat transaksi internasional. Dengan demikian jika suatu negara menguasai banyak uang seperti dollar atau disebut cadangan devisa tersebut maka negara itu dianggap mempunyai daya beli internasional yang kuat, dan cenderung mata uang domestiknya menguat (*apresiasi*). Sebaliknya jika negara cadangan devisa rendah berarti daya beli negara itu rendah, sehingga biasanya mata uang negaranya cenderung menurun (*depresiasi*)

D. Pengertian “*Balance*” dalam Neraca Pembayaran Internasional

Konsep “*balance*” atau keseimbangan dalam neraca pembayaran dapat dikatakan sebagai keseimbangan dalam arti, sebagai berikut.

1. *Basic Balance*

Yang dapat merubah komposisi pada basic balance adalah ketika perekonomian domestik mengalami tiga macam perubahan harga, kurs valuta asing dan pertumbuhan ekonomi, perubahan tersebut dalam arti yang positif dan negatif. Basic balance sendiri merupakan transaksi berjalan (*current account balance*) ditambah transaksi modal untuk jangka panjang. Ketika perekonomian domestik mengalami guncangan maka dapat menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap basic balance dan tercermin pada perubahan aliran modal jangka pendek sehingga terdapat selisih perhitungan (*errors and omissions*) pada neraca pembayaran. Dengan demikian, basic balance memberikan informasi kepada kita, bahwa

telah terjadi perubahan neraca pembayaran sebagai akibat dari perubahan dalam perekonomian, sehingga aliran modal jangka pendek mengalami perubahan. Menurut pandangan ini, dalam jangka panjang basic balance akan menjadi nol.

2. Basic Transaksi Autonomous

Basic transaksi autonomous ini terdiri dari basic balance ditambah dengan aliran modal jangka pendek. Dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih memperhatikan balance transaksi autonomous daripada basic balance karena dalam kenyataannya aliran modal jangka pendek jarang sekali terjadi sama dengan nol. Artinya dalam balance transaksi autonomous, terlihat defisit atau surplus suatu neraca pembayaran yang tercermin dalam transaksi accomodating yaitu aliran modal pemerintah jangka pendek.

3. Liquidity Balance

Liquidity balance memasukkan unsur individu yang terlibat dalam perekonomian, yang dimaksud adalah bahwa individu / corporate yang mempunyai kekayaan (assets) dalam jangka pendek seperti surat berharga jangka pendek atau deposito dijadikan perhitungan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan terhadap neraca pembayaran. Dapat dikatakan bahwa basic balance, selisih yang diperhitungkan dan liquidity balance merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan neraca pembayaran.

E. Ketidakseimbangan Neraca Pembayaran

Ketidakseimbangan neraca pembayaran disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan neraca pembayaran antara lain disebabkan oleh perubahan tingkat harga dalam negeri, pergeseran permintaan luar negeri, ketidakstabilan ekonomi dalam negeri, keadaan struktur produksi, perubahan posisi hutang piutang dengan luar negeri dan juga bencana alam.

1. Perubahan Harga Barang dan Jasa dalam Negeri

Perubahan harga dapat terjadi karena biaya produksi yang menurun, sehingga produksi dalam negeri meningkat daya saingnya, dan nilai ekspor meningkat. Ekspor yang meningkat mengakibatkan cadangan internasional meningkat. Hal ini terjadi jika diasumsikan bahwa barang-barang impor tidak meningkat, atau jika mengalami

kenaikan, namun dengan prosentase yang lebih rendah dari pada naiknya barang ekspor, sehingga jumlah impor dapat dibayar dengan sebagian hasil dari ekspor. Jadi, impor tidak mengorbankan ekspor yang relative besar. Dan sebaliknya jika terjadi kenaikan biaya produksi dalam negeri, akan mengakibatkan daya saing produksi dalam negeri menurun sehingga ekspor menurun dan misalkan impor diasumsikan tetap maka cadangan internasional akan berkurang.

2. Pergeseran Permintaan luar Negeri

Permintaan barang/jasa dari luar negeri bisa mengalami kenaikan dan juga bisa mengalami penurunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran permintaan luar negeri terhadap barang-barang dan jasa-jasa dalam negeri, bisa disebabkan oleh faktor persaingan luar negeri, perubahan pendapatan diluar negeri, perubahan harga di luar negeri dan faktor penawaran negara itu sendiri. Pergeseran permintaan luar negeri bisa meningkat atau bahkan turun. Jika permintaan ekspor yang cenderung turun maka akan menurunkan cadangan devisa negara, dan sebaliknya jika permintaan ekspor meningkat maka akan meningkatkan cadangan devisa negara dan akhirnya akan menimbulkan ketidakseimbangan neraca pembayaran.

3. Ketidakstabilan Ekonomi

Untuk mengukur masalah ketidakstabilan ekonomi biasanya menggunakan tingkat harga domestik dan kurs. Ketika terjadi guncangan pada harga dan kurs secara terus menerus, maka dapat menggikis kepercayaan investor yang akan menanam modalnya ke dalam negeri. Berbagai penyebab dari guncangan yang terjadi pada harga dan kurs bisa disebabkan karena faktor eksternal seperti ketidakpastian kondisi perekonomian global, kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil, dan melemahnya tingkat ekspor.

4. Bencana Alam

Bencana alam termasuk faktor non ekonomi yang juga turut andil dalam mempengaruhi kondisi neraca perdagangan manakala relatif ekstrim, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kekeringan hebat, serangan hama, penyakit tanaman, iklim dan lain-lain. Hal ini dapat mempengaruhi neraca pembayaran dalam hal produksi

barang terutama di sektor primer barang-barang hasil pertanian dan barang terusan dari sektor pertanian.

5. Keadaan Struktur Produksi

Negara-negara yang sangat menggantungkan pada sektor primer atau struktur produksinya bergantung pada faktor alamiah, seperti pertanian, perkebunan dll, maka penawaran terhadap barang tersebut kurang elastis. Sebagai contoh, jika suatu negara mengandalkan sektor pertanian sebagai produk unggulan akan sangat sulit untuk menyesuaikan penawaran maupun permintaannya. Jika permintaan dari luar negeri meningkat maka kebutuhan akan ekspor sektor pertanian tidak dapat didorong secara cepat, bisa jadi banyak gagal panen, atau tidak pada musim panen dll dan begitu juga sebaliknya.

6. Hutang Luar Negeri

Hutang luar negeri yang dikelola dengan kurang baik, maka akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Kasus di Indonesia tahun 1998, krisis ekonomi terjadi karena manajemen hutang tidak dilakukan dengan baik, sehingga pembayaran hutang yang jatuh tempo sangat membebani sistem keuangan nasional dan akhirnya nilai dollar meningkat pesat dan menyulitkan kondisi neraca pembayaran kita dan berdampak pada ekonomi secara makro.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan neraca pembayaran adalah karena disebabkan oleh pola perubahan, seperti sebagai berikut.

1. Disekuilibrium neraca pembayaran karena musiman

Perubahan transaksi yang dikarenakan oleh seasional atau musiman biasanya terjadi setiap tahun pada bulan-bulan tertentu, misalkan pada hari raya atau pada bulan akhir tahun. Perubahan transaksi ini akan menyebabkan perubahan pada neraca pembayaran suatu negara. Kebanyakan gejala ekonomi tersebut mempunyai sifat musiman yang berakar pada gejala alam atau musiman yang diciptakan oleh manusia yang semuanya itu berulang tiap tahunnya. Perubahan-perubahan yang sifatnya musiman yang terjadi dalam perekonomian dalam negeri maupun luar negeri dengan sendirinya akan menimbulkan perubahan pada neraca pembayaran yang sifatnya juga musiman juga. Perubahan neraca pembayaran

internasional yang terjadi karena mengikuti pola seasonal atau musiman ini pada umumnya tidak banyak menimbulkan masalah, sebab defisit neraca pembayaran pada bulan-bulan tertentu akan tertutup oleh surplus pada bulan-bulan lainnya.

2. Disekuilibrium neraca pembayaran karena siklus

Disekuilibrium ini timbul karena akibat dari adanya gelombang konjungtur yang terjadi dalam perekonomian dalam negeri atau yang terjadi dalam perekonomian negara lain. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh perubahan tingkat produksi nasional, perubahan harga-harga atau inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Biasanya pemerintah dalam mengatasi disequilibrium siklus ini digunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Perubahan yang bersifat konjungtur ini oleh lembaga moneter dunia Internasional Monetary Fund (IMF) akan memberikan bantuan kepada negara yang mengalami kesulitan keuangan akibat defisit neraca pembayaran yang sifatnya siklus.

3. Disekuilibrium neraca pembayaran karena Struktural

Ketidakseimbangan ini terjadi karena adanya perubahan-perubahan demand dan supply dalam perdagangan dan keuangan internasional akibat dari perubahan proses produksi karena kemajuan teknologi. Berkurangnya stok capital nasional yang sangat drastis mengurangi kapasitas produksi nasional, berubahnya pola produksi, berubahnya pola permintaan, berubahnya pola perdagangan, berubahnya pola aliran capital jangka panjang, perubahan-perubahan ini akhirnya mempengaruhi neraca pembayaran.

4. Disekuilibrium neraca pembayaran karena spekulasi

Ketidakseimbangan neraca pembayaran juga bisa diakibatkan oleh spekulasi di pasar valas oleh para fund managers yang bermain untuk mencari keuntungan dalam jangka pendek. Keadaan ini biasanya terjadi karena negara tersebut secara financial kurang menguntungkan sehingga rawan terjadi gejolak dalam nilai tukarnya. Keadaan seperti itulah maka para spekulasi dapat bermain dalam pasar uang dan modal yang dapat menguntungkan, walaupun negara tersebut nilai akhirnya bisa mengalami kerugian sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang domestik dan berimbas pada ketidakseimbangan neraca pembayaran.

F. Proses Penyeimbangan Neraca Pembayaran

Terjadinya defisit pada neraca pembayaran suatu negara dapat mempengaruhi fundamental makroekonomi pada negara tersebut, sehingga penyeimbangan neraca pembayaran menjadi hal penting yang perlu dilakukan oleh negara dengan melakukan pendekatan pada perubahan pendapatan nasional, tingkat harga dan kurs yang stabil dan dapat melalui sektor moneter.

1. Tingkat Harga

Surplus pada neraca pembayaran akan mendorong jumlah uang yang beredar meningkat, kenaikan JUB tersebut akan mendorong harga-harga naik dan dapat menyebabkan inflasi. Kenaikan pada inflasi akan membuat daya saing produsen dalam negeri menurun dengan produsen dari luar negeri, hal tersebut dapat terjadi karena kenaikan pada inflasi akan mendorong impor juga meningkat dari pada ekspor sehingga barang-barang impor akan lebih banyak diminati karena harga barang impor tersebut relatif lebih murah dibandingkan harga barang dalam negeri. Begitu juga yang terjadi ketika terjadi defisit neraca pembayaran, jumlah uang beredar akan turun sehingga meningkatkan daya saing produsen dalam negeri dengan produsen luar negeri dan dapat mendorong ekspor karena harga barang relatif murah diluar negeri dan untuk memproduksi barang tersebut juga cukup murah.

2. Tingkat Kurs

Negara yang menganut sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*), penyeimbangan neraca pembayaran melalui tingkat kurs dapat dilakukan dengan mendevaluasi mata uang domestik untuk kasus neraca pembayaran yang defisit dan merevaluasi untuk neraca pembayaran yang surplus. Keberhasilan devaluasi untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakseimbangan tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran valuta asing. Negara dengan sistem kurs yang fleksibel (*freely floating exchange rate*) nilai tukar ditentukan oleh pasar, sehingga tidak ada lagi campur tangan pemerintah dalam mengontrol nilai tukar, kecuali dengan sistem mengambang yang dimanaged, pemerintah masih bisa melakukan intervensi di pasar valas. Dengan demikian nilai tukar yang bebas

(freely) diperlukan faktor fundamental ekonomi yang lain untuk membuat nilai tukar dalam kondisi yang diinginkan.

3. Sektor moneter

Pendekatan sektor moneter terhadap ketidakseimbangan pada neraca pembayaran merupakan pendekatan yang digunakan oleh kaum monetaris. Ketidakseimbangan neraca pembayaran tersebut terjadi karena ketidakseimbangan pada portofolio atau terdapat gap antara saldo kas saat ini dengan saldo kas yang diinginkan oleh masyarakat. Ketidakseimbangan tersebut menjadi bahasan penting pada kalangan kaum monetaris. Langkah yang dapat ditempuh melalui kebijakan moneter adalah dengan mengatur jumlah uang beredar secara efektif agar dapat membuat neraca pembayaran menjadi lebih seimbang dan stabil.

Latihan Soal

1. Jelaskan apa yang anda ketahui dengan neraca pembayan internasional suatu negara, dan apa manfaat adanya neraca pembayaran tersebut.
2. Jelaskan struktur necara pembayaran yang anda ketahui, dan jelaskan pula bagaimana neraca pembayaran bisa disebut surplus, defisit dan seimbang.
3. Apa yang anda ketahui dengan current account dan capital account dalam transaksi neraca pembayaran. Penjelasan secara rinci.
4. Mengapa neraca pembayaran mengalami kondisi ketidakseimbangan, faktor apa yang menyebabkan ketidakseimbangan tersebut.
5. Proses penyeimbangan neraca pembayaran bisa melalui proses tingkat harga dan tingkat nilai tukar. Jelaskan hal tersebut bisa terjadi.

BAB 9

UANG DAN BANK

A. Uang

1. Perekonomian Barter dan Perekonomian Uang

Kegiatan perekonomian banyak ruang lingkupnya, salah satunya adalah aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan telah banyak dilakukan oleh masyarakat baik masyarakat pada zaman dahulu ataupun saat ini. Kegiatan perdagangan saat ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Kegiatan perdagangan pada zaman dahulu masih sangat terbatas yaitu dengan saling mempertukarkan barang (barter) antara penjual dan pembeli. Kegiatan perdagangan dengan sistem barter disebut dengan *perekonomian barter*. Perekonomian barter adalah suatu sistem ekonomi pada masyarakat yang kegiatan perdagangannya adalah dengan menukar produk secara langsung untuk produk yang lain.

Terbatasnya aktivitas perekonomian barter menjadi tidak efisien, sehingga muncul yang disebut dengan *perekonomian uang*. Perekonomian uang adalah kegiatan ekonomi pada masyarakat yang kegiatan perdagangannya dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Hampir seluruh negara di dunia sudah menggunakan uang sebagai

alat pembayaran yang sah dalam aktivitas perdagangan. Paparan diatas menjelaskan, secara garis besar aktivitas perekonomian dibagi menjadi dua, yaitu *perekonomian barter* dan *perekonomian uang*.

Penggunaan uang sebagai alat tukar dalam aktivitas perdagangan telah membawa banyak manfaat. Tanpa uang aktivitas perdagangan menjadi sangat terbatas dan proses tawar menawarnya menjadi lebih sulit, karena harus terdapat kecocokan terhadap barang yang akan ditukar. Dengan mempelajari sistem barter akan semakin tampak pentingnya uang sebagai alat tukar dalam aktivitas perdagangan.

Berikut adalah beberapa kelemahan dalam sistem perekonomian barter:

- a. Perekonomian Barter Memerlukan Kehendak Ganda yang Selaras. *Kehendak ganda yang selaras* adalah keinginan memiliki barang oleh tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran hendaknya memiliki barang yang diinginkan oleh pihak lain. Sebagai contoh, apabila pemburu ingin menukar kulit dengan jagung milik petani dan di lain pihak petani tersebut ingin menukarkan jagungnya dengan kulit, maka pertukaran dapat dilakukan. Namun, keadaan tersebut tidak selalu berlaku, jika pemburu tersebut menginginkan bahan makanan lain atau binatang ternak begitu juga petani yang menginginkan hasil selain dari kulit dari pemburu tersebut maka akan sulit terjadi barter, karena terdapat ketidakcocokan pada barang yang akan ditukarkan.
- b. Dalam Perekonomian Barter Penentuan Harga Sulit Dilakukan. Dalam sistem barter, selain sulit untuk menemukan dua kehendak laras tetapi juga harus menyetujui nilai tukarnya. Seperti contoh diatas, berapa banyak kulit yang seharusnya ditukar untuk mendapatkan jagung ataupun sebaliknya. Kehendak laras tersebut hanya melibatkan dua barang yang akan ditukar, yang hanya memunculkan satu nilai tukar yang ditentukan, namun jika yang ditukar melibatkan lebih dari tiga barang, maka akan menjadi jauh lebih sulit dalam menyetujui jumlah barang yang dapat ditukar tersebut.
- c. Perekonomian barter terbatas dan sulit. Sering kali terdapat perbedaan antara nilai satuan yang dipertukarkan membuat barter menjadi sulit. Sebagai contoh, misalkan pemburu tersebut ingin

membeli rumah, yang harga rumah senilai 1000 kulit. Pemburu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 1000 kulit tersebut. Kesulitan barter akan mendorong pada alternatif aktivitas perdagangan menjadi lebih sederhana.

- d. **Perekonomian Barter Menyulitkan Pembayaran Masa Depan.** Jika pembayaran dengan sistem kredit dibayar dalam bentuk barang, hal ini menyulitkan perdagangan karena (1) sulit untuk menentukan barang yang akan digunakan dalam proses barter tersebut, (2) terdapat kesepakatan terhadap mutu dan kualitas barang yang ditukar dan (3) harus menentukan besarnya barang yang akan dipertukarkan.
- e. Dalam perekonomian barter sulit menyimpan kekayaan.

Tidak akan dapat dibayangkan, bagaimana menyimpan kekayaan pada sistem ekonomi barter. Pasti akan sulit bagi orang untuk menyimpan kekayaannya, misal dengan banyak binatang ternak maka akan membutuhkan kandang yang cukup luas dan terdapat biaya pemeliharaan hewan dan kandang, jika ingin menyimpan emas akan membutuhkan tempat rahasia didalam rumah. Hal tersebut berbeda pada sistem ekonomi modern saat ini, cukup uang disimpan dalam bank dan dapat digunakan sewaktu-waktu.

2. Definisi dan Kriteria Uang

Melalui beberapa penjelasan akan kesulitan dalam perekonomian barter akan mendorong pelaku ekonomi menjadi lebih sederhana dan mudah dalam aktivitas perdagangan, yaitu dengan menggunakan uang sebagai alat tukar dalam perdagangan. Dengan demikian, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang *diterima* oleh masyarakat sebagai alat tukar dalam aktivitas perdagangan. Dalam definisi ini, kata “diterima” berarti disepakati oleh masyarakat secara luas sebagai alat tukar. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, benda itu haruslah memenuhi beberapa kriteria (syarat) sebagai berikut.

- a. *Diterima umum.* Karena uang memberikan banyak manfaat dan kemudahan daripada sistem barter dan masyarakat menerima uang sebagai alat pertukaran yang sah baik untuk barang atau jasa.

- b. *Mudah dibawa.* Uang mudah dibawa. Dalam melakukan transaksi dalam jumlah besar sekalipun dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah (secara fisik) yang sedikit sehingga mudah dan aman dibawa.
- c. *Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.* Uang mudah disimpan dengan aman tanpa mengurangi nilainya. Artinya pembuatan uang seharusnya mempertimbangkan mudah disimpan, kecil tidak terlalu besar, tipis, bisa masuk dalam kantong atau saku dan lainnya.
- d. *Tahan lama.* Aktivitas perdagangan yang sangat tinggi mengharuskan masyarakat cakap dalam melakukan transaksi, sehingga uang juga akan cepat berpindah dari tangan satu ke tangan lainnya. Agar tidak mudah rusak, uang dibuat dari bahan kertas yang cukup ulet dan kuat, atau dari bahan logam yang tahan lama.
- e. *Jumlahnya tidak berlebihan.* Jumlah uang yang beredar di masyarakat harus terukur dengan cermat agar tidak mengurangi nilai uang tersebut.
- f. *Terdiri lebih dari satu nominal (pecahan).* Uang digunakan untuk memperlancar berbagai transaksi, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Oleh karena itu, uang dicetak dalam berbagai nilai nominal agar mencukupi dan memperlancar transaksi jual-beli tersebut. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada uang. Semakin tinggi nilai nominal uang pecahan terkecil maka biasanya nilai uang itu semakin menurun. Sebagai contoh, dahulu nominal uang terkecil Rp1,00 sekarang Rp100,00. Atau dahulu harga krupuk Rp1,00 sekarang Rp1.000,00 dsb.

3. Fungsi Uang

Karena uang adalah alat yang digunakan sebagai alat transaksi dalam perekonomian, maka uang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

- a. *Alat Pertukaran (medium of exchange).* Penjualan satu barang dan pembelian yang lain membutuhkan suatu barang yang dapat diterima semua pihak yang terlibat transaksi. Uang telah memungkinkan seseorang memperoleh barang yang diinginkan hanya dengan cara menemukan orang yang memiliki barang tersebut dan sebagai bentuk barang yang diterima oleh penjual dan pembeli. Kegiatan perdagangan dengan menggunakan uang

menjadi lebih mudah dan fleksibel. Berarti, uang telah melancarkan jalannya kegiatan perdagangan. Dengan demikian, uang berfungsi sebagai alat tukar.

- b. Satuan hitung (*unit of account*). Sebagai alat satuan hitung merupakan suatu unit standar yang menentukan besarnya nilai atau harga berbagai jenis barang. Sebagai contoh, apabila ingin mendapatkan sepatu maka harus menyediakan 50 kg jagung. Maka jagung bukan hanya sebagai alat pertukaran, tetapi juga menjadi suatu ukuran nilai seluruh barang dan jasa. pengukuran tersebut akan menyulitkan pembeli sepatu, namun jika menggunakan uang sebagai satuan hitung akan menjadi lebih mudah dan diterima oleh pembeli dan penjual, dengan uang Rp. 400.000,00 maka pembeli dapat membawa sepatu yang diinginkan. Dengan hal tersebut, masyarakat tidak perlu bersusah payah membandingkan bahwa satu pasang sepatu sama nilainya dengan 50 kg jagung atau 75 kg beras.
- c. Sebagai ukuran pembayaran masa depan (*standard for deferred payment/credit*). Jika kita berpikir sejenak, apa yang akan terjadi jika pembayaran tunda atau kredit menggunakan barang? Yang terlintas pasti akan terjadi suatu kerumitan, bagaimana menentukan jumlah barang yang ditukarkan, kualitas barang yang ditukarkan, bahkan jika di masa depan barang tersebut mengalami penurunan, seperti kualitas menurun, gagal panen (jika barang yang ditukar dari hasil pertanian) dll. Berbeda halnya jika kita menggunakan uang sebagai alat pembayaran tunda atau kredit. Selain mudah dan nilai uang yang stabil dapat memberikan rasa aman bagi pemberi kredit dan pengguna kredit tersebut.
- d. Sebagai alat penyimpanan kekayaan. Dahulu, orang menyimpan kekayaan dalam bentuk barang, seperti rumah, tanah, hewan peliharaan dsb. Menyimpan barang-barang tersebut juga membutuhkan tempat, sehingga meningkatkan biaya yang dikeluarkan untuk merawatnya. Saat ini, hal tersebut masih berlaku bagi sebahagian kalangan masyarakat, namun ada yang lebih mudah untuk menyimpan kekayaan yaitu menggunakan uang. Apabila harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dibanding menyimpan dalam bentuk barang. Namun dalam ekonomi syariah menyimpan uang dalam

uang (menimbun) dilarang kecuali hanya sebatas untuk berjaga-jaga, karena jika uang banyak disimpan atau ditimbun maka manfaat sebenarnya uang sebagai alat transaksi menjadi berkurang dan jumlah uang beredar dalam perekonomian berkurang, sehingga bisa berdampak buruk bagi perekonomian. Dengan demikian uang mempunyai konsep yang mengalir (*flow concept*), sehingga akan menyetakan perekonomian.

Saat ini, *uang giral* (cek, giro) lebih banyak digunakan oleh masyarakat sebagai alat transaksi dalam jumlah yang besar. Penggunaan uang giral tidak memerlukan biaya penyimpanan dan sangat mudah digunakan. Pengurusan uang giral dilakukan oleh bank-bank. Hanya dengan menggunakan secarik kertas yang tertera sejumlah nominal, pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan karena selebihnya diurus oleh pihak bank.

Jenis kedua adalah *uang kertas*. Uang ini juga merupakan alat penyimpan kekayaan (*store of value*). Penyimpanannya tidak memerlukan biaya dan ruangan yang besar. Uang berfungsi sebagai alat penyimpan kekayaan yang lebih baik daripada menyimpan kekayaan berupa barang, jika nilai uang tidak mengalami perubahan yang berarti dari satu periode ke periode lainnya. Apabila harga-harga selalu mengalami kenaikan yang pesat, nilai uang akan terus menerus mengalami kemerosotan. Maka, kekayaan yang berupa uang akan mengalami penurunan nilai jika dibandingkan dengan kekayaan yang berbentuk barang. Dalam keadaan demikian, uang bukanlah alat penyimpan kekayaan yang baik. Apabila keadaan seperti itu terjadi dalam perekonomian maka masyarakat akan beramai-ramai menggantikan kekayaan yang berupa uang menjadi kekayaan yang berbentuk barang, terutama berupa tanah, rumah, atau emas. Butir a dan b merupakan *fungsi asli* uang, sedangkan butir c dan d merupakan *fungsi turunan* uang.

4. Sejarah Penggunaan Uang

a. Sistem Barter

Banyaknya kesulitan-kesulitan yang terjadi pada perekonomian barter seperti yang telah diuraikan diatas. Membuat aktivitas perdagangan pada saat itu menjadi sangat terbatas dan tidak

berkembang. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan uang sebagai alat tukar dalam aktivitas perdagangan.

b. Penggunaan Emas dan Perak

Awal mula penggunaan uang sebagai alat transaksi adalah mata uang emas dan perak. Penggunaan mata uang emas dan perak berlangsung cukup lama dan digunakan hampir di seluruh dunia. Kedua jenis logam tersebut memiliki beberapa kriteria yang sesuai sebagai alat transaksi, yaitu (1) kedua logam tersebut memiliki nilai yang sangat stabil untuk jangka panjang, (2) kedua logam tersebut tergolong tahan lama dan tidak mudah rusak, dan (3) banyak orang menyukai kedua logam tersebut untuk perhiasan dll. Selain memiliki keunggulan diatas, penggunaan mata uang emas dan perak juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu (1) memerlukan tempat yang cukup besar untuk menyimpan emas dan perak, (2) kedua logam tersebut memiliki berbagai bentuk ukuran dan cukup berat untuk dibawa, dan (3) pesatnya aktivitas perdagangan, meningkatkan akan kebutuhan emas dan perak semakin banyak dan hal tersebut dapat meningkatkan kerusakan alam karena untuk mencari bahan pembentuk emas dan perak dari alam.

c. Uang Kertas

Uang kertas yang kita gunakan saat ini, dikeluarkan oleh Bank Sentral. Di Indonesia yang berhak mencetak dan mengedarkan uang kertas adalah Bank Indonesia. Penggunaan uang kertas harus memiliki 6 unsur seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Perkembangan zaman yang semakin maju. Aktivitas perdagangan dan pembayaran juga semakin maju, sehingga perekonomian uang juga turut berevolusi. Alat transaksi atau pembayaran saat ini bisa menggunakan uang giral dan *e-money*.

5. Nilai Uang

Saat ini, uang telah tumbuh menjadi lebih kompleks. Berawal dari komoditas fisik atau saat mata uang menggunakan emas dan perak dan saat ini hanya selembar kertas yang tidak mempunyai nilai intristik, menjadi sebuah data elektronik yang menunjukkan klaim pada selembar kertas tersebut. Terlintas dalam pikiran kita, bagaimana mungkin secarik kertas Rp. 100.000,00 dapat ditukarkan dengan berbagai barang atau

jumlah roti yang diinginkan? Apakah secarik kertas Rp. 50.000,00 memiliki nilai? Pada awal penggunaannya, uang dapat memberikan keyakinan atas kemampuannya diterima oleh khalayak luas. Seperti halnya pada komoditas padi atau jagung yang mempunyai nilai dalam penggunaannya sekalipun memiliki beberapa alasan barang tersebut kurang diterima oleh sebagian masyarakat. Pada saat awal penggunaan uang kertas, kemampuannya dapat diterima oleh masyarakat, karena dapat ditebus dengan emas atau perak, namun uang kertas yang saat ini kita pegang menjadi lebih kompleks peranannya.

Nilai uang menunjukkan daya belinya, yaitu kemampuan uang ditukarkan dengan barang atau jasa. Semakin tinggi tingkat harga, maka akan semakin sedikit barang atau jasa yang dapat dibeli dengan setiap rupiah yang dikeluarkan, sehingga semakin kecil pula nilai dari rupiah tersebut. Salah satu cara untuk mengerti fungsi uang adalah dengan melihat situasi pada saat uang tidak bekerja dengan baik. Saat terjadi kenaikan harga pada barang atau jasa, uang tidak lagi berfungsi sebagai penyimpan nilai yang stabil, sehingga akan mendorong masyarakat untuk menukarkan uangnya dengan barang ataupun mata uang lain yang lebih kuat dan stabil. Kenaikan harga yang terjadi begitu cepat, beberapa pedagang juga menaikkan harga pada komoditas barang yang dijual lebih cepat, sehingga harga relatif terdistorsi. Kemudian, uang menjadi turun peranannya sebagai satuan hitung. Uang saat ini, dapat menyebabkan dengan apa yang disebut inflasi, berbeda dengan sistem barter atau komoditas emas atau perak saat masih digunakan menjadi mata uang, sehingga hal inilah yang menjadi penyebab mata uang saat ini menjadi lebih kompleks penggunaannya.

6. Permintaan Uang

a. Teori Kuantitas (Klasik)

Teori permintaan uang sangat penting dipelajari, karena teori tersebut akan digunakan untuk menjelaskan tentang teori pendapatan dan teori tenaga kerja dan dapat juga dikaitkan dengan kebijakan fiskal dan moneter. Salah satu teori permintaan uang yang dikembangkan oleh kaum klasik adalah teori kuantitas (*Quantity Theory*). Teori dari kaum klasik secara garis besar membahas penyebab utama dari terjadinya perubahan nilai uang itu sendiri.

Dalam transaksi ekonomi, akan melibatkan antara penjual dan pembeli, sehingga jumlah uang yang dibayarkan pembeli akan sama dengan uang yang diterima oleh penjual, yaitu:

$MV_T = PT$, dimana

M = jumlah uang beredar/penawaran uang (*money supply*)

V_T = kecepatan peredaran uang (*velocity of money circulation of money*)

P = tingkat harga-harga (*price level*)

T = jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diperjualbelikan dalam satu tahun tertentu (*transaction*)

Dari rumus diatas akan dapat diketahui fungsi permintaan uang yang terjadi, dengan rumus sebagai berikut:

$$M_d = \frac{1}{V_T} PT$$

M_d = Permintaan Uang

Permintaan atau kebutuhan uang yang terjadi di masyarakat adalah proporsi $\frac{1}{V_T}$ dari nilai transaksi (PT). Secara umum, permintaan uang harus sama dengan penawaran uang yang terjadi, yaitu :

$$M_d = \frac{1}{V_T} M_s$$

M_s = Penawaran Uang

Ketentuan diatas, menghasilkan persamaan dari penawaran uang itu sendiri, yaitu:

$$M_s = \frac{1}{V_T} PT$$

Dalam jangka pendek tingkat harga yang berlaku (P) akan berubah secara proposional dengan mengikuti perubahan jumlah uang yang beredar yang diedarkan oleh pemerintah, teori kuantitas uang klasik menjelaskan bahwa (T) ditentukan oleh tingkat output dari masyarakat, bagi Fisher sendiri dianggap pada posisi “*full employment*”, sedangkan pada kecepatan peredaran uang (V_T),

ditentukan oleh proses transaksi yang berlaku di masyarakat pada periode tertentu, namun juga terdapat andil dari sistem kelembagaan yang menentukan dalam proses transaksi tersebut, seperti peran perbankan dalam memberikan kredit, kebutuhan akan uang bagi masyarakat pesisir berbeda dengan kebutuhan akan uang bagi masyarakat golongan kaya, dll. faktor kelembagaan biasanya dapat berubah secara drastis untuk jangka panjang, namun untuk jangka pendek dianggap konstan dan volume dari transaksi (T) untuk jangka pendek dianggap konstan atau tidak berubah.

b. Teori Keynes

Teori uang dari Keynes merupakan bagian dari teori makroekonomi dalam bukunya yang masyhur yaitu *General Theory*, dalam buku tersebut banyak pendapat Keynes tentang teori moneter yang menyimpang dari tradisi Klasik sebelumnya. Beberapa teori yang menyimpang dan menjadi kritik bagi kaum klasik dari Keynes adalah: (a) sekalipun Keynes sependapat bahwa kenaikan jumlah uang beredar dapat menyebabkan kenaikan harga, namun tidak selamanya kenaikan jumlah uang beredar tersebut dapat menimbulkan perubahan pada harga barang atau jasa, apalagi dalam kondisi terjadi banyaknya pengangguran pada suatu negara, penambahan jumlah uang beredar tidak akan mempengaruhi tingkat harga barang atau jasa, dan (b) Kenaikan harga-harga dipengaruhi oleh kenaikan jumlah uang beredar maupun kenaikan biaya produksi. Meskipun jumlah uang beredar tidak mengalami perubahan, tetapi apabila biaya produksi bertambah tinggi, akan terjadi kenaikan pada harga-harga barang atau jasa.

Berbeda halnya dengan kaum Klasik, dalam teori Keynes tidak menggunakan asumsi *full employment* seperti halnya kaum Klasik, sehingga Keynes berpendapat bahwa penambahan jumlah uang beredar akan menaikkan pendapatan nasional. Selain itu, teori Keynes juga membahas permintaan akan uang dengan 3 motif, yaitu

- 1) **Motif Transaksi** (*Transaction Motive*). Di dalam perekonomian moderndengan tingkat spesialisasi yang tinggi, uang sangat diperlukan. Spesialisasi yaitu keadaan setiap orang telah dapat mengkhususkan diri pada pekerjaan yang ia sukai dan sesuai keahliannya. Setiap orang yang bekerja ingin memperoleh upah atau uang untuk membeli (transaksi) barang-barang kebutuhannya.

Jumlah permintaan uang untuk tujuan transaksi tergantung pada besarnya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang semakin banyak jumlah uang yang digunakan untuk melakukan transaksi.

- 2) **Motif Berjaga-jaga** (*Precautionary Motive*). Oleh masyarakat, uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masa depan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Hal-hal yang tak terduga, misalnya anggota keluarga yang sakit atau kedatangan tamu dari luar kota. Untuk menghadapi keperluan semacam itu masyarakat merasa perlu memegang uang untuk keperluan berjaga-jaga. Besarnya uang yang disimpan untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh besarnya pendapatan. Dalam ekonomi syariah uang berjaga-jaga dibenarkan, hanya saja jumlah uang untuk berjaga disesuaikan dengan jumlah kebutuhan keseharian yang mereka keluarkan. Semakin orang kayasemakin uang berjaga-jaga semakin banyak hal tersebut wajar dikarenakan biasanya semakin tinggi pendapatan konsumsi semakin tinggi. Namun demikian jangan sampai uang berjaga-jaga berlebihan sehingga bisa disebut sebagai penimbun uang yang tidak dibenarkan.
- 3) **Motif Spekulasi** (*Speculative Motive*). Spekulasi berarti membuat pilihan dengan harapan mendapatkan hasil yang tinggi. Contohnya membeli dan menjual surat-surat berharga obligasi dan saham perusahaan dalam jangka pendek dengan motif ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi (*capital gain*). Faktor yang menentukan dalam melakukan pilihan ini adalah hasil yang akan diperoleh dari pemilikan surat-surat berharga tersebut. Para pemegang uang akan bersedia memiliki surat-surat berharga apabila surat berharga tersebut memberikan tingkat pendapatan yang tinggi. Jika tidak, niscaya mereka akan lebih suka memegang uang. Di pasar uang juga demikian banyak orang melakukan transaksi spekulasi dengan jual beli aung valas, dengan motif mendapatkan selisih antar beli dan jual uang tersebut. Dengan demikian permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh tingkat bunga, karena orang selalu membandingkan dengan keuntungan jika dibanding dengan bunga bank yang berlaku di bank-bank umum.

Pada ekonomi syariah transaksi spekulasi tidak lazim dan dilarang, mengingat dalam jangka pendek orang bisa memperoleh banyak diuntungkan, sisi lain banyak orang dirugikan. Selain itu penegasan kembali bahwa motif pegang uang hanya untuk transaksi dan berjaga-jaga dan juga bahwa uang memang benar-benar diposisikan sebagai alat transaksi saja, bukan sebagai komoditas perdagangan. Orang tidak dilarang memberdayakan uangnya untuk memperoleh banyak keuntungan, hanya saja fungsi uang tetap terpenuhi sebagai alat transaksi sehingga memberdayakan uang diarahkan pada sektor riil (bisnis) atau sektor produksi barang dan jasa.

B. Bank

1. Perkembangan Perbankan di Indonesia

Perkembangan bank di Indonesia, dimulai zaman Belanda (*Nederland Indie*), pada masa itu ada tiga bank yang berperan penting adalah:

- a. Pada tanggal 10 Oktober 1827 berdiri *De Javasche Bank NV*, Bank pertama yang didirikan oleh Belanda di Indonesia, namun pada tanggal 6 Desember 1951 setelah Indonesia merdeka bank tersebut dinasionalisasikan oleh Pemerintah RI dan berdasarkan UU No. 13 Tahun 1968 menjadi bank sentral di Indonesia.
- b. Bank lain yang pernah didirikan adalah *De Algemene Volkscredietbank* pada tahun 1934 di Jakarta. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia bank tersebut digunakan oleh Jepang dan diganti menjadi *Syomin Ginko* dan saat ini, bank tersebut telah dinasionalisasikan dan diberi naman Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- c. Bank lain yang didirikan oleh Belanda adalah *De Postpaarbank* pada tahun 1898. Setelah Indonesia lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang bank tersebut mengalami dua kali perubahan nama, yaitu pertama menjadi Bank Tabungan Pos sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1950, dan kedua berubah menjadi Bank Tabungan Negara (BTN) dan dikuatkan dengan UU No. 20 Tahun 1968.

Perkembangan perbankan di Indonesia sebagai tonggak sejarah diawali dari kebijakan liberalisasi sektor perbankan di Indonesia dimulai sejak tahun Pada 1983 Paket Juni (Pakjun 83), tahap awal deregulasi yaitu upaya untuk membangun suatu sistem perbankan yang sehat,

efisien, dan tangguh, maka perbankan dimulai dengan penghapusan pagu kredit, bank bebas menetapkan suku bunga kredit, tabungan, dan deposito. Kemudian pemerintah menggunakan instrumen tidak langsung yaitu penentuancadangan wajib, operasi pasar terbuka (OPT), fasilitas diskonto, dan *moral suasion*. Hasilnya, selain telah meningkatkan simpanan masyarakat di bank, Paket Juni 1988 telah memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan moneter, yang sejak saat itu pengendalian moneter lebih mengutamakan penggunaan instrumen tidak langsung. Kemudian juga berhasil menumbuhkan iklim persaingan antar bank. Banyak bank swasta, mengambil inisiatif dalam menentukan arah perkembangan usahanya.

Tahun 1988 pemerintah bersama BI mengeluarkan Paket Kebijakan Dereglulasi Perbankan 1988 (Pakto 88). Kebijakan yang dilakukan seperti pemberian izin usaha bank baru yang dihentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali oleh Pakto 88. Demikian dengan izin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR menjadi lebih dipermudah dengan persyaratan modal ringan. Namun demikian, Pakto 88 mempunyai efek dalam bentuk penyalahgunaan kebebasan dan kemudahan perbankan dalam bank devisa, yang menghambat terciptanya sistem perbankan yang sehat. Tahun 1990-an, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU No. 14/1967, yaitu UU Perbankan no. 2 Tahun 1992. Kemudian pada tahun 1992-1993, perbankan nasional menghadapi permasalahan yaitu meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan berdampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit karena ketatnya ketentuan dalam Paket Februari 1991. Maka, dikeluarkanlah Paket Mei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Paket Februari 1991. Berikutnya, sejak 1994 perekonomian Indonesia mengalami booming economy dengan sektor properti sebagai pilihan utama. Keadaan itu menjadi daya tarik bagi investor asing.

Pakmei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu singkat. Kredit perbankan dalam jumlah besar mengalir deras ke berbagai sektor usaha meski BI telah berusaha membatasi. Keadaan ekonomi mulai memanas dan inflasi meningkat. Hingga pertengahan tahun 1997, akhirnya krisis moneter menerpa

Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah, sistem pembayaran terancam macet, dan banyak utang luar negeri yang tak terselesaikan. Krisis telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang luar biasa akibat hancurnya Pasar Uang antar Bank (PUAB). Walaupun dengan *lender of the last resort* BI yang harus membantu mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan pembayaran untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi nasional. Nilai tukar Rupiah terus merosot tajam, pemerintah melakukan tindakan pengetatan Rupiah melalui kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN dari bank-bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pemulihan ekonomi dan moneter dengan kebijakan recovery dan penyehatan perbankan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari pengalaman pasang surut industri perbankan tersebut menjadikan Indonesia sebuah pengalaman, untuk menata sektor perbankan lebih baik di masa mendatang.

2. Fungsi Perbankan

Kegiatan perbankan telah ada sejak zaman dahulu, dari masa Belanda masih menjajah di Indonesia hingga sekarang telah dan masih berlangsung kegiatan perbankan. Perbedaan yang sangat mendasar antara kegiatan perbankan zaman dahulu dengan sekarang adalah bahwa kegiatan perbankan pada zaman dahulu tidak ada aturan (*free rule*), tidak ada pengawasan terhadap kegiatan bank dan bank pada saat itu dapat mencetak dan dapat mengedarkan uang sendiri. Semakin pentingnya kegiatan perbankan pada sistem perekonomian saat ini, maka perhatian negara dan ekonom terhadap bank semakin meningkat, dengan hal tersebut maka berakhirilah masa *free banking*. Setiap negara mempunyai otoritas yang mengatur dan mengawasi setiap kegiatan perbankan. Cakupan dari kegiatan perbankan dari setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda-beda, namun terdapat kesamaan sifat dasar dari suatu bank, yaitu bahwa sumber pendanaan bank berasal dari simpanan masyarakat sehingga bank memiliki kewajiban untuk mencairkan simpanan masyarakat sewaktu-waktu. Berangkat dari hal tersebut, di Indonesia sendiri telah banyak regulasi yang mengatur kegiatan perbankan yaitu dengan UU No. 10 Tahun 1998 secara jelas menyatakan definisi kegiatan perbankan yaitu Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam sistem perbankan yang modern, bentuk dan kegiatan perbankan menjadi lebih variatif sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Saat ini telah banyak lembaga keuangan mikro (*micro finance*) yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Perkembangan kegiatan perkembangan yang begitu pesat mendorong pemerintah untuk menetapkan regulasi yang cukup ketat agar tidak terjadi gagal bayar yang dapat mengganggu perekonomian domestik. Secara umum, lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Bab ini membahas secara lebih intens tentang lembaga keuangan bank, fungsi utama dari perbankan antara lain adalah:

a. Bank sebagai Fungsi Intermediasi

Intermediasi adalah fungsi utama bank, yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, terdapat biaya bunga dan biaya administrasi yang ditetapkan oleh bank sebagai dampak dari informasi yang tidak berimbang ataupun informasi yang tidak akurat antara pihak yang membutuhkan dana terhadap pemilik dana dan biaya operasional lainnya. Saat ini, bank didorong untuk dapat menjalankan fungsi intermediasi seefektif dan seefisien mungkin, karena dengan hal tersebut dapat mendukung perekonomian berjalan dengan baik. Pilar pembangunan ekonomi terdiri dari 3 komponen, yaitu pihak kekurangan dana, jika mendapat suntikan modal dan bergerak pada sektor yang produktif maka dapat meningkatkan produksinya, kedua pihak kelebihan dana, jika dapat disalurkan ke sektor yang produktif, selain meningkatkan produktivitas juga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan ketiga adalah bank itu sendiri, kegiatan bank yang efektif dan efisien serta pengelolaannya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas moneter dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang optimal.

b. Bank sebagai Fungsi Penyedia Likuiditas

Selain kurangnya informasi yang akurat terhadap pihak debitur dan kreditur, terdapat perbedaan pembayaran dari pihak debitur ke kreditur, pihak debitur sebagai peminjam uang menginginkan pembayaran kredit menggunakan metode angsuran sesuai dengan arus kas yang diperoleh, sedangkan pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman menginginkan pembayaran dalam jumlah tetap pada periode tertentu. Dalam kondisi tersebut, bank muncul sebagai jembatan perbedaan pembayaran antara debitur ke kreditur dengan menyediakan likuiditas. Kebutuhan akan likuiditas yang disediakan oleh bank saat ini sangat beragam, hal ini mendorong otoritas moneter untuk memonitor likuiditas pada perbankan secara tepat. Tujuan dari otoritas moneter dalam memonitor likuiditas perbankan tidak lain agar tidak terjadi krisis yang berdampak buruk pada perekonomian. sejarah telah mencatat bahwa krisis bermula dari kekurangan likuiditas dari lembaga keuangan yang dapat menulat sistem perbankan yang lain.

c. Bank sebagai Fungsi Pelaksana Sistem Pembayaran

Fungsi bank sebelumnya yaitu sebagai lembaga intermediasi dan penyedia likuiditas maka akan terjadi proses perpindahan kepemilikan antara debitur ke kreditur dan perpindahan kepemilikan tersebut sebagai sistem pembayaran. Masyarakat saat ini, juga dapat melakukan pembayaran ke bank dengan sistem tunai (uang kertas atau logam) dan non-tunai (cek, giro, transfer dan ATM). Kelancaran pada sistem pembayaran akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan., namun jika terjadi banyak kegagalan pada sistem pembayaran akan meningkatkan resiko terhadap turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan bank sehingga dapat terjadi *bank rush*. Kejadian tersebut tentu harus dihindari oleh bank.

d. Bank sebagai Fungsi Media Transmisi Kebijakan Moneter

Fungsi bank yang lain dan tidak kalah penting dari fungsi sebelumnya adalah bank sebagai media transmisi kebijakan moneter. Bank memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu bank dapat menciptakan uang (uang giral atau uang kuasi) sehingga proses perputaran uang didominasi

pada sektor perbankan. Melalui instrumen kebijakan moneter, antara lain suku bunga, bank sentral dapat mengendalikan jumlah uang beredar atau likuiditas ekonomi yang dapat mempengaruhi perekonomian secara umum.



BAB 10

BANK SENTRAL, OTORITAS JASA KEUANGAN DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

A. Tujuan Bank Sentral

Bank sentral mempunyai peran yang sangat strategis bagi negara dan masyarakat dan yang paling mendasar perannya adalah mencetak dan mengedarkan uang yang sah sebagai alat pembayaran. Saat ini, bentuk dan fungsi uang semakin beragam, jika diibaratkan, uang adalah “jantung” perekonomian, sehingga mendorong fungsi bank sentral juga semakin besar yaitu sebagai otoritas moneter yang bertanggungjawab memelihara kestabilan nilai dari mata uang yang diedarkan.

Pada awal mula berdirinya bank sentral, kegiatan dan tujuan bank sentral sama dengan bank-bank komersial lainnya. Berjalannya waktu, terdapat perubahan kegiatan dari bank sentral yang mencolok dibandingkan dengan bank-bank komersial lainnya yaitu diberi mandat untuk mencetak uang (kertas dan logam) dan bertindak sebagai agen dan bankir pemerintah. Pada saat ini, kegiatan bank sentral menjadi lebih luas lagi dengan diberi tanggungjawab sebagai otoritas moneter negara dan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1968 yaitu bahwa Bank Indonesia dilepaskan dari berbagai tugas yang pada umumnya dilakukan oleh bank komersial.

Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia diatur secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Dalam undang-undang secara jelas menyebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah menurut undang-undang adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa tercermin pada perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bank Indonesia juga menyeimbangkan kondisi ekonomi internal yang tercermin pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran atau terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah dan keseimbangan eksternal yang tercermin pada kinerja neraca pembayaran atau terjaganya nilai tukar rupiah pada tingkat yang cukup kuat dan stabil. Maka dari hal itu, Bank Indonesia tetap perlu berkoordinasi dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal agar kebijakan yang ditempuh sejalan dan saling menguatkan. Sesuai undang-undang, Bank Indonesia mempunyai tiga tugas besar, yaitu

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Tugas otoritas moneter merupakan tugas yang masih berada pada lingkup makro dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas perekonomian, hal tersebut sejalan dengan amandemen UU No. 3 Tahun 2004 menekankan agar kebijakan moneter Bank Indonesia dilaksanakan secara berkelanjutan, konsisten, transparan dan harus mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian. Tujuan dari amandemen tersebut agar kebijakan Bank Indonesia dapat dijadikan acuan bagi dunia usaha dan masyarakat lainnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2004, sasaran laju inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter yang semula ditetapkan oleh Bank Indonesia diubah menjadi ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan memperkuat

komitmen dan dukungan Pemerintah dalam capaian sasaran inflasi oleh Bank Indonesia.

Untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan, Bank Indonesia menggunakan kewenangannya dalam menentukan besaran moneter dan atau suku bunga dengan mempertimbangan perkembangan dan arah pergerakan ekonomi ke depan. Pengendalian moneter juga diperlukan dalam mencapai sasaran tersebut dengan beberapa instrumen moneter, yaitu:

- a. Operasi pasar terbuka,
- b. Fasilitas diskonto,
- c. Penetapan giro wajib minimum (GWM), dan
- d. Imbauan yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang menjadi catatan adalah bahwa Bank Indonesia harus menghindari penciptaan terhadap uang beredar diluar pertimbangan moneter. Pengalaman di masa orde lama telah membuktikan bahwa penggunaan kebijakan moneter (mencetak uang) untuk membiayai pengeluaran Pemerintah telah berdampak buruk pada perekonomian secara umum dan laju inflasi secara khusus. Sehingga terbit UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dilarang memberikan pinjaman kepada Pemerintah untuk membiayai pengeluaran APBN baik secara langsung maupun melalui pembelian surat utang negara (SUN). Melalui UU No. 3 Tahun 2004 terdapat perubahan, bahwa Bank Indonesia diperbolehkan membeli surat utang negara dengan tujuan untuk pendanaan fasilitas pembiayaan darurat yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mengatasi kesulitan perbankan yang berdampak sistemik pada seluruh sistem keuangan dan perekonomian.

Pelaksanaan kebijakan moneter dengan sasaran akhir laju inflasi yang terkendali tidak lepas dari sistem nilai tukar dan sistem devisa yang ditetapkan. Pada tanggal 14 Agustus 1997, Pemerintah telah menetapkan bahwa sistem nilai tukar yang dianut adalah sistem nilai tukar mengambang. Dalam sistem ini, nilai tukar dibiarkan mengambang dan ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran valuta asing di pasar. Dengan hal itu, kebijakan Bank Indonesia terhadap nilai tukar adalah dengan melakukan

intervensi di pasar valuta asing dengan tujuan agar nilai tukar di pasar stabil. Kebijakan tersebut ditempuh untuk melindungi perubahan-perubahan pada harga khususnya pada barang impor yang sangat rentan terhadap perubahan nilai tukar.

Tidak berbeda jauh dengan nilai tukar, bahwa sistem devisa di Indonesia yang dianut sesuai dengan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Nilai Tukar dianut sistem devisa bebas, yang berarti masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Pemilihan sistem devisa juga menunjukkan seberapa besar negara yang bersangkutan ingin mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi global. Sistem devisa yang bebas mendorong Bank Indonesia dan sesuai kewenangannya pada UU dapat memonitoring dan mengeluarkan kehati-hatian terhadap lalu lintas devisa yang masuk dan keluar Indonesia.

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan dua pendekatan, yaitu a) menetapkan penggunaan alat pembayaran, dan b) mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.

a. Kewenangan menetapkan penggunaan alat pembayaran

Terdapat dua jenis alat pembayaran yaitu, pembayaran tunai dan non-tunai. Kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran tunai meliputi, mengeluarkan, mengedarkan, menarik dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya. Alat pembayaran tunai meliputi uang kertas dan logam, untuk itu Bank Indonesia harus dapat menjamin ketersediaan uang tunai dalam jumlah yang memadai.

b. Kewenangan mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran

Kewenangan Bank Indonesia yaitu berhak menyelenggarakan sendiri sistem pembayaran atau memberi izin kepada pihak lain untuk dapat menyelenggarakan jasa sistem pembayaran dan memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia, dan Bank Indonesia berhak mengatur sistem

kliring, menyelenggarakan sistem kliring antar bank, dan menyelenggarakan penyelesaian akhir (setelmen) transaksi pembayaran antarbank, baik dalam rupiah ataupun mata uang asing.

3. Menjaga stabilitas sistem keuangan

Bank Indonesia selain sebagai otoritas moneter yaitu menjaga stabilitas moneter juga sebagai otoritas keuangan (perbankan dan sistem pembayaran) yaitu dengan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Stabilitas moneter tidak dapat dipisahkan dengan stabilitas sistem keuangan, karena kedua hal tersebut saling berkaitan. Jika terjadi kegagalan pada stabilitas moneter dapat mengganggu kinerja keuangan dan berdampak buruk pada aktivitas perekonomian. Berikut adalah peran utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan:

- a. Menggunakan instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka merupakan instrumen moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter. Penggunaan instrumen ini, harus tepat dan berimbang karena sensitivitas instrumen tersebut sangat cepat direspon oleh masyarakat dan pelaku perekonomian, artinya jika penerapan suku bunga terlalu ketat atau tinggi dan tidak sesuai perkembangan perekonomian berdampak buruk pada aktivitas perekonomian.
- b. Sistem keuangan di Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan, karena hal itu, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan regulasi terhadap perbankan di Indonesia. Beberapa instrumen yang digunakan dalam pengawasan dan regulasi perbankan adalah disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan masyarakat terhadap perbankan secara khusus. Karena kegagalan pada sistem keuangan dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian.
- c. Telah banyak berkembang jasa-jasa pembayaran di Indonesia, mendorong Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, hal tersebut untuk mencegah

terjadinya gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran yang dapat menimbulkan resiko serta mengganggu kelancaran sistem pembayaran secara menyeluruh. Mekanisme yang dikembangkan pada sistem pembayaran adalah dengan menerapkan sistem pembayaran *real time* atau dikenal dengan sistem RTGS (*real time gross settlement*) yang dapat meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran.

- d. Melalui riset dan pemantauan. Pemantauan yang digunakan adalah dengan pendekatan *macroprudential*, dengan pendekatan tersebut Bank Indonesia dapat mendeteksi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sektor keuangan dan mampu mendeteksi potensi guncangan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan.
- e. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR mencakup ketersediaan likuiditas baik saat kondisi normal maupun saat krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik setelah melalui pertimbangan dan persyaratan yang ketat untuk menghindari moral hazard.

B. Otoritas Jasa Keuangan

Secara garis besar, lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank memiliki fungsi yang berbeda dengan lembaga keuangan bank, seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun dll. Perbedaannya dengan lembaga keuangan bank adalah bahwa lembaga keuangan non-bank tidak menerima simpanan dari masyarakat baik dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, namun memperoleh sumber pendanaannya dari modal, pinjaman, iuran atau premi yang dibayar oleh nasabahnya, dan penerbitan surat-surat berharga baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan lembaga keuangan bank sebagaimana diatur dalam undang-undang adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dalam beberapa tahun terakhir, fungsi dan kegiatan lembaga keuangan menjadi semakin kompleks, khususnya pada lembaga keuangan bank. Apabila suatu sistem perbankan dalam kondisi tidak sehat, maka tugas bank sebagai lembaga intermediasi akan terganggu, sehingga alokasi modal akan terhambat dan pembiayaan pada sektor-sektor yang produktif menjadi sangat terbatas. Sistem perbankan yang tidak sehat juga akan menyebabkan lalu lintas pembayaran menjadi tidak efisien dan lebih buruk lagi dapat menyebabkan keterpurukan dari efektivitas kebijakan moneter. Selain dari pada itu, jika kondisi suatu bank tidak sehat dapat menular ke perbankan yang lainnya (contagion effect) dan jika hal ini terjadi secara masal akan terjadi suatu krisis yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan khususnya bank. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan dari bank maka diperlukan pengaturan dan pengawasan bank untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

Berdasarkan undang-undang No. 21 Tahun 2011 dengan terbentuknya lembaga negara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan UU tersebut OJK mempunyai wewenang terhadap industri keuangan bank dan non-bank. Tujuan pembentukan OJK pada pasal 4 UU No. 21 Tahun 2011 adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK terkait pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank meliputi

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
- b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi; likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank.
- d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi; manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan untuk terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank.

Krisis perekonomian yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Pada saat itu terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan bank dan terjadi bank *rush*, masyarakat berbondong-bondong mengambil uang yang ada di bank sehingga terjadi resiko sistemik. Rekapitalisasi saat itu membutuhkan lebih 30% dari PDB atau sangat mahal untuk membiayai penanganan bank yang tidak sehat. Untuk menjaga sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terdapat enam pilar besar, yaitu;

- a. Program penguatan struktur perbankan nasional
- b. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan
- c. Program peningkatan fungsi pengawasan
- d. Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan
- e. Program pengembangan infrastruktur perbankan, dan
- f. Program peningkatan perlindungan nasabah

1. Mengenal Kebijakan Macroprudential

Urgensi atas penguatan kerangka Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) oleh bank sentral mensyaratkan perlunya infrastruktur keuangan yang kuat dengan fungsi pemeriksaan dan pengawasan yang memadai untuk mendukung integrasi pasar domestik pada sistem keuangan yang semakin kompleks. Secara konseptual, kebijakan makroprudensial adalah instrumen regulasi prudensial yang ditujukan

untuk mendorong stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan kesehatan lembaga keuangan secara individu. Secara analogi, kebijakan mikroprudensial adalah instrumen regulasi prudensial yang ditujukan untuk menjaga kesehatan lembaga keuangan secara individu. “Kebijakan makroprudensial berupaya mengembangkan, mengawasi, dan memberikan respon kebijakan yang tepat terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sistem keuangan dan untuk meredam resiko sistemik yang menyebar luas melalui sistem keuangan” (The G-30). Dengan demikian, kebijakan makroprudensial digunakan untuk mencegah terjadinya siklus *boom-bust supply* kredit dan likuiditas yang dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian. Dengan peran menjaga stabilitas *supply* intermediasi keuangan ini, kebijakan makroprudensial mempunyai peran yang menunjang tujuan kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga dan output.

Bank International Settlement (BIS) di Swiss, mendefinisikan kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan yang bertujuan untuk membatasi resiko dan biaya dari krisis sistemik (Galati G dan Richhild M. 2011). Sementara European Sistemik Risk Board (ESRB), yaitu badan yang memiliki misi mengawasi sistem keuangan Eropa, serta mencegah dan membatasi terjadinya resiko sistemik di sistem keuangan Eropa, mendefinisikan kebijakan makroprudensial sebagai kebijakan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk dengan memperkuat ketahanan sistem keuangan dan mengurangi penumpukan resiko sistemik, sehingga memastikan keberlanjutan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi (ESRB, 2013). Penjelasan serupa juga disampaikan oleh International Monetary Funds (IMF), yang mendefinisikan makroprudensial sebagai kebijakan yang memiliki tujuan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan resiko sistemik (IMF, 2011).

Merujuk pada beberapa definisi diatas, setidaknya terdapat 3 kalimat kunci untuk menggambarkan kebijakan makroprudensial yakni diterapkan dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan, diterapkan dengan berorientasi pada sistem keuangan secara keseluruhan (*system-wide perspectives*), dan diterapkan melalui upaya membatasi terbangunnya (*build-up*) resiko sistemik. Secara sederhana

kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan guna menjaga keseimbangan antara tujuan makroekonomi dan mikroekonomi.

Ada dua dimensi penting dari kebijakan makroprudensial. Pertama adalah dimensi waktu (*time series*), yaitu kebijakan makroprudensial ditujukan untuk menekan resiko terjadinya *prosiklikalitas* yang berlebihan dalam sistem keuangan. Dalam konteks ini, kebijakan makroprudensial harus didesain sedemikian rupa hingga mampu menghilangkan atau paling tidak memitigasi *prosiklikalitas*. Prinsipnya adalah bagaimana mendorong institusi keuangan untuk mempersiapkan bantalan (*buffer*) yang cukup di saat perekonomian sedang baik, yaitu ketika ketidakseimbangan dalam sistem keuangan umumnya terjadi, dan bagaimana menggunakan bantalan tersebut ketika perekonomian sedang memburuk.

Kedua adalah dimensi antarsektor (*cross-section*). Sejarah krisis keuangan menunjukkan bahwa sebagian besar krisis yang terjadi di dunia bukan berasal dari kegagalan individu bank, namun kegagalan individu bank yang menular dan berdampak pada bank lainnya (*contagion effect*) sehingga akan memperlemah kinerja lembaga keuangan seluruhnya, yang akhirnya memperburuk kondisi perekonomian domestik. Ketidakseimbangan secara makro-keuangan telah menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dan pengawasan terhadap setiap bank sangat perlu diterapkan, karena kinerja lembaga keuangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian secara menyeluruh pada suatu negara.

Dalam perkembangannya, sejalan dengan perubahan tatanan sektor keuangan, terutama pasca krisis keuangan global 2008, banyak bank sentral menerapkan instrumen kebijakan makroprudensial dalam artian yang lebih luas. Dalam kaitan ini, beberapa instrumen yang sebelumnya lebih dikenal sebagai instrumen moneter (seperti *reserve requirements*) juga digunakan untuk mencegah resiko sistemik dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam siklus kegiatan ekonomi, khususnya untuk sektor-sektor ekonomi tertentu. Instrumen kebijakan tersebut juga tidak difokuskan pada upaya untuk menangani resiko yang terjadi pada individual bank. Dengan demikian, instrumen kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai instrumen kebijakan dalam perspektif 'makroprudensial' yang lebih luas. Beberapa contoh

instrumen kebijakan makroprudensial yang umumnya digunakan di banyak negara dalam Tabel 9.2.1 sebagai berikut.

Permasalahan	Instrumen
Leverage (Potensi Prosiklialitas)	Penyesuaian bobot resiko dalam aturan permodalan
	Penerapan rasio permodalan terhadap aktiva tertimbang menurut resiko
Kredit (keterkaitan dan karakteristik debitur, tekanan pada stabilitas makro, interconnectedness)	Penerapan <i>countercyclical provisioning</i>
	Pembatasan <i>loan to value ratio</i> untuk sektor-sektor tertentu
	Pembatasan kredit ke sektor-sektor tertentu
	Perubahan <i>reserve requirement</i> , secara <i>accross the board</i> atau target tertentu
Likuiditas (potensi resiko pada aspek tertentu)	Penerapan <i>buffer</i> yang digunakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan yang beresiko
	Penerapan <i>loan to deposit ratio</i>

Sumber: Borio (2009)

Selain tujuan (sasaran) kebijakan yang telah ditetapkan beserta instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan terkait, salah satu aspek penting lain yang perlu dirumuskan dalam kerangka kerja kebijakan makroprudensial adalah respons kebijakan, dalam merumuskan respons kebijakan makroprudensial, salah satu isu yang penting adalah apakah respons akan menggunakan sebuah kaidah baku atau diskresi (*rule of discretion*). Seperti halnya dalam kebijakan moneter, selalu ada *trade-off* atau kelebihan dan kekurangan antara menggunakan *rule* dan *discretion*. *Rule* memberikan kepastian kepada pelaku pasar dan kredibilitas kepada bank sentral, namun, *rule* yang terlalu kaku menutup fleksibilitas untuk merespons perubahan-perubahan struktural maupun ketidakpastian yang sering terjadi dalam pasar keuangan. Mengingat adanya kelebihan dan kelemahan, baik dari *rule* maupun *discretion*, model pengambilan keputusan kombinasi *rule* dan *discretion* cenderung menjadi pilihan.

C. Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah melumpuhkan aktivitas perekonomian dalam negeri, ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan

menurun drastis. Berbagai langkah ditempuh oleh Pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan diantaranya adalah dengan memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) dikuatkan dengan Keppres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keppres No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Pada saat itu, pelaksanaan dan pengawasan terhadap blanket guarantee masih sangat minim sehingga masih banyak terjadi moral hazard baik dari pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi maraknya perilaku moral hazard dan agar tercipta rasa aman bagi nasabah serta untuk mendukung penguatan stabilitas sistem perbankan, maka dibuatlah sistem penjaminan yang terbatas dan terkontrol, hal ini dikuatkan dengan diterbitkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana dana masyarakat. Berjalannya waktu terdapat perubahan menjadi UU No. 24 bahwa Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya dibentuk.

Sesuai dengan UU No. 24 telah diatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai berikut:

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan
- d. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);

- a. Menetapkan dan memungut premi pinjaman
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada poin d
- f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, dan
- i. Menjatuhkan sanksi administratif

Latihan Soal

1. Jelaskan fungsi utama bank sentral yang anda ketahui, terutama sebagai fiscal agent of government dan sebagai banker of bank atau sebagai lender of the last resort.
2. Jelaskan tujuan bank sentral yang anda ketahui, dan jelaskan pula tugas Bank Indonesia sebagai menetapkan kebijakan moneter.
3. Apa yang anda ketahui dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan apa fungsi dari OJK itu sendiri.
4. Jelaskan 5 aspek yang menjelaskan tentang independent bank sentral yang anda ketahui.
5. Apa yang anda ketahui dengan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan apa tugas dari LPS itu sendiri.

BAB 11

PENGANTAR KURVA IS-LM

Teori-teori makroekonomi sintesis Klasik-Keynesian memadukan ide-ide aliran pemikiran Klasik dengan Keynes, teori-teori tersebut amat banyak dan bervariasi. Salah satu sintesis yang paling terkenal dan banyak digunakan sebagai alat analisis adalah model IS-LM. Model tersebut menjelaskan bahwa kondisi keseimbangan ekonomi akan tercapai bila pasar barang-jas dan pasar uang secara simultan berada dalam keadaan keseimbangan.

Pengembangan pada model IS-LM berdasarkan pada asumsi-asumsi yang diajukan oleh Klasik dan Keynes. Asumsi Klasik yang mendasari model IS-LM adalah bahwa dalam kondisi apapun, pasar akan menemukan keseimbangannya sendiri. Sedangkan Asumsi Keynes yang mendasari asumsi pada model IS-LM adalah bahwa uang digunakan sebagai alat transaksi dan spekulasi. Lebih rincinya adalah sebagai berikut.

1. Pasar akan selalu berada dalam keseimbangan. Permintaan sama dengan penawaran ($S=D$)
2. Fungsi uang sebagai alat transaksi dan spekulasi. $M^D = M_t + M_{sp}$
3. Dimana M^D = total permintaan uang

4. M_t = permintaan uang untuk transaksi
5. M_{sp} = permintaan uang untuk spekulasi
6. Perekonomian adalah perekonomian tertutup. $Y = C + S$.
7. Model komparatif statis. Analisis yang dilakukan adalah perubahan dari satu keseimbangan ke kondisi keseimbangan lainnya.

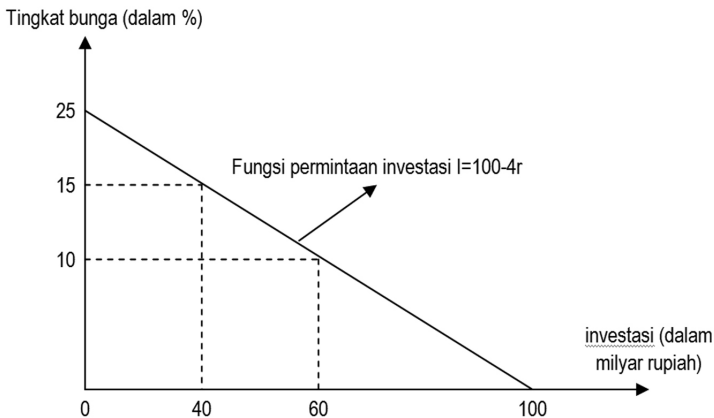
A. Keseimbangan di Pasar Barang

Pasar barang adalah pasar dimana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu.

Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri.

Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan umum dapat terjadi apabila pasar barang dan pasar uang ada di dalam keseimbangan. Dalam keadaan keseimbangan umum ini besarnya pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (i) yang terjadi akan mencerminkan pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (i) yang seimbang baik di pasar barang maupun di pasar uang. Namun, dalam ekonomi Islam, sistem bunga dihapuskan.

Kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS juga menyatakan “investasi” dan “tabungan”.



Gambar 14.1 Fungsi permintaan investasi

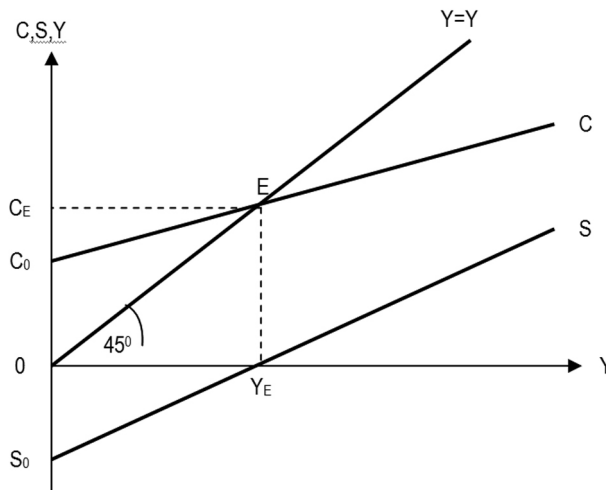
Perhatikan contoh gambar 14.1. pada gambar tersebut garis II merupakan kurva permintaan investasi agregatif dengan persamaan fungsi $I = 100 - 4r$, dimana I menunjukkan nilai investasi per tahun dinyatakan dalam milyar rupiah misalnya, dan r merupakan tingkat bunga dinyatakan dalam persentase. Dengan menggunakan contoh tersebut, maka pada tingkat bunga setinggi 15% besarnya investasi dalam perekonomian adalah sejumlah Rp 40 miliar. Apabila tingkat bunga menurun menjadi 10%, maka besarnya investasi meningkat menjadi Rp60 miliar.

Kalau misalnya sebuah perekonomian mempunyai fungsi konsumsi dengan persamaan fungsi:

$$C \text{ (dalam milyar rupiah)} = 80 + 0,8Y$$

Maka perekonomian tersebut mempunyai persamaan fungsi tabungan:

$$S \text{ (dalam milyar rupiah)} = -80 + 0,8Y$$



Gambar 14.2. Fungsi tabungan dan fungsi konsumsi

Untuk lebih jelasnya, perhatikan saja contoh berikut. Sebuah perekonomian mempunyai fungsi konsumsi dan fungsi investasi dengan persamaan-persamaan fungsi sebagai berikut.

Fungsi Konsumsi (dalam milyar rupiah):

$$C = 80 + 0,8Y$$

Fungsi Pengeluaran Investasi (dalam milyar rupiah):

$$I = 100 - 4r$$

Berdasarkan persamaan fungsi konsumsi dan fungsi investasi tersebut, fungsi IS perekonomian dapat kita temukan.

1. Menggunakan rumus I

$$Y = C + I$$

$$Y = 80 + 0,8Y + 100 - 4r$$

$$Y - 0,8Y = 80 + 100 - 4r$$

$$0,2 Y = 180 - 4r$$

$$Y = 900 - 20r$$

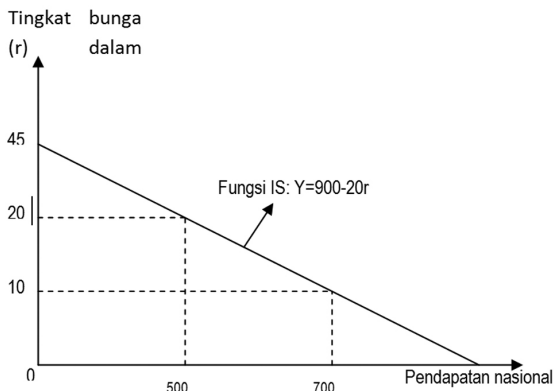
2. Menggunakan rumus II

$$Y = \frac{C_0 + I_0 + er}{1 - c}$$

$$Y = \frac{80 + 100 + (-4r)}{1 - 0,8} = \frac{180}{0,2} - \frac{4r}{0,2}$$

$$Y = 900 - 20r$$

Secara grafis fungsi IS yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini.

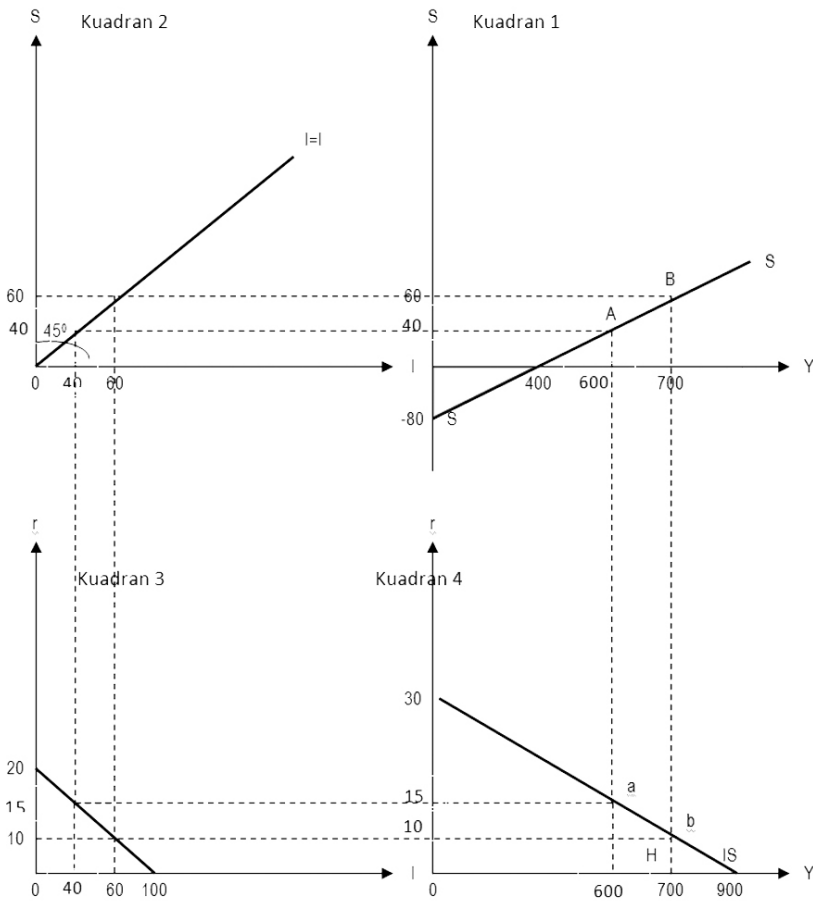


Gambar 14.3. Kurva IS

Kurva IS pada gambar 14.3, menunjukkan perubahan keseimbangan kurva IS. Penurunan yang terjadi disebabkan karena perubahan

bunga yang ditetapkan. Pada saat tingkat bunga sebesar 10%, maka keseimbangan pendapatan nasional adalah sebesar Rp. 700 milyar. Perubahan pada tingkat bunga akan berdampak pada pendapatan nasionalnya. Hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional mempunyai hubungan yang negatif, pada saat tingkat bunga meningkat, maka pendapatan nasional akan cenderung menurun dan begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya dengan cara penurunan kurva IS dengan 4 kuadran digambarkan berikut ini.

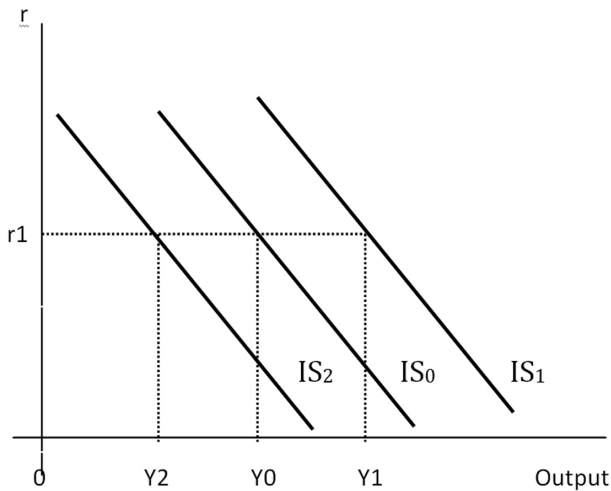


Gambar 14.4 Menurunkan kurva IS dengan metode grafik

B. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Keseimbangan Pasar Barang-Jasa

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut.

1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
2. Pola persebaran sumber daya
3. Distribusi pendapatan



Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif (fiskal ekspansif) menyebabkan kurva IS bergeser kanan. Pada tingkat bunga yang sama (r_1), pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y_0 ke Y_1 . Sebaliknya dampaknya anggaran deficit (fiskal kontraktif) menyebabkan kurva bergeser ke kiri.

Tabel 14.1 Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perubahan Tingkat Bunga

Dampak Kebijakan Fiskal			
Kebijakan	Pergeseran Kurva IS	Perubahan Output	Perubahan Tingkat Suku Bunga
Menaikan Pajak	Kiri	Kebawah	Kebawah
Menurunkan Pajak	Kanan	Keatas	Keatas
Meningkatkan Pengeluaran Pemerintah	Kanan	Keatas	Keatas
Menurunkan Pengeluaran Pemerintah	Kiri	Kebawah	Kebawah

C. Analisis Kesimbangan di Pasar Uang

Untuk memudahkan dalam memahami hubungan antara permintaan uang sebagai transaksi dan untuk berjaga-jaga dengan menotasikan kedua motif permintaan akan uang dengan L_1 , contoh sebagai berikut:

$$L_T = 0,40Y$$

$$L_J = 0,10Y$$

Di mana:

L_T : permintaan uang untuk transaksi

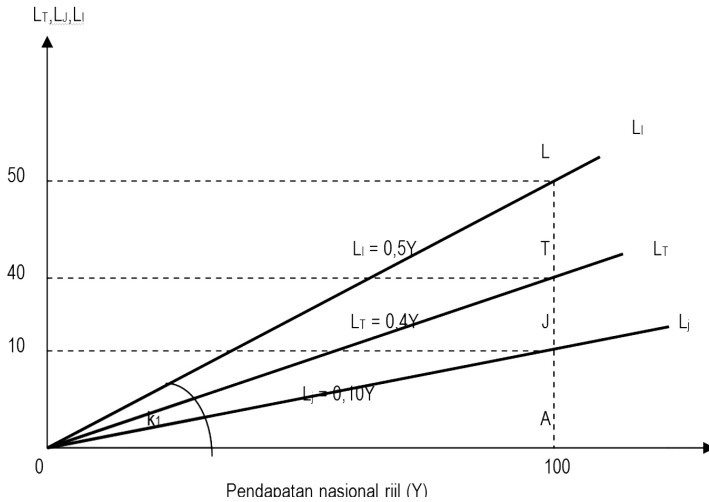
L_J : permintaan uang untuk berjaga-jaga

Adapun fungsi $L_1 = L_T + L_J$ atau hasil dari penjumlahan kurva permintaan akan uang untuk motif transaksi dengan motif untuk berjaga-jaga, maka dapat kita tulis:

$$L_1 = L_T + L_J = 0,40Y + 0,10Y = 0,5Y.$$

Jadi singkatnya:

$$L_1 = 0$$



Gambar 14.5 Hubungan permintaan akan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga dengan permintaan uang L_1

Permintaan akan uang dengan motif spekulasi diinotasikan dengan L_2 , permintaan uang dengan motif spekulasi sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga (r), kedua variabel tersebut mempunyai hubungan atau slope yang negatif. Semakin tinggi tingkat bunga maka akan membuat permintaan uang untuk spekulasi menurun.

Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa jumlah permintaan akan uang selalu sama dengan jumlah penawarannya.

Secara matematik dapat dituliskan:

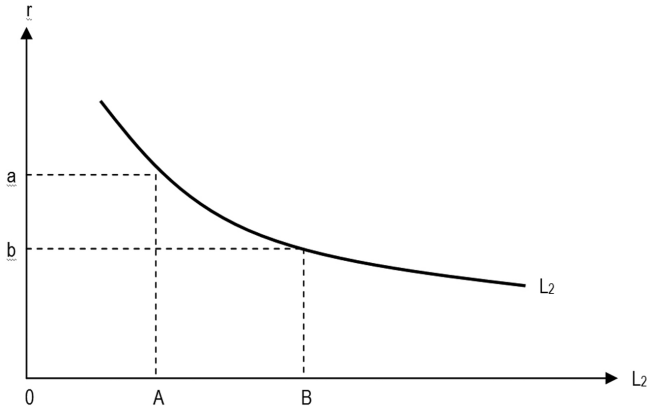
$$L = M$$

atau:

$$L_1(Y) + L_2(r) = M$$

atau:

$$L(Y,r) = M$$



Gambar 14.6. Kurva permintaan uang untuk spekulasi

Permintaan akan uang dan penawaran akan uang mempunyai persamaan fungsi sebagai berikut.

Jumlah uang yang beredar:

$$M = \bar{M}$$

Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga :

$$L_1 = k_1 Y$$

Permintaan uang untuk spekulasi:

$$L_2 = k_2 r + L_2^0$$

Maka:

$$M = k_1 Y + k_2 r + L_2^0$$

Kalau persamaan di atas kita selesaikan untuk variabel Y, kita akan menemukan persamaan fungsi kurva LM:

$$k_1 Y = \bar{M} - L_2^0 - k_2 r$$

$$= \frac{\bar{M}}{k_1} - \frac{L_2^0}{k_1} - \frac{k_2}{k_1} r$$

Persamaan di atas merupakan persamaan fungsi kurva LM. kurva LM dari persamaan di atas, berlaku selama permintaan akan uang berbentuk garis tegak atau lurus. Untuk memudahkan, mari kita lakukan analisis dengan contoh sebagai berikut.

Sebuah perekonomian mempunyai data sebagai berikut.

Jumlah uang yang beredar : $\bar{M} = 500$ milyar rupiah

Permintaan uang untuk transaksi
(dalam milyar rupiah) : $L_T = 0,40Y$

Permintaan uang untuk berjaga-jaga
(dalam milyar rupiah) : $L_J = 0,10Y$

Permintaan uang untuk spekulasi
(dalam milyar rupiah) : $L_2 = 200 - 5r$

Berdasarkan data di atas, dengan menggunakan persamaan yang telah ada, maka kita dapat menemukan persamaan fungsi kurva LM.

Pertama-tama kita cari persamaan kurva L_1 .

Kurva L_1 :

$$L_1 = L_T - L_J = 0,40Y + 0,10Y$$

$$L_1 = 0,5Y$$

Dengan demikian, maka:

1. Dengan menggunakan rumus 1

$$L_1Y + L_2Y = \bar{M}$$

$$0,5Y + 200 - 5r = 500$$

$$0,5Y = 300 + 5r$$

$$Y = 600 + 10r$$

2. Dengan menggunakan rumus 2

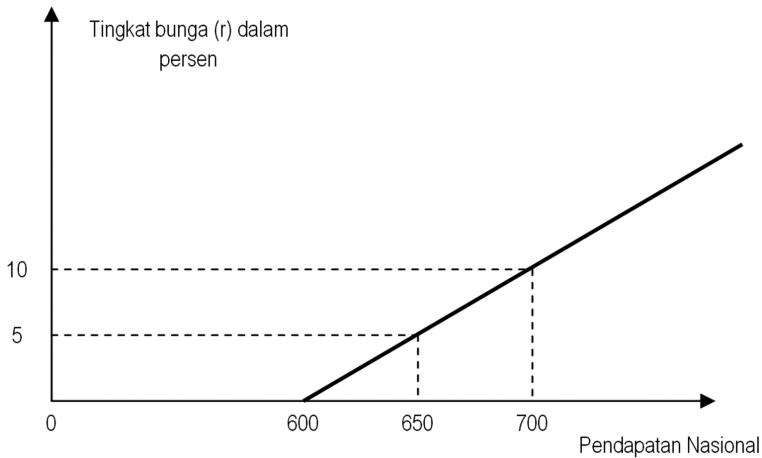
$$Y = \frac{\bar{M}}{k_1} - \frac{L_2^0}{k_1} - \frac{k_2}{k_1}r$$

$$Y = \frac{500}{0,5} - \frac{200}{0,5} - \frac{(-5)}{0,5}r$$

$$Y = 1000 - 400 + 10r$$

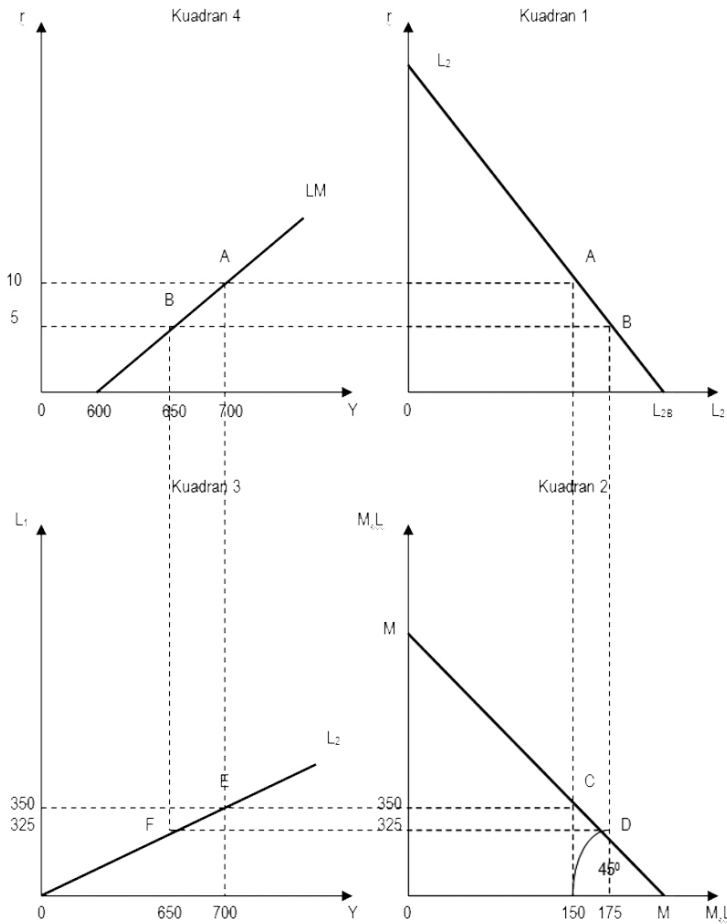
$$Y = 600 + 10r$$

Secara grafis fungsi LM yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan pendapatan nasional. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 14.7. Kurva LM

Gambar 14.8 merupakan kurva LM dari motif akan permintaan uang untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi. Saat tingkat bunga berada pada angka 5%, maka pendapatan nasional sebesar Rp 650 milyar, begitu tingkat bunga dinaikkan menjadi 10% maka keseimbangan pendapatan nasional berkisar pada Rp 700 milyar yang terlihat pada kurva keseimbangan LM. Hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan nasional mempunyai hubungan atau slope yang positif. Ketika tingkat suku bunga meningkat, maka pendapatan nasional akan meningkat, begitu juga sebaliknya.



Gambar 14.8 Menurunkan kurva LM

D. Strategi dan Kebijakan Untuk Menggeser LM

1. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk memengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga, dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat.

Salah satu pengeluaran agregat adalah penanaman modal (investasi) oleh perusahaan-perusahaan, tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi penanaman modal dan jika tingkat bunga rendah akan menambah penanaman modal. Jadi tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar, sehingga dapat menekan laju inflasi (laju kenaikan harga).

Kebijakan moneter merupakan alat untuk meredam inflasi (kenaikan harga) tetapi tidak dapat ditekan (didorong) untuk mengatasi resesi.

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut.

- a. Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.
- b. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri.
- c. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.
- d. Mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga barang secara umum).

3. Piranti Kebijakan Moneter

Tujuan pemerintah memberlakukan kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu

a. Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*)

Ketika perekonomian sedang lesu atau mengalami depresi, maka pemerintah menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan menambahkan jumlah uang beredar, tujuan dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pada peningkatan produksi, sehingga banyak menyerap tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (*easy money policy*)

b. Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*)

Atau disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*). Penerapan kebijakan tersebut ketika perekonomian tumbuh diatas tingkat produksinya, yang dapat menyebabkan inflasi, sehingga Pemerintah mengurangi jumlah uang beredar agar tingkat inflasi terkendali.

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Operasi pasar terbuka adalah kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh bank sentral. OPT diterapkan untuk mempengaruhi likuiditas rupiah dipasar uang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Penjualan surat berharga yang dilakukan oleh bank sentral akan mempunyai dampak kontraksi moneter sehingga pengurangan alat-alat likuid bank akan memperkecil kemampuan bank-bank dalam memberikan pinjaman ke kreditur. Sebaliknya jika bank sentral membeli surat berharga menunjukkan kebijakan ekspansi moneter karena alat-alat likuid bank meningkat dan bank dapat meningkatkan kemampuannya dalam memberikan pinjaman ke nasabah.

2. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Fasilitas diskonto adalah suatu kebijakan moneter dari bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui penetapan diskonto pinjaman bank sentral kepada bank-bank umum. Penetapan diskonto yang tinggi akan mempengaruhi bank-bank umum dengan mengurangi permintaan kredit ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan turun, ketika penetapan diskonto rendah, mendorong bank-bank umum untuk meningkatkan permintaan pinjaman ke bank sentral dan dapat meningkatkan jumlah uang beredar.

3. Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

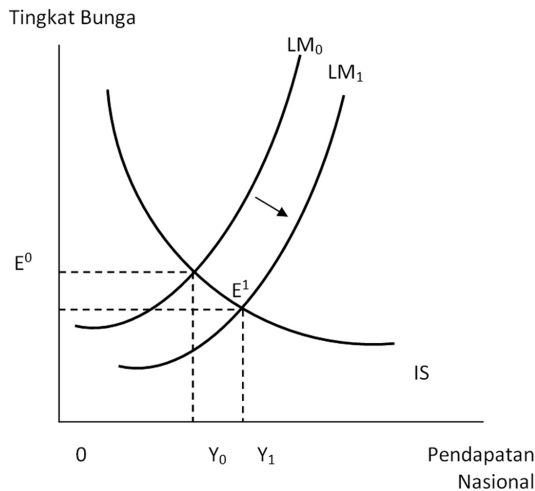
Reserve Requirement atau disingkat RR adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank umum untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid (*reserve*) sebesar presentase tertentu dari kewajiban yang ditetapkan. Semakin kecil presentasinya maka semakin besar kemampuan bank memanfaatkan reserve-nya dengan

bentuk memberikan pinjaman ke masyarakat cukup besar, begitu juga sebaliknya, jika semakin tinggi persentasenya maka semakin kecil kemampuan bank dalam memberikan pinjaman ke masyarakat.

4. Imbauan Moral (*Moral Persuasion*)

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah.



Gambar 14.9 Perubahan JUB akan menggeser Kurva LM

Ekspansi moneter akan mendorong terjadinya peningkatan output dan penurunan tingkat suku bunga, dan sebaliknya kontraksi moneter akan mendorong terjadinya penurunan output dan meningkatkan tingkat suku bunga.

Tabel 14.2 Perubahan JUB terhadap Tingkat Bunga

Dampak Kebijakan Moneter			
Kebijakan	Pergeseran Kurva LM	Perubahan Output	Perubahan Tingkat Suku Bunga
Menaikan Jumlah Uang Beredar	Kebawah	Keatas	Kebawah
Menurunkan Jumlah Uang Beredar	Keatas	Kebawah	Keatas

E. Keseimbangan di Pasar Barang dan Pasar Uang

Perbedaan kurva keseimbangan di pasar barang dan pasar uang adalah hubungannya yang berbeda terhadap pendapatan nasional. Kurva IS memiliki hubungan yang negatif antara tingkat bunga dan pendapatan nasional, sedangkan pada kurva LM antara tingkat bunga dan pendapatan nasional memiliki slope yang positif. Perpotongan antara kurva IS dan kurva LM akan membentuk keseimbangan IS-LM, penghubung antara tingkat dan pendapatan nasional.

Titik E pada gambar 14.9 merupakan titik keseimbangan umum gabungan antara pasar barang dan pasar uang. Saat pada titik keseimbangan umum, maka perekonomian domestik seluruhnya berada dalam keadaan keseimbangan.

Secara singkat di bawah ini ditunjukkan nilai-nilai keseimbangan variabel-variabel ekonomi endogen tersebut:

OY^* : pendapatan nasional keseimbangan

Or^* : tingkat bunga keseimbangan

OI^* : pengeluaran investasi keseimbangan

OS^* : penabungan keseimbangan, OS^* besarnya sama dengan OI^*

OL_T^* : jumlah uang yang beredar dalam perekonomian yang dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga

Dengan menggunakan ilustrasi yang sama dengan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

$$C = 80 + 0,8Y$$

$$I = 100 - 4r$$

Diperoleh persamaan IS

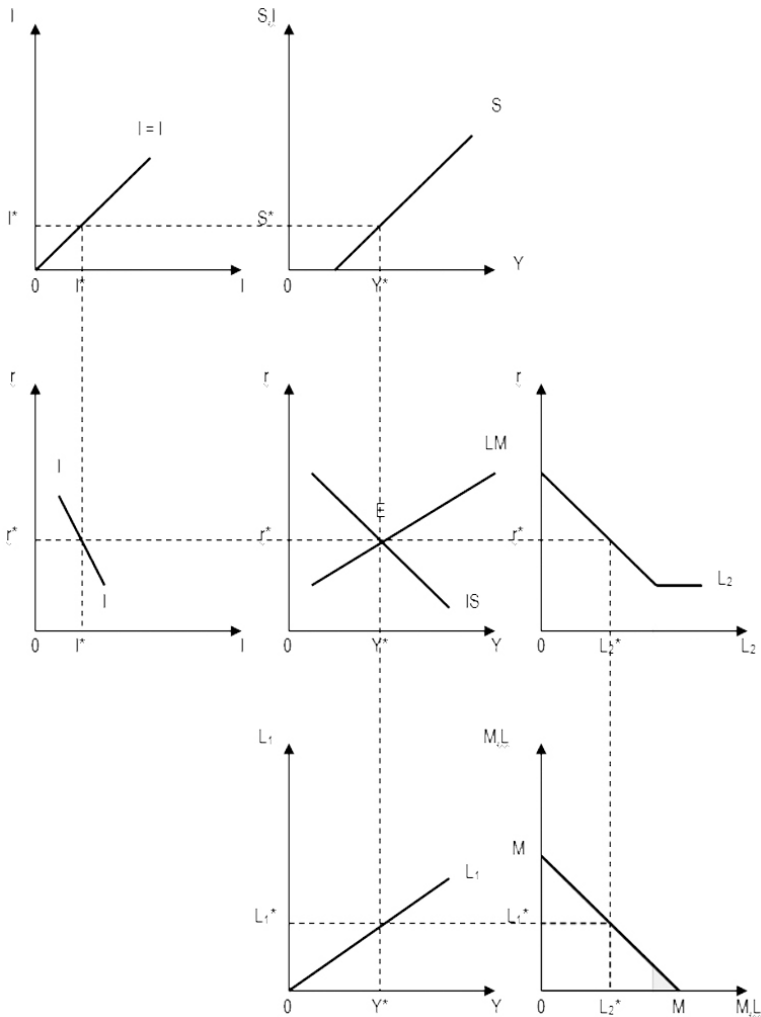
$$Y = C + I$$

$$Y = 80 + 0,8Y + 100 - 4r$$

$$Y - 0,8Y = 80 + 100 - 4r$$

$$0,2 Y = 180 - 4r$$

$$Y = 900 - 20r \rightarrow \text{Persamaan IS}$$



Gambar 14.10 Keseimbangan IS-LM Kurva L_1 .

$$L_1 = L_T - L_j = 0,40Y + 0,10Y$$

$$L_1 = 0,5Y$$

Diperoleh persamaan LM

$$L_1Y + L_2Y = \overline{M}$$

$$0,5Y + 200 - 5r = 500$$

$$0,5Y = 300 + 5r$$

$$Y = 600 + 10r \rightarrow \text{Persamaan LM}$$

Kita menemukan nilai-nilai keseimbangan variabel-variabel endogen di bawah ini:

$$\text{IS} : Y = 900 - 20r$$

$$\text{LM} : Y = 600 + 10r$$

Keseimbangan terjadi apabila IS = LM

Sehingga

$$\text{IS} = \text{LM}$$

$$900 - 20r = 600 + 10r$$

$$20r + 10r = 900 - 600$$

$$30r = 300$$

$$\text{Didapatkan } r = 300/30 = 10 \text{ atau } 10\%$$

Kalau kita perhatikan, keseimbangan pasar komoditi (IS) pada hasil perhitungan di atas, yaitu $Y = 900 - 20(10) = 700$ dan keseimbangan di pasar uang (LM) yaitu $Y = 600 + 10(10) = 700$. Sehingga pada waktu tingkat bunga sama dengan 10 persen, maka IS akan sama dengan LM.

Dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut mempunyai makna bahwa semua hasil perhitungan betul dan semua variabel dalam keadaan keseimbangan umum.

Latihan Soal

1. Diketahui data makroekonomi suatu negara sebagai berikut :

$$\text{Fungsi konsumsi} : C = C_0 + b Y$$

$$\text{Fungsi Investasi} : I = I_0 - a r$$

$$\text{Penawaran Uang} : M_s = M_0$$

$$\text{Permintaan uang untuk transaksi} : M_t = t Y$$

Permintaan uang untuk berjaga-jaga : $M_j = j Y$

Permintaan uang untuk spekulasi : $M_a = M_{ao} - m r$

Pada pendapatan 0, besarnya konsumsi rata-rata sebesar 85 satuan, sedangkan setiap tambahan pendapatan sebesar 100 satuan, maka tambahan tabungan sebesar 20 satuan. Sedangkan $I = 65 - 59,9 r$, $M_t = 0,35 Y$, $M_j = 0,05 Y$, $M_s = 300$ dan $M_a = 130 - 400 r$.

Pertanyaan:

- a. Turunkan persamaan IS dan LM!
 - b. Berapa besarnya tingkat bunga dan tingkat pendapatan keseimbangan?
 - c. Jika pemerintah melakukan kebijakan uang ketat, yaitu dengan menurunkan penawaran uang sebesar 5 persen, berapa besarnya tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional keseimbangan yang baru?
 - d. Dari jawaban b dan c, apa yang dapat saudara simpulkan dari hasil tersebut, jelaskan!
2. Diketahui data makroekonomi suatu negara sebagai berikut:

Fungsi konsumsi : $C = C_o + b Y$

Fungsi Investasi : $I = I_o - a r$

Penawaran Uang : $M_s = M_o$

Permintaan uang untuk transaksi : $M_t = t Y$

Permintaan uang untuk berjaga-jaga : $M_j = j Y$

Permintaan uang untuk spekulasi : $M_a = M_{ao} - m r$

Pada pendapatan 0, besarnya tabungan rata-rata sebesar -75 satuan, sedangkan setiap tambahan pendapatan sebesar 100 satuan, maka tambahan konsumsi sebesar 80 satuan. Sedangkan $r = 1,25 - 0,016 I$, $M_t = 0,35 Y$, $j = 0,05 Y$, $M_s = 300$ dan $M_a = 130 - 400 r$.

Pertanyaan:

- a. Turunkan persamaan IS dan LM!
- b. Berapa besarnya tingkat bunga dan tingkat pendapatan keseimbangan?
- c. Jika pemerintah melakukan kebijakan uang ketat, yaitu dengan menurunkan penawaran uang sebesar 2 persen, berapa

besarnya tingkat bunga dan tingkat pendapatan nasional keseimbangan yang baru?

- d. Dari jawaban b dan c, apa yang dapat saudara simpulkan dari hasil tersebut, jelaskan!



BAB 12

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Pertumbuhan ekonomi

Pada dasarnya, masih banyak perdebatan dari kalangan ekonom dalam mengukur suatu aktivitas perekonomian yang berdampak secara langsung dan benar-benar menggambarkan aktivitas perekonomian secara riil. Banyak ekonom yang mengukur hal tersebut dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, beberapa ekonom lainnya ada yang memasukkan unsur lingkungan sebagai pengukuran aktivitas perekonomian dan menyebutnya dengan istilah green economy dan kalangan lainnya ada yang menggunakan tingkat kesejahteraan dan pendapatan riil masyarakat sebagai ukuran aktivitas perekonomian.

Perdebatan dari kalangan ekonom tersebut, juga telah membentuk khazanah dalam ruang lingkup ekonomi menjadi sangat luas dan sangat bermanfaat untuk kita telaah dan pelajari secara seksama, sejatinya perdebatan tentang pertumbuhan ekonomi sendiri sudah muncul lama dan menghasilkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada aliran yang diikuti. Pertumbuhan ekonomi adalah masalah ekonomi jangka panjang, hal ini menyangkut tentang kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam dan proses terjadinya output sehingga

menjadi pendapatan bagi masyarakat. Proses yang terjadi dalam aktivitas ekonomi akan berlangsung secara terus menerus. Proses tersebut akan menghasilkan penambahan pada jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur dan penambahan produksi dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Pengukuran tersebut akan sangat sukar ditentukan untuk menunjukkan hasil pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai. Oleh sebab itu, dalam analisis makroekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dengan perkembangan atau penambahan pendapatan nasional riil yang dicapai.

Secara lebih jelas, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output percapita dalam jangka panjang. Definisi tersebut menekankan akan tiga hal, yaitu proses, output percapita, dan jangka panjang. Definisi tersebut juga menyiratkan bahwa aktivitas perekonomian berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Perhitungan output percapita menggunakan pendekatan GDP total dibagi dengan jumlah penduduk, sehingga pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan output atau PDB percapita dapat menggambarkan kenaikan taraf hidup perindividu dalam suatu negara. Telah banyak teori yang dikembangkan oleh ekonom pada zaman dahulu terkait faktor-faktor apa yang dapat menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.

Smith membagi pertumbuhan ekonomi menjadi dua aspek besar, yaitu pertumbuhan output (GDP) dan pertumbuhan penduduk. Konsep Smith dalam pertumbuhan output (GDP) terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: a) sumber daya alam yang tersedia pada suatu negara, b) sumber daya manusia, dan c) stok kapital. Menurut Smith bahwa sumber daya alam merupakan faktor yang sangat mendasar dari kegiatan produksi, sehingga dua unsur lain yaitu sumber daya manusia dan stok kapital yang dapat menentukan besarnya output masyarakat dari waktu ke waktu. Smith juga menekankan ketika terjadi kenaikan pada output yang berlangsung secara terus menerus, menunjukkan bahwa sumber daya alam yang tersedia telah digunakan sepenuhnya (*usefull*) dan pada tahap tersebut sumber-sumber daya alam akan membatasi pertumbuhan output.

Pendapat Smith bisa kita jadikan contoh bahwa membangun model atau mengukur pertumbuhan ekonomi tidak semudah menghitung pendapatan akhir yang didapat oleh suatu negara, namun aktivitas perekonomian akan terus berproses dan dapat meningkatkan taraf hidup

masyarakat itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, bagaimana negara lain mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari negara lainnya? Pertanyaan yang akan mudah mengemuka dan akan sulit untuk menerka jawaban yang pasti. Karena kondisi perekonomian suatu negara dengan negara lainnya sangat berbeda. Karena pertumbuhan ekonomi juga berhubungan dengan kondisi politik suatu negara, kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia dari suatu negara, dan kemampuan negara dalam menerapkan teknologi modern dalam aktivitas perekonomian. Kondisi-kondisi tersebut merupakan faktor dan peranan penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

B. Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Faktor penentu pertumbuhan ekonomi memiliki sifat yang dinamis, karena faktor-faktor tersebut bisa berlaku dan tidak berlaku jika diterapkan pada kondisi perekonomian yang berbeda. Namun secara garis besar, faktor-faktor tersebut turut memberi pengaruh terhadap perkembangan aktivitas perekonomian dan dapat dijadikan acuan bagi negara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

1. Sumber-sumber Daya Alam

Kekayaan alam suatu negara berbeda dengan negara lainnya, yang dimaksud dengan sumber-sumber daya alam meliputi, luas dan kesuburan tanah, hasil produksi apa yang dapat dihasilkan dari atas tanah seperti hutan, hasil pertanian dll serta hasil produksi dari apa yang dapat dihasilkan dari dalam laut seperti ikan dll, dan jumlah jenis barang tambang yang dihasilkan.

Pada awal tahap pembangunan suatu negara, akan banyak menemukan kesulitan dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dan hanya dapat mengandalkan kegiatan ekonomi pada sektor pertanian dan pertambangan. Kekurangan modal, tenaga ahli dan kekurangan kreativitas dalam pengembangan ke arah ekonomi yang lebih modern menjadi masalah yang sangat mendasar pada tahap ini. Kegiatan perekonomian yang bersektor pada pertanian dan pertambangan pun masih menggunakan alat-alat yang tradisional.

Namun, jika pemerintah mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut maka akan lebih mudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal. Selain pertumbuhan ekonomi yang optimal juga akan banyak menarik investor baik asing maupun domestik untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang produktif sehingga menghasilkan output produksi yang lebih besar dari sebelumnya. Bukan hanya dapat menghasilkan output produksi yang lebih besar, namun juga dapat meningkatkan dan memperluas hasil produksi untuk diperdagangkan dalam lingkup yang lebih besar yaitu dengan ekspor. Keuntungan yang didapat akan menjadi lebih besar dan hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa kekayaan sumber daya alam jika dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Walaupun kekayaan sumber daya alam memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, tidak semua negara menggantungkan aktivitas perekonomian pada eksplorasi sumber daya alam, seperti pada negara Jepang, Korea, bahkan Norwegia dapat membuktikan bahwa negara tersebut dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dari faktor penentu lainnya.

2. *Kualitas Sumber Daya Manusia*

Di banyak negara berkembang, meningkatnya jumlah penduduk yang sangat cepat dapat menjadi berkah dan ancaman. Dapat menjadi berkah jika jumlah penduduk tersebut dapat terserap menjadi tenaga kerja dan mendapat pelatihan kerja, pendampingan, dan pendidikan sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan dapat mengeksplorasi sektor-sektor perekonomian menjadi lebih produktif. Tugas pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia diatas, lebih kepada meningkatkan pangsa pasar, kebijakan yang tepat untuk membantu tenaga kerja yang terserap menjadi lebih efisien dan unggul serta memberikan kemudahan akses permodalan, sehingga aktivitas perekonomian menjadi lebih cepat berputar.

Jika yang terjadi sebaliknya, maka peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi ancaman serius bagi negara. Karena akan terjadi peningkatan pengangguran, kemiskinan dan akan terjadi banyak masalah sosial lainnya yang terjadi ditengah masyarakat. Dengan kualitas sumber daya manusia tersebut, tugas pemerintah menjadi

lebih berat karena harus dapat menciptakan manusia yang unggul dengan memberikan pendampingan dan pelatihan kerja, mengurangi masalah sosial dengan memberikan banyak bantuan sosial bagi masyarakat. Mengatasi hal tersebut akan membutuhkan biaya yang lebih besar bagi pemerintah dan itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah agar dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk keberlangsungan aktivitas perekonomian suatu negara.

3. *Akumulasi Kapital dan Penerapan Teknologi*

Peranan barang-barang modal sangat penting baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Negara yang menggandalkan aktivitas perekonomian pada sektor pertanian pun sangat membutuhkan peranan barang modal tersebut. Tidak bisa dibayangkan jika petani saat ini masih menggunakan alat-alat yang sangat tradisional untuk bercocok tanam ataupun saat panen. Tuntunan perekonomian saat ini jauh lebih berkembang dari pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga peranan barang modal harus selalu diikuti dengan penerapan teknologi yang modern agar produksi menjadi lebih efisien dan berkualitas sehingga dapat bersaing dengan hasil produksi dari negara lainnya.

Apabila barang-barang modal saja yang bertambah tidak diikuti dengan penerapan teknologi yang lebih modern, maka akan tercipta inefisiensi, dan tidak dapat mencapai tingkat produktivitas yang optimal.

Penerapan teknologi sangat penting untuk dapat mengeksplorasi dari sumber-sumber daya alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui, hal ini akan membantu masyarakat dapat beralih ke energi yang terbarukan. Hal itu dapat dicapai dengan penerapan teknologi modern dalam menunjang aktivitas perekonomian bagi masyarakat. Jika barang-barang modal berjalan secara bersama-sama dengan penerapan teknologi yang modern akan menciptakan efisiensi dan produktivitas yang optimal.

4. *Kondisi Sosial Masyarakat*

Kondisi sosial masyarakat dapat menentukan seberapa cepat pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di beberapa tempat masih banyak masyarakat yang memegang teguh adat istiadat dari

leluhurnya hingga sekarang, seperti masyarakat petani yang masih menggunakan alat tradisional untuk keseimbangan alam, tanah yang dimiliki oleh beberapa tuan tanah sehingga pembebasannya menyangkut banyak pihak dll. Kondisi tersebut dapat menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi berjalan lebih cepat.

Pemerintah wajib hadir dalam menghadapi hambatan yang terjadi di tengah kondisi masyarakat tersebut, dengan pertimbangan bahwa pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan dan demi kesejahteraan rakyat. Salah satu langkah penting lainnya bahwa pemerintah juga harus menghadirkan pendidikan bagi masyarakat dengan kondisi sosial seperti diatas, agar keterbukaan wawasan dan kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat tersebut.

C. Strategi pertumbuhan ekonomi

1. Industrialisasi Versus Pembangunan Pertanian

Dilema yang dihadapi oleh pemerintah adalah antara mengembangkan industrialisasi dengan pembangunan pada sektor pertanian. Tanpa mengesampingkan keduanya, pemerintah dapat membuat kebijakan yang dapat mengintegrasikan antara industrialisasi dan pertanian. Investasi pada pertanian tidak hanya berfokus pada petani dan lahan pertanian, namun pembuatan irigasi, fasilitas pengairan dan saluran serta pengembangan teknologi pada pertanian dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian, hal tersebut bertujuan agar produktivitas hasil pertanian meningkat. Namun, investasi pada pembangunan pertanian saja tidak cukup, karena masalah selanjutnya adalah kurangnya petani dalam memasarkan hasil pertaniannya, maka industrialisasi dapat diintegrasikan untuk dapat mengelola hasil pertanian dari para petani menjadi bahan jadi sehingga memiliki nilai jual. Integrasi kebijakan industrialisasi dan pertanian telah banyak dilakukan di negara-negara maju yang memiliki sektor pertanian cukup besar, seperti di Australia, Jepang dan Belanda.

2. Strategi Impor Versus Promosi Ekspor

Akan menjadi hal yang miris, apabila suatu negara yang merupakan negara agraris namun masih mengimpor hasil pertanian dari

negara lain. Bukan berarti impor merupakan hal yang tidak boleh dilakukan, impor tetap dibutuhkan jika suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif terhadap negara pengekspor dalam artian, negara A jika memproduksi barang X membutuhkan biaya lebih besar, sehingga impor akan mengurangi beban biaya tersebut. Terdapat langkah yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa integrasi kebijakan industrialisasi dan pertanian dapat memberi keuntungan yang besar, melalui hasil pertanian diolah lewat industri untuk menjadi barang jadi. Sehingga output tersebut harus memiliki kualitas untuk dapat bersaing dengan negara lain. Sehingga harapan integrasi kebijakan tersebut dapat menekan impor dan terus mempromosikan ekspor dengan output yang berkualitas dan dapat bersaing. Hal tersebut memang tidak mudah dan dibutuhkan kerja keras untuk mencapainya.

D. Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Regional

Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan negara lainnya, hal ini tercermin bahwa Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau. Sistem ekonomi yang tersentral di pusat sedikit menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga terjadi banyak ketimpangan pembangunan antara pulau satu dengan lainnya. Menimbang bahwa hakekat dan tujuan kebijakan ekonomi adalah untuk kemakmuran masyarakat, maka berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 yang berisi tentang asas-asas otonomi daerah dan penerapan asas desentralisasi. Ketetapan MPR RI tersebut menunjukkan spirit pemerataan pembangunan dan pendapatan tentang pengelolaan sumber daya nasional yang berkeadilan dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

Awal mula sistem perekonomian desentralisasi mengalami hambatan dan kegagalan dalam implementasinya, sehingga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang baru untuk mendukung sistem perekonomian desentralisasi dengan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 yang berisi rumusan permasalahan yang terjadi pada setiap daerah penyelenggara otonomi daerah beserta rekomendasi kebijakan yang merupakan solusi atas masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut. Kebijakan otonomi daerah terus berjalan hingga sekarang dan telah sedikit banyak menguatkan

gairah perekonomian dari setiap daerah. Tujuan dari otonomi daerah yang diagendakan oleh pemerintah pusat terdapat empat agenda besar, yaitu: a) full employment; b) tingkat kemakmuran daerah; c) kestabilan tingkat harga; dan d) gambaran struktur perekonomian regional.

1. Full employment

Tujuan dari diselenggarakannya pemerintahan adalah dapat menjamin terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya. Dari penciptaan lapangan pekerjaan akan terjadi suatu proses aktivitas perekonomian, selain aktivitas perekonomian juga penyerapan tenaga kerja untuk menekan angka pengangguran dan dapat mengurangi masalah sosial yang timbul di tengah masyarakat.

2. Tingkat kemakmuran suatu daerah.

Saat gairah perekonomian meningkat, banyak tenaga kerja terserap, dan sumber-sumber daya alam dapat dimanfaatkan maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi pada daerah, namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat dijadikan sebagai pengukuran tingkat kemakmuran daerah. Sangat memungkinkan hal tersebut terjadi jika pengelolaan terhadap sumber-sumber daya alam hanya berpusat pada segelintir orang dan tidak berlakunya *trickle down effect*. Untuk memonitor tingkat kemakmuran daerah, pemerintah daerah melakukan penghitungan berdasarkan pendapatan per kapita, perhitungan tersebut lebih realistis dibanding dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Kestabilan harga-harga

Menjadi hal penting dalam menciptakan rasa aman pada masyarakat adalah menjamin kestabilan pada harga. Harga yang tidak stabil akan membuat masyarakat resah dan pada kondisi terburuk akan terjadi ketidakpastian dalam perekonomian selain itu juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

E. Gambaran Struktur Perekonomian Daerah

Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Ada yang menonjol pada sektor pertanian, pertambangan, konstruksi bahkan pada ekonomi kreatif lainnya. Perbedaan sektor-sektor tersebut dapat mendorong pemerintah daerah memiliki keunggulan komparatif sehingga dapat mengeksplor ke daerah lainnya bahkan ke negara lain.

Ketika pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang produktif dapat dijadikan sebagai lumbung pendapatan daerah yang optimal tanpa mengabaikan sektor yang kurang produktif.

Pemerintah daerah melakukan analisis dan pengamatan perkembangan perekonomian berdasarkan data yang telah disediakan oleh instansi yang profesional dalam bidangnya. Data tersebut akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan daerah jangka pendek maupun jangka panjang, perumusan perpajakan dan penguatan pada sektor-sektor yang produktif maupun non-produktif berdasarkan karakter masing-masing sektor dan perhitungan pendapatan regional. Saat ini, telah berkembang secara masif ahli dalam perekonomian regional, karena tugas dari pemerintah daerah semakin besar dan pemerintah daerah merupakan tangan penerus dari pemerintah pusat, sehingga kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah harus mendukung agenda dari pemerintah pusat.

Beberapa indikator yang digunakan dalam memonitor perkembangan dan potensi ekonomi regional adalah:

1. Laju pertumbuhan ekonomi, penggunaan indikator pertumbuhan ekonomi biasanya dilihat dalam kurun tahun ke tahun. Dasar penggunaan indikator adalah untuk melihat proses output yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut:

$$\Delta PDRB_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana:

ΔPDB_t = Laju pertumbuhan ekonomi

PDB_{t-1} = PDB pada tahun sebelumnya

2. Laju pertumbuhan penduduk, penggunaan indikator ini sering didasarkan pada rata-rata selama periode tertentu, mengingat bahwa sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama 10 tahun sekali. Namun, beberapa instansi seperti Bappenas bekerjasama dengan BPS dan Dinas Kependudukan mengeluarkan proyeksi pertumbuhan penduduk selama 30 tahun ke depan berdasarkan indikator-indikator tertentu.

3. PDRB percapita, indikator ini digunakan untuk melihat pendapatan yang didapat oleh masing-masing individu pada suatu daerah. Kegunaan indikator ini untuk mengukur kemakmuran individu. Dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{PDRB percapita} = \frac{\text{PDRB}}{JP_t}$$

Dimana:

PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto tahun t

JP_t = Jumlah Penduduk tahun t

4. Mengukur Ketimpangan

Ketimpangan pembangunan dapat diukur dalam suatu wilayah, bisa digunakan untuk mengukur ketimpangan antar Kabupaten, Kecamatan bahkan dalam lingkup yang lebih besar yaitu antar Provinsi. Ketimpangan diukur dengan menggunakan indeks, semakin mendekati angka 0 berarti kesenjangan rendah, jika mendekati angka 1 maka ketimpangan yang terjadi cukup besar. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$IW = \frac{1}{\bar{Y}} \sqrt{\sum_{i=1}^w (Y_i - \bar{Y})^2 \cdot \frac{f_i}{N}}$$

Dimana:

Y_i = PDRB perkapita di daerah i

\bar{Y} = rata-rata PDRB perkapita di Kabupaten

F_i = Jumlah penduduk di daerah i

N = Jumlah penduduk di Kabupaten

F. Pembangunan ekonomi

Dalam ekonomi, sering disebutkan antara pertumbuhan (*growth*) dan pembangunan (*development*). Kedua hal tersebut memiliki arti yang berbeda. Perbedaan terhadap dua kategori tersebut sangat penting karena kondisi lapangan menunjukkan buktinya, contoh mengapa negara Brunei Darussalam yang merupakan negara kaya tapi tidak disebut dengan negara maju? Atau bahkan Belanda yang merupakan negara tidak cukup kaya (masih lebih kaya negara Singapura) namun disebut dengan negara maju?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut

mendorong kita untuk dapat membedakan arti dari pertumbuhan dan pembangunan.

Telah disebutkan diatas, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Peningkatan pada output perkapita terjadi karena terdapat kenaikan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi. Berbeda halnya dengan arti pembangunan, Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan.

1. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.
2. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).
3. Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.
4. Prof Sumitro Djoyohadikusumo menyatakan bahwa pembangunan adalah proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan alokasi sumber daya produksi diantara sektor-sektor ekonomi, perubahan pada pola pembagian (distribusi) kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan dan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa definisi dari pembangunan memiliki cakupan yang lebih luas dari pertumbuhan dan pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan. Ketika terjadi perubahan pada tingkat output perkapita dalam jangka panjang akan

selalu diikuti oleh perubahan-perubahan pada pola dan aktivitas perekonomian hal tersebut mendorong semakin meluasnya kegiatan perekonomian dan pemerintah harus bisa menangkap perubahan-perubahan tersebut. Pembangunan ekonomi meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu negara telah meningkat, tidak mudah untuk diukur secara kuantitatif.

G. Paradigma Pembangunan

Perubahan dan penyesuaian pemikiran pembangunan ekonomi selalu diikuti dengan perubahan zaman dan kondisi masyarakatnya. Dari perubahan pemikiran itu menimbulkan perubahan paradigma dalam pembangunan. Contoh yang sangat jelas, ketika terjadi suatu krisis ekonomi, akan mendorong orang untuk mencari alternatif pemikiran untuk keluar dari jeratan krisis tersebut. Gejala-gejala krisis ekonomi yang terjadi membuka wawasan yang lebih luas terhadap pemikiran ekonomi, jika pada saat krisis tidak memunculkan suatu pemikiran yang baru, maka sangat mungkin sekali bahwa krisis tersebut bisa sangat bertambah parah.

Awal mula indikator yang digunakan dalam pembangunan ekonomi adalah PDB perkapita. Oleh sebab itu, negara-negara khususnya negara yang sedang berkembang melakukan pembangunan dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional perkapitanya agar dapat bersanding dengan negara maju. Harapan dari pembangunan yang berorientasi dari peningkatan pada PDB perkapita adalah menurunnya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi ditengah masyarakat karena adanya *trickle down effect*. Namun, perubahan zaman merubah paradigma tersebut dengan memasukkan unsur lingkungan, hal ini tidak lepas dari pola pelaku ekonomi yang mengeksploitasi secara masif terhadap sumber daya alam demi mengejar ketinggalan PDB perkapita dari negara maju. Kerusakan lingkungan banyak terjadi hingga mengakibatkan masyarakat atau penduduk lokal harus dipindahkan karena rawan terjadi bencana pada lingkungan tersebut.

Paradigma tersebut diperbaharui dengan gagasan *green economy* yang sempat gencar dilakukan oleh pemimpin dunia. Pemerintah selain harus

mengurangi tingkat kemiskinan, penyediaan lapangan kerja juga harus menyeimbangkan ekosistem agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Penerapan teknologi dan energi yang ramah lingkungan menjadi solusi dalam paradigma ini. Paradigma tersebut tidak hanya berhenti sampai disini, saat ini pun semakin banyak berkembang terhadap paradigma pembangunan yang tangguh dalam menghadapi krisis. Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Todaro, 2000):

1. Ketahanan (*Sustenance*): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*): pembangunan haruslah memaanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom from servitude*: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

H. Teori Pembangunan Ekonomi

Melalui hasil pengamatan dan penelitian para ahli terhadap pembangunan ekonomi, lahir teori-teori yang kemudian menjadi landasan proses pembangunan. Di antaranya:

1. Teori Pertumbuhan Linier
 - a. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa Smith menekankan pertumbuhan ekonomi pada dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output terkait dengan tiga unsur sistem produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan stok kapital. Smith menggaris bawahi pada stok kapital yang secara aktif menentukan tingkat output melalui dua pengaruh, yaitu stok kapital yang memadai mempengaruhi secara langsung terhadap output dengan penambahan tenaga kerja sehingga akan meningkatkan output. Kedua, stok kapital mempengaruhi output secara tidak langsung melalui

pembagian kerja atau spesialisasi yang akan meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan output. Proses akumulasi kapital akan terhambat jika terdapat batasan-batasan pada masyarakat, sehingga Smith menyarankan agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan aktivitas perekonomian dan pemikiran Smith tersebut menjadi pemikiran yang sangat terkenal dengan segala sesuatunya diserahkan pada pasar. Aspek kedua dalam pertumbuhan ekonomi menurut Smith adalah pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Selain itu, Adam Smith dalam pemikirannya membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap, dimulai dari masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan masa perindustrian.

b. Teori Pertumbuhan Rostow

Teori pertumbuhan yang digunakan oleh Rostow diumpakan seperti pesawat yang akan lepas landas, Rostow juga membagi proses perkembangan ekonomi suatu Negara menjadi lima tahap; perekonomian tradisional; prakondisi tinggal landas; tinggal landas; menuju kedewasaan; dan konsumsi massa tinggi (Mudrajad: 2003).

1) Perekonomian Tradisional

Merupakan tahap awal pembangunan suatu negara, diasumsikan bahwa masyarakat pada kondisi tradisional, tingkat produktivitas para pekerja relatif rendah, disebabkan banyaknya sumber daya alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya.

2) Pra Kondisi Tinggal Landas

Tahap kedua adalah pra kondisi tinggal landas. Pada tahap ini adalah tahap dimana masyarakat mampu untuk menggunakan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan dan masyarakat mampu menggunakan kekuatan sendirinya demi meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup. ciri-ciri dan upayanya:

- a) Peningkatan investasi pada sektor infrastruktur, khususnya pada bidang transportasi.
- b) Peningkatan dan perluasan pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk.
- c) Perluasan impor, termasuk impor modal oleh biaya produksi yang efisien dan pemasaran sumber alam untuk ekspor.

3) Tinggal landas

Tahap tinggal landas merupakan tahap perubahan pola-pola produksi yang terjadi di masyarakat, yang paling kentara adalah dengan revolusi industri.

4) Tahap Menuju Kedewasaan

Setelah perubahan pola produksi pada tahap tinggal landas, maka tahap selanjutnya adalah penerapan teknologi modern dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pada tahap ini terdapat tiga perubahan yang penting :

- a) Tenaga kerja merupakan tenaga yang terdidik
- b) Perubahan watak pengusaha dari sifatnya pekerja keras menjadi bekerja lebih efisien
- c) Masyarakat jenuh terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan lebih jauh.

5) Tahap Konsumsi Tinggi

Tahap konsumsi tinggi merupakan tahap akhir teori pertumbuhan Rostow. Perubahan pada tahap ini, ditandai dengan berpindahnya masyarakat perkotaan ke pinggiran kota atau menjauh dari pusat ekonomi, hal ini diakibatkan bahwa kota-kota besar cenderung menjadi pusat perekonomian.

2. Teori Perubahan Struktural

Teori Perubahan Struktural ini menitikberatkan pada perubahan yang terjadi di negara sedang berkembang. Misal suatu negara berkembang mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor utama, maka terdapat peralihan dari hasil pertanian yang subsisten berubah menjadi perekonomian ke sektor yang modern, hal ini biasanya didominasi dengan industri barang dan jasa.

a. Teori Pembangunan Arthur Lewis

Pengembangan teori Arthur Lewis bermula dari pengamatannya pada negara-negara berkembang. Pokok permasalahan pada negara-negara tersebut terdapat pada dua sektor, yaitu sektor tradisional berkaitan pada tingkat produktivitas yang rendah dan keberadaan sumber tenaga kerja yang banyak, dan sektor modern berkaitan dengan produktivitas cukup tinggi dan dapat dijadikan sebagai sumber kapital. Teori ini juga membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi serta pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja dari desa harus dapat memberikan upah subsisten dan upah “biaya pindah” agar tenaga kerja tersebut bersedia meninggalkan kampung halamannya. Berbeda dari pemikiran-pemikiran sebelumnya, Lewis tidak secara terang menyertakan kemajuan teknologi dalam pemikirannya.

b. Teori Pola Pembangunan Chenery

Teori pembangunan yang dikembangkan oleh Chenery memfokuskan pada hasil pasca produksi, misal para petani di masa yang akan datang, harus dapat berinovasi terhadap komoditi pasca panen yaitu misal kepada sektor industri, sehingga hasil yang akan didapat petani meningkat karena terdapat proses produksi terhadap komoditi pasca panen tersebut. Transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat dan akan pertumbuhan meningkat.

3. Teori Dependensia

Teori ini, mencoba untuk menguraikan penyebab-penyebab yang menghambat suatu perekonomian pada negara-negara sedang berkembang. Teori dependensia mengasumsikan bahwa perekonomian dunia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu negara-negara maju dan negara-negara yang sedang berkembang.

a. Kaum Neo-Klasik Penentang Revolusi

Setelah teori dependensia, pada tahun 1980-an muncul suatu teori yang banyak menyanggah pemikiran dari teori dependensia yaitu adalah teori pembangunan neo-Klasik. Teori

pembangunan neo-Klasik menitikberatkan pada peran swasta dalam pembangunan, bahkan merekomendasikan bahwa badan usaha milik negara yang strategis harus dirubah kepemilikan dari kepemilikan negara ke swasta.

Teori tersebut muncul setelah banyaknya kegagalan pemerintah dalam membawa perekonomian pada negara sedang berkembang menjadi negara maju, bahkan dikatakan juga dalam teori ini, selain gagalnya peran pemerintah juga banyak disebabkan karena kasus korupsi, kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya, dan kurangnya perhatian pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

b. Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan)

Teori Solow-Swan membangun model pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Untuk mendapatkan suatu output bisa dihasilkan dari berbagai kombinasi penggunaan dari kapital (K) dan tenaga kerja (L). Teori Solow-Swan tersebut memiliki konsekuensi bahwa seluruh faktor produksi yang tersedia dari K dan L akan selalu terpakai atau digunakan secara penuh (usefull), dengan bahasa yang lebih sederhana bahwa berapapun jumlah K dan L yang tersedia akan bisa dikombinasikan untuk proses produksi. Selain dari pada itu, Teori Solow-Swan juga mempertimbangkan aspek kemajuan teknologi sebagai satu kesatuan dalam proses pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Pandangan teori ini didasarkan pada anggapan yang mendasari analisis ekonomi klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat pemanfaatan penuh dari faktor-faktor produksinya. Penggunaan tenaga kerja penuh juga melibatkan teknologi modern, dan sifatnya yang terus menerus. Kesemuanya akan sangat bergantung dengan kecukupan sumber daya, akumulasi kapital, pertumbuhan jumlah penduduk dan kemajuan teknologi.

4. Teori Pertumbuhan Endogen

Model pertumbuhan endogen merupakan teori yang dikembangkan dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari dalam sistem ekonomi negara itu sendiri. Faktor-faktor endogen sendiri tidak lepas dari variabel kemajuan teknologi, karena hal tersebut terjadi bukan tanpa disengaja namun karena keputusan masyarakat yang berinvestasi pada bidang ilmu pengetahuan yang mendorong terjadinya teknologi modern dan human capital.

B. Teori-Teori “Baru”

1. Teori Pertumbuhan Baru (NGT)

Teori pertumbuhan baru, yang pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan *endogen*, memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen karena menganggap pertumbuhan GNP lebih ditentukan oleh sistem proses produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Berbeda dengan teori tradisional neoklasik yang menganggap pertumbuhan GNP sebagai akibat dari keseimbangan jangka panjang. Motivasi dasar dari teori NGT adalah menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan antarnegara dan proporsi yang lebih besar dari pertumbuhan yang diamati.

2. Teori Perdagangan Baru (NTT)

Teori keunggulan komparatif mengajukan dalil bahwa: (1) negara berdagang untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan sumber daya alam yang mereka miliki; (2) daerah akan berspesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif yang mereka miliki.

C. Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang masih terbelakang, ukuran kemajuan dan pembangunan ekonomi mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sarana transportasi, listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

1. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

2. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol.

4. Angka Tabungan

Perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Quality of life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indicator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata

harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf.

6. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge, attitude* dan *skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.



BAB 13

PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Pengertian

Hubungan makroekonomi internasional memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terlebih bagi negara yang sistem perekonomiannya merupakan sistem perekonomian terbuka. Setiap perekonomian yang terkait dengan negara-negara lain di dunia terbentuk dalam dua hubungan, yaitu hubungan perdagangan dan keuangan. Hubungan melalui sistem perdagangan muncul dari kenyataan bahwa beberapa hasil produksi yang sifatnya surplus dapat diekspor ke negara lain, namun jika hasil produksi dalam negeri defisit maka dapat melakukan impor. Definisi dari perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk/perusahaan/pemerintah suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Hubungan internasional yang lain dan sudah menjadi hal lazim saat ini adalah keuangan, dimana suatu perusahaan dalam negeri memiliki aktiva di negara lain.

B. Ruang Lingkup Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional berkaitan dengan beberapa kegiatan yaitu:

1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya (*transfer of goods and services*).
2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri (*transfer of capital*).
3. Perpindahan tenaga kerja yang mempengaruhi pendapatan negara melalui devisa (*transfer of labour*).
4. Perpindahan teknologi yaitu dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain (*transfer of technology*).
5. Penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar (*transfer of data*).

C. Faktor-faktor yang memengaruhi perdagangan internasional

Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, di antaranya sebagai berikut.

1. Sebagai pemenuhan terhadap konsumsi barang dan jasa dalam negeri.
2. Beberapa perdagangan dapat menghasilkan keuntungan dan menambah pendapatan bagi Negara.
3. Perbedaan kemampuan dari setiap negara dalam mengolah sumber daya ekonomi melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Produk dalam negeri yang surplus mendorong untuk membuka pasar baru atau menjalin hubungan dagang dengan negara lain agar produk tersebut dapat terjual.
5. Perbedaan sumber daya alam, kualitas tenaga kerja, budaya, jumlah penduduk bahkan perbedaan iklim dapat menyebabkan hasil produksi.
6. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
7. Terjadinya era globalisasi.

8. Tunduk dalam peraturan yang mengikat dalam suatu organisasi global, sehingga terjalin kerja sama antar negara dalam organisasi tersebut.
9. Perbedaan selera (preferensi).
10. Perbedaan biaya produksi.

D. Masalah yang di bahas dalam Perdagangan international

1. Meningkatnya proteksi perdagangan negara-negara dengan membentuk blok-blok sendiri.
2. Terdapat gap yang cukup jauh antara negara maju dengan negara-negara berkembang bahkan dengan negara miskin.
3. Banyak negara yang kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi pasar bebas.
4. Fluktuasi nilai tukar mata uang
5. Persaingan antar mata uang dari setiap negara sebagai mata uang internasional.
6. Persaingan kedigdayaan antar negara dalam pengaruhnya pada dunia internasional yang dapat menimbulkan ketidakpastian global.

E. Manfaat Perdagangan Internasional

1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri
2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi produksi
3. Memperluas pasar dan meningkatkan profit
4. Transfer teknologi modern
5. Meningkatkan daya saing yang didapat dari perdagangan internasional

F. Perdagangan Internasional Vs. Perdagangan Domestik

Ada tiga perbedaan utama antara perdagangan internasional dengan perdagangan domestik:

1. Ruang lingkup perdagangan menjadi lebih luas. Jika bukan lewat perdagangan internasional, mungkin penduduk di negara-negara

berkembang tidak dapat memiliki mobil, motor bahkan alat pertahanan negara yang modern, begitu juga dengan negara-negara maju yang tidak memiliki pertanian, tidak bisa merasakan buah pisang, semangka dll. lewat perdagangan internasional maka negara-negara bisa menjual dan membeli barang / jasa dari negara lain.

2. Adanya kedaulatan bangsa. Melalui perdagangan internasional, negara dapat menunjukkan kedaulatan sebagai bangsa yang kuat saat mengatur aliran barang/jasa, tenaga kerja, dan keuangan, sehingga perdagangan tersebut untuk mensejahterakan masyarakat. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara.
3. Penggunaan kurs tukar. Berbeda halnya dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu mata uang, dalam perdagangan internasional melibatkan dua atau lebih mata uang yang digunakan. Perbedaan mata uang dalam perdagangan juga dapat menimbulkan kecintaan dan kebanggaan dalam menggunakan mata uang domestik dan seharusnya perdagangan internasional tersebut dapat menguatkan posisi mata uang domestik pada global.

G. Teori Perdagangan Internasional

1. Teori Kaum Merkantilisme

Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai 17, dan berasal dari kata *merchand* yang artinya pedagang. Walaupun para ahli masih meragukan apakah merkantilisme benar merupakan suatu aliran/mashab atau bukan, namun aliran ini memiliki dampak yang besar dalam perkembangan teori ekonomi.

Terlepas dari perdebatan akan posisi kaum Merkantilisme sebagai aliran atau bukan, beberapa gagasan yang dikemukakan tentang perdagangan diantaranya adalah bahwa jika suatu negara ingin menjadi negara maju, maka negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan negara lain, apalagi jika negara tersebut memiliki kelebihan / surplus pada komoditi emas dan perak.

Paham pemikiran dari kaum Merkantilisme kemudian diadopsi oleh banyak dari negara Eropa yang membangun perekonomiannya

berdasarkan strategi ekspor dan mengurangi kegiatan perdagangan pada impor. Beberapa paham yang di anut kaum merkantilisme adalah sebagai berikut.

- a. Jika produksi suatu negara berlebih atau terdapat surplus perdagangan, hal tersebut menunjukkan sebagai suatu kekayaan negara
- b. pemilikan logam mulia berarti pemilikan kekayaan
- c. Transaksi perdagangan, akan ada pihak yang mendapat keuntungan dan ada pihak yang menderita kerugian.

Tokoh-tokoh yang berperan besar dalam pemikiran merkantilisme adalah sebagai berikut:

1. Jean Bodin (1530 – 1596) adalah ilmuwan Prancis, orang pertama yg secara sistematis menyajikan teori tentang uang & harga. Menurut Boudin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga-harga. Berdasarkan teori Boudin inilah Irving Fisher mengembangkan teori Kuantitas Uang.
2. Thomas Mun (1571 – 1641) seorang saudagar kaya dari Inggris menulis tentang manfaat perdagangan luar negeri. Dalam buku-buku yang ditulisnya memuat tentang manfaat perdagangan luar negeri, sebagaimana yang dikutip dari aslinya oleh Edmund Whittaker (1960) dari bukunya yang kedua, Mun menulis : *the ordinary means therefore to encreas our wealth and treasure is by foreign trade, wherein we must ever observe this rule; to sell more to strangers yearly than we consume of theirs in value...because that part of stock which is not returned to us in wares must necessarily be brought home in treasure.*
3. Jean Babtis Colbert (1619 – 1683) adalah pejabat Perancis yaitu menteri utama dibidang ekonomi & keuangan dlm pemerintahan Raja Louis xvi. Pada masa ini perdagangan dianggap sumber utama kemakmuran, konsekuensinya, kedudukan kaum saudagar semakin penting. Terjadi aliansi antara saudagar & penguasa. Kaum saudagar memperkuat & mendukung kedudukan penguasa. Penguasapun memberi bantuan & perlindungan berupa monopoli, proteksi, dan keistimewaan-keistimewaan lainnya.
4. Sir William Petty (1623 – 1687) mengajar di Oxford University dan banyak menulis tentang politik. Petty menganggap penting arti

bekerja (*labor*) jauh lebih penting dari sumber daya tanah. Bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Menurut Petty, uang diperlukan dalam jumlah secukupnya, tetapi lebih atau kurang dari yang diperlukan bisa mendatangkan kemudharatan. Dalam kalimatnya sendiri: *“money is fat the body-politick, where of too much doth as often hinder its agility, as too little makes sick!”*

5. David Hume (1711-1776) Dikenal sebagai seorang filsuf daripada pakar ekonomi. Tapi kontribusinya terhadap dunia ekonomi cukup besar. Hal ini disebabkan karena Hume dan Smith sering mendiskusikan tentang pandangan-pandangannya bersama-sama. Hume menulis buku *the balance of trade*, membicarakan tentang harga-harga yg sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagian lagi ditentukan oleh jumlah uang

Menurut kaum Merkantilis Untuk mengembangkan Ekonomi nasional dan Pembangunan ekonomi, maka jumlah ekspor harus lebih besar dari jumlah impor. Maka setiap Negara harus melakukan kebijakan:

- a. Pemupukan Logam Mulia
- b. Neraca Perdagangan Aktif (Ekspor > Impor)

2. Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage*)

Adam Smith (1776) menekankan agar perdagangan dan semua kegiatan perekonomian diserahkan pada mekanisme pasar dan agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam aktivitas perekonomian. pendapat Smith tersebut dapat mendorong terciptanya spesialisasi dalam produksi sehingga akan memiliki keunggulan yang absolut dibanding dengan produksi dari negara lainnya. Keunggulan absolut pada produksi tersebut akan mendorong negara untuk mengekspor ke negara lain.

Untuk menyederhanakan gambaran yang dibuat, perlu digunakan beberapa asumsi tambahan sebagai berikut.

- a. Hanya terdapat dua negara yang akan melakukan spesialisasi dalam perdagangan.

- b. Masing-masing negara hanya memproduksi dua jenis barang
- c. Masing-masing negara memiliki dua faktor produksi dan bersifat saling menggantikan.
- d. Harga relatif, atau biaya penggantian (*opportunitiy cost*) yang dapat dijelaskan sebagai salah satu barang yang dinyatakan dalam unit barang lainnya adalah tetap.

Contoh:

Indonesia dan India memproduksi dua jenis komoditi yaitu pakaian dan tas dengan asumsi (anggapan) masing-masing negara menggunakan 100 tenaga kerja untuk memproduksi kedua komoditi tersebut. 50 tenaga kerja untuk memproduksi pakaian dan 50 tenaga kerja untuk memproduksi tas. Hasil total produksi kedua negara tersebut (dalam sebulan) yaitu:

Negara	Produksi Barang	
	Pakaian	Tas
Indonesia	3.000	1.000
India	4.000	500
Jumlah	7.000	1.500

Berdasarkan informasi di atas, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi tas dibandingkan dengan India, karena 50 tenaga kerja di Indonesia mampu memproduksi 1.000 unit tas sedang India hanya bisa memproduksi 500 unit tas. Sedangkan India memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi pakaian karena India bisa membuat 4.000 pakaian, Indonesia hanya 3.000 pakaian. Jadi Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi tas dan India memiliki keunggulan mutlak dalam produksi pakaian. Apabila Indonesia dan India melakukan spesialisasi produksi, hasilnya akan sebagai berikut.

Negara	Produksi Barang	
	Pakaian	Tas
Indonesia	-	2.000
India	8.000	-
Jumlah	8.000	2.000

Dengan melakukan spesialisasi hasil produksi semakin meningkat. Karena Indonesia dan India memindahkan tenaga kerja dalam produksi komoditi yang menjadi spesialisasi. Sebelum spesialisasi, jumlah

produksi sebanyak 7.000 unit pakaian dan 1.500 unit tas. Tetapi setelah spesialisasi, jumlah produksi meningkat menjadi 8.000 unit pakaian dan 2.000 unit tas. Jadi keunggulan mutlak terjadi apabila suatu negara dapat menghasilkan komoditi-komoditi tertentu dengan lebih efisien, dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain.

Untuk lebih jelasnya marilah kita perhatikan tabel di bawah ini,

Keadaan Produksi sebelum adanya spesialisasi			
Negara	Produksi Pakaian	Produksi Tas	Harga Relatif
Indonesia	3.000	1.000	3 unit Pakaian : 1 unit tas
India	4.000	500	8 unit Pakaian : 1 unit tas
Jumlah	7.000	1.500	
Keadaan Produksi sesudah adanya spesialisasi			
Negara	Produksi Pakaian	Produksi Tas	
Indonesia	-	2.000	Memiliki Keunggulan dalam memproduksi tas
India	8.000	-	Memiliki Keunggulan dalam memproduksi pakaian
Jumlah	8.000	2.000	
Keadaan Penggunaan sesudah perdagangan			
Negara	Konsumsi Pakaian	Konsumsi Tas	Kurs yang disepakati 1 unit tas berbanding 3 sampai dengan 8 pakaian (dalam kasus ini ditentukan 1 unit tas = 4 unit pakaian)
Indonesia	4.000	1.000	
India	4.000	1.000	
Jumlah	8.000	2.000	

Keadaan sebelum adanya spesialisasi menunjukkan keadaan sebelum terjadinya perdagangan diantara kedua negara tersebut. Masing-masing negara memproduksi sendiri produk pakaian dan tas yang mereka butuhkan. Dalam kasus diatas kedua negara hanya menggunakan dua faktor produksi, faktor produksi 1 untuk menghasilkan pakaian dan faktor produksi lainnya untuk menghasilkan tas.

Penggunaan faktor produksi 1 (50 tenaga kerja) akan menghasilkan 3.000 unit pakaian di Indonesia dan 4.000 unit pakaian di negara India. Dengan demikian India memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi pakaian. Penggunaan faktor produksi lainnya (50 tenaga kerja) akan menghasilkan 1.000 tas di Indonesia dan 500 tas di India, Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi tas.

Untuk membuktikan bahwa tas lebih murah di Indonesia, perlu kita bandingkan harga relatif antara Indonesia dan India. Faktor produksi (50 tenaga kerja) di Indonesia dapat menghasilkan 3.000 tas dan 1.000 pakaian, ini berarti 1 unit tas di Indonesia setara dengan 3 unit pakaian (1 tas = 3 pakaian). Di India faktor produksi (50 tenaga kerja) dapat menghasilkan 4.000 unit pakaian dan 500 unit tas, ini berarti 1 unit tas setara dengan 8 unit pakaian (1 tas = 8 pakaian). Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa harga tas secara relatif lebih murah di Indonesia, sedangkan harga pakaian secara relatif lebih murah di India.

Karena masing-masing negara memiliki keunggulan maka kedua negara tersebut dapat melakukan perdagangan, dengan catatan Indonesia harus melakukan spesialisasi dalam produk tas dan India melakukan spesialisasi dalam produk pakaian.

Sesudah mereka melakukan spesialisasi Indonesia dalam produk tas dan India dalam produk pakaian seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas. Indonesia hanya dapat memproduksi tas sebanyak 2.000 unit (tanpa spesialisasi Indonesia hanya menghasilkan 1.000 unit tas). Dan India hanya dapat menghasilkan 8.000 unit pakaian (tanpa spesialisasi 4.000 unit pakaian). Sebelum spesialisasi kedua negara hanya dapat menghasilkan 7.000 unit pakaian dan 1.500 unit tas, dengan spesialisasi kedua negara dapat menghasilkan 8.000 unit pakaian dan 2.000 unit tas. Ini menunjukkan dengan adanya spesialisasi faktor produksi dapat digunakan dengan lebih efisien, ini dapat dilihat dari jumlah produksi pakaian meningkat sebesar 1.000 unit dan tas meningkat 500 unit.

Sesudah spesialisasi perdagangan kedua negara dapat diwujudkan. Agar pertukaran dapat dilaksanakan tanpa merugikan salah satu pihak, maka harus ditentukan dulu kurs pertukarannya dengan menggunakan perbandingan harga relatif dalam negeri diantara kedua negara.

Dalam kasus diatas harga relatif di Indonesia 1 unit tas : 3 Unit pakaian, dan di India 1 unit tas : 8 unit pakaian. Sehingga kurs pertukaran akan menguntungkan apabila 1 unit tas ditukar antara 3 sampai dengan 8. Dalam kasus ini disepakati 1 unit tas ditukar 4 unit pakaian.

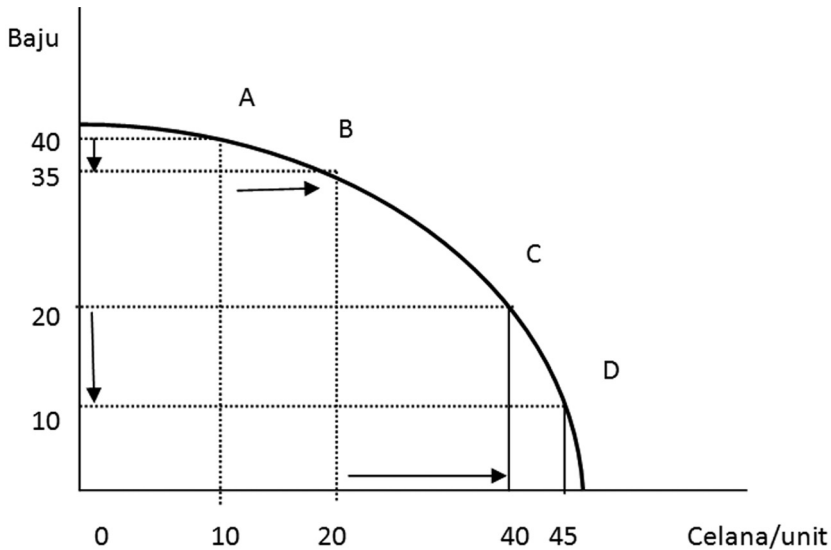
Selanjutnya dimisalkan Indonesia mengekspor tas ke India sebesar 1.000 unit, sesuai dengan kurs pertukaran India harus mengganti 4.000 unit pakaian. Berdasarkan asumsi yang digunakan diatas maka Indonesia

akan mengekspor tas ke India dan mendapatkan keuntungan mutlak 1.000 pakaian, sedang India akan mengekspor pakaian ke Indonesia dan akan mendapatkan keuntungan 500 unit tas.

Keuntungan Perdagangan Dalam Grafik

Untuk menjelaskan keuntungan yang ditimbulkan akibat adanya perdagangan dengan negara lain, dapat digunakan penjelasan dengan grafik atau kurva kemungkinan produksi.

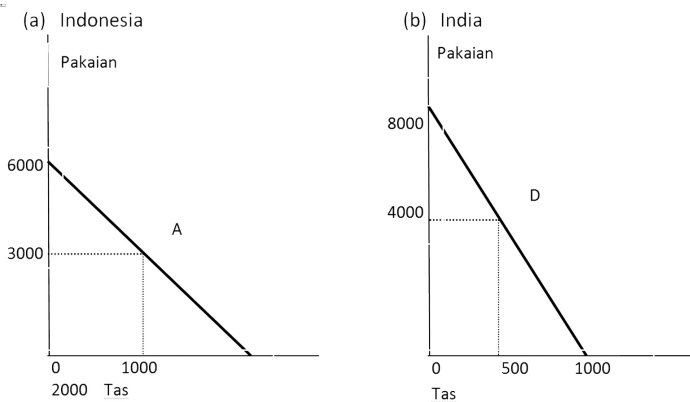
kurva kemungkinan produksi (*production–possibility frontier (PPF)*, *production possibility curve*, *production-possibility boundary* atau *product transformation curve*) adalah grafik yang menunjukkan kemungkinan produksi dua komoditas yang dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang sama dan tetap. Dalam kurva ini, konsep biaya peluang dan *diminishing return* dapat diterapkan. Misalnya, di gambar di bawah ini, untuk memproduksi 10 Celana lagi (dari A ke B), hanya 5 baju yang menjadi biaya peluang. Akan tetapi, bila ingin menghasilkan 5 celana (dari C ke D), biaya peluangnya jauh lebih besar yaitu 10 baju.



Gambar 13.1. Kurva Kemungkinan Produksi

Kedaaan Sebelum Perdagangan

Sebelum ada perdangan antara Indonesia dan India kurva kemungkinan produksi dapat ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



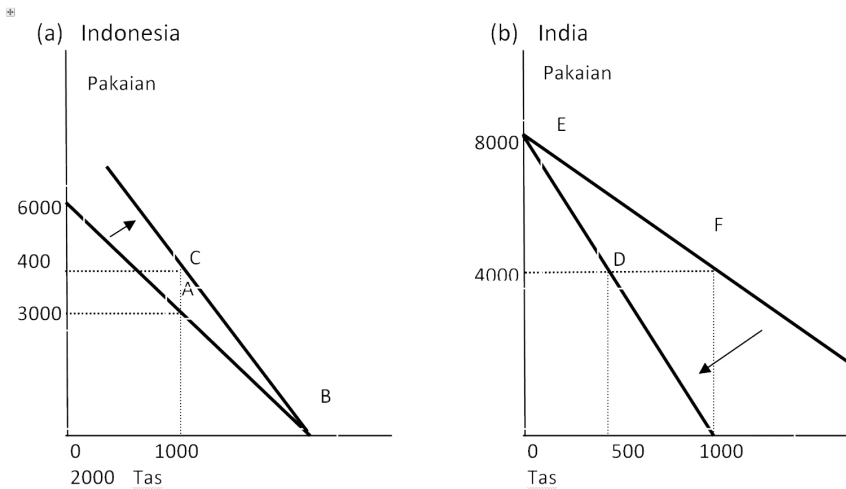
Gambar 21.2. Sebelum Perdagangan

Gambar (a) diatas menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Indonesia, kurva ini menggambarkan bahwa apabila seuruh factor produkai di Indonesia digunakan untuk memproduksi pakaian, maka akan dihasilkan 6000 unit. Sedangkan bila yang diproduksi hanya tas saja maka produk yang dihasilkan sebesar 2000 unit. Ini berarti harga relative antara tas dan pakaian 1 tas = 3 pakaian. Tanpa perdagangan Indonesia harus menghasilkan 3000 unit pakaian dan 1000 unit tas. Diasumsikan bahwa penduduk Indonesia menginginkan 3000 unit pakaian dan 2000 unit tas seperti yang ditunjukkan dalam titik A.

Gambar (b) diatas menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk India, kurva ini menggambarkan bahwa apabila seuruh factor produkai di India digunakan untuk memproduksi pakaian, maka akan dihasilkan 8000 unit. Sedangkan bila yang diproduksi hanya tas saja maka produk yang dihasilkan sebesar 1000 unit. Ini berarti harga relative antara tas dan pakaian 1 tas = 8 pakaian. Tanpa perdagangan India harus menghasilkan 4000 unit pakaian dan 500 unit tas. Diasumsikan bahwa penduduk India menginginkan 4000 unit pakaian dan 500 unit tas seperti yang ditunjukkan dalam titik D.

Setelah Spesialisasi

Jika kita bandingkan harga relative diantara kedua Negara, harga relative di Indonesia antara tas dan pakaian 1 tas = 3 pakaian dan harga relative di India antara tas dan pakaian 1 tas = 8 pakaian. Dari hasil perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa harga tas secara relatif lebih murah di Indonesia, sedangkan harga pakaian secara relatif lebih murah di India.



Gambar 21.3 Setelah Spesialisasi

Dari gambar (a) setelah spesialisasi Indonesia hanya memproduksi 2000 tas, ditunjukkan dari pergeseran titik A ke B. dan gambar (b) setelah spesialisasi India hanya memproduksi 8000 pakaian, ditunjukkan dari pergeseran titik D ke E.

Setelah Perdagangan

Setelah kedua negara sepakat untuk melakukan perdagangan antar dua negara dan kurs perdagangan akan menguntungkan apabila 1 unit tas ditukar antara 3 sampai dengan 8. Dalam kasus ini disepakati 1 unit tas ditukar 4 unit pakaian. Maka kurva kemungkinan produksi yang baru akan bergeser ke kanan yang menunjukkan bahwa kedua negara mengalami peningkatan kesejahteraan. Untuk Indonesia sebelum perdagangan penduduknya hanya dapat menikmati produksi pakaian sebesar 3000 unit dan tas 1000 unit, sekarang dengan adanya

perdagangan penduduk Indonesia dapat mengkonsumsi 4000 unit pakaian dan 1000 unit tas.

Dalam kasus salah satu negara memiliki keunggulan seluruh barang yang dihasilkan, maka Adam Smith mengatakan perdagangan tidak akan menguntungkan bagi negara yang memiliki keunggulan seluruh barang yang diproduksi. Sebagai contoh ; Indonesia dan India memproduksi dua jenis komoditi yaitu pakaian dan tas dengan asumsi (anggapan) masing-masing negara menggunakan 100 tenaga kerja untuk memproduksi kedua komoditi tersebut. 50 tenaga kerja untuk memproduksi pakaian dan 50 tenaga kerja untuk memproduksi tas. Hasil total produksi kedua negara tersebut (dalam sebulan) yaitu:

Negara	Produksi Barang	
	Pakaian	Tas
Indonesia	3.000	500
India	4.000	800

Dalam kasus diatas India memiliki keunggulan seluruh produk baik pakaian dan tas, sehingga tidak perlu ada perdagangan.

3. Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage)

Teori ini dikembangkan oleh David Ricardo, yang menekankan bahwa setiap negara harus mempunyai spesialisasi terhadap barang produksinya, karena barang tersebut akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dan mampu meningkatkan ekspor.

Negara	Produksi Barang	
	Sepeda Motor	Mobil
Jepang	8.000	800
India	3.000	500

Agar terlihat sederhana, diasumsikan ada dua negara (Jepang dan India) dan dua output (Sepeda Motor dan Mobil). Keduanya memiliki sumber daya masing-masing 100 tenaga kerja (TK) untuk memproduksi sepeda motor dan mobil. Jepang mampu memproduksi 8000 unit sepeda motor dan 800 unit mobil. Sedangkan India mampu menghasilkan sepeda motor 3000 unit dan mobil sebanyak 500 unit.



David Ricardo lahir pada tanggal 19 April 1772 di London dan merupakan anak ketiga dari 17 bersaudara. Ayahnya, Abraham adalah seorang makelar saham yang sukses pada jamannya. David Ricardo adalah seorang tokoh ekonomi klasik yang terkenal di dunia. dia mulai menunjukkan bakatnya di dunia ekonomi ketika dia berumur 14 tahun, dia ikut bekerja dengan ayahnya dan menunjukkan kemampuan yang bagus dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1793 dia menikahi seorang perempuan

bernama Priscilla Anne Wilkinson yang kemudian membuat Ricardo memeluk agama kristen dan mempunyai 8 orang anak. Masuknya Ricardo ke agama kristen menyebabkan perpecahan dengan ayahnya sehingga Ricardo harus membangun bisnisnya sendiri, dan beruntungnya, kesuksesannya di bidang perbisnisan berhasil mengalahkan kesuksesan ayahnya.

David Ricardo semakin tertarik dengan ekonomi setelah dia membaca karya-karya Adam Smith; *Wealth of Nations* lalu 10 tahun kemudian dia memutuskan untuk belajar ekonomi. Dia mulai sering menulis artikel tentang analisa jenis-jenis masalah ekonomi di masa sekarang. Karyanya yang pertama berjudul *The High Price of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank Notes* terbit pada tahun 1810. Setelah melalui perjuangan yang keras, akhirnya pada tahun 1817 karya klasiknya yang berjudul *The principles of Political Economy* berhasil diterbitkan. Dua dari kontribusi Ricardo yang paling penting adalah teori persewaan dan konsep perbandingan keuntungan. Pencetusnya, sahabat dekat Ricardo yang bernama Robert Malthus mendefinisikan sewa sebagai bagian dari produksi bumi yang dibayarkan kepada pemilik untuk kegunaan asli dan keawetan dari tanah.

David Ricardo meninggal tiba-tiba pada umur 51 pada tanggal 11 september 1823 di Gatcombe park setelah terkena infeksi telinga yang sekarang menjadi kediaman Princess Royal dan keluarganya.

Untuk lebih jelasnya marilah kita perhatikan tabel di bawah ini,

Keadaan Produksi sebelum adanya spesialisasi			
Negara	Produksi Sepeda Motor	Produksi Mobil	Harga Relatif
Jepang	8.000	800	1 mobil : 10 spd motor
India	3.000	500	1 mobil : 6 sepeda motor
Jumlah	11.000	1.300	
Keadaan Produksi sesudah adanya spesialisasi			
Negara	Produksi Sepeda Motor	Produksi Mobil	
Jepang	16.000	-	Memiliki Keunggulan dlm memproduksi spd motor
India	-	1.000	Memiliki Keunggulan dlm memproduksi mobil
Jumlah	16.000	1.000	
Keadaan Penggunaan sesudah perdagangan			
Negara	Produksi Sepeda Motor	Produksi Mobil	Kurs yang disepakati 1 unit mobil berbanding 6 sampai dengan 10 sepeda motor (dalam kasus ini ditentukan 1 mobil = 8 motor)
Jepang	12.000	500	
India	4.000	500	
Jumlah	16.000	1.000	

Keadaan sebelum adanya spesialisasi menunjukkan keadaan sebelum terjadinya perdagangan diantara kedua negara tersebut. Masing-masing negara memproduksi sendiri sepeda motor dan mobil yang mereka butuhkan.

Untuk membuktikan bahwa sepeda motor lebih murah di Jepang, perlu kita bandingkan harga relatif antara Jepang dan India. faktor produksi (50 tenaga kerja) di Jepang dapat menghasilkan 8.000 sepeda motor dan 800 mobil, ini berarti 1 unit mobil di Jepang setara dengan 8 unit sepeda motor (1 mobil = 10 sepeda motor). Di india faktor produksi (50 tenaga kerja) dapat menghasilkan 3.000 sepedamotor dan 500 mobil, ini berarti 1 mobil setara dengan 6 sepeda motor (1 mobil = 6 sepeda motor). Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa harga sepeda motor secara relatif lebih murah di Jepang, sedangkan harga mobil secara relatif lebih murah di India.

Karena masing-masing negara memiliki keunggulan relative maka kedua negara tersebut dapat melakukan perdagangan, dengan catatan

Jepang harus melakukan spesialisasi dalam produk sepeda motor dan India melakukan spesialisasi dalam produk mobil.

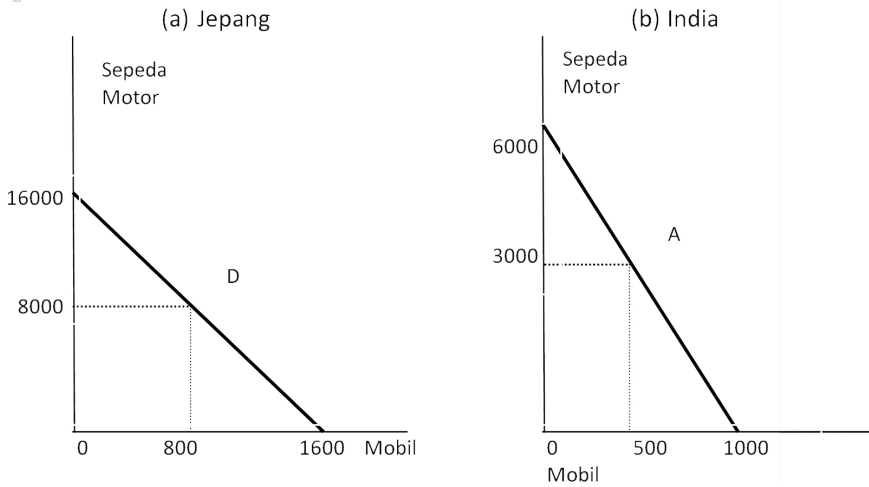
Sesudah mereka melakukan spesialisasi, Jepang dalam produk sepeda dan India dalam produk mobil seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas. Jepang hanya memproduksi sepeda motor sebanyak 16.000 unit (tanpa spesialisasi Jepang menghasilkan 8.000 unit). Dan India hanya menghasilkan 1.000 unit mobil (tanpa spesialisasi 3.000 unit sepeda motor). Sebelum spesialisasi kedua negara hanya dapat menghasilkan 11.000 unit sepeda motor dan 1.300 unit mobil, dengan spesialisasi kedua negara dapat menghasilkan 16.000 unit sepeda motor dan 1.000 unit mobil. Ini menunjukkan dengan adanya spesialisasi faktor produksi dapat digunakan dengan lebih efisien, ini dapat dilihat dari jumlah produksi sepeda motor meningkat sebesar 5.000 unit dan mobil menurun 300 unit.

Sesudah spesialisasi perdagangan kedua negara dapat diwujudkan. Dalam kasus ini disepakati 1 unit mobil ditukar 8 unit sepeda motor.

Selanjutnya dimisalkan Jepang mengeksport sepedamotor ke India sebesar 4.000 unit sepeda motor. Sesuai dengan kurs pertukaran India harus mengganti 500 unit mobil. Sehingga India memperoleh keuntungan 1000 unit sepeda motor, Jepang memperoleh keuntungan peningkatan 4.000 sepeda motor tetapi mengalami penurunan konsumsi 300 unit mobil. Unruk membuktikan apakah Jepang mengalami peningkatan keuntungan kita buktikan dengan pendekatan grafik.

Kadaan Sebelum Perdagangan

Sebelum ada perdangan antara Indonesia dan India kurva kemungkinan produksi dapat ditunjukkan dalam gambar di bawah ini :



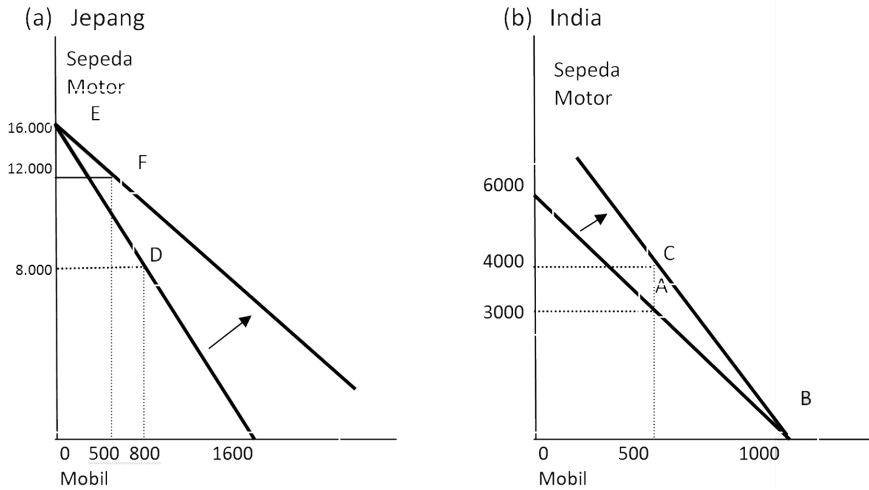
Gambar 13.4 Kaeadaan Sebelum Ada Perdagangan

Gambar (a) diatas menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Jepang, kurva ini menggambarkan bahwa apabila seuruh factor produksi di Indonesia digunakan untuk memproduksi mobil, maka akan dihasilkan 1.600 unit. Sedangkan bila yang diproduksi hanya sepeda motor saja maka produk yang dihasilkan sebesar 16.000 unit. Ini berarti harga relative antara mobil dan sepeda motor maka 1 mobil = 10 sepeda motor. Tanpa perdagangan Jepang harus menghasilkan 8000 sepeda motor dan 800 mobil. Diasumsikan bahwa penduduk Jepang menginginkan 8000 unit sepeda motor dan 800 unit mobil seperti yang ditunjukkan dalam titik D.

Gambar (b) diatas menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk India, kurva ini menggambarkan bahwa apabila seuruh factor produkai di India digunakan untuk memproduksi sepeda motor, maka akan dihasilkan 3000 unit. Sedangkan bila yang diproduksi hanya mobil saja maka produk yang dihasilkan sebesar 1000 unit. Ini berarti harga relative antara mobil dan sepeda motor adalah 1 mobil = 6 sepeda motor. Tanpa perdagangan India harus menghasilkan 3000 unit sepeda motor dan 500 unit mobil. Diasumsikan bahwa penduduk India menginginkan 3000 unit sepeda motor dan 500 unit mobil seperti yang ditunjukkan dalam titik A.

Setelah Spesialisasi

Dari hasil perbandingan harga relative di kedua Negara tersebut dapat disimpulkan bahwa harga sepeda motor secara relatif lebih murah di Jepang, sedangkan harga mobil secara relatif lebih murah di India.



Gambar 21.5 Setelah Spesialisasi

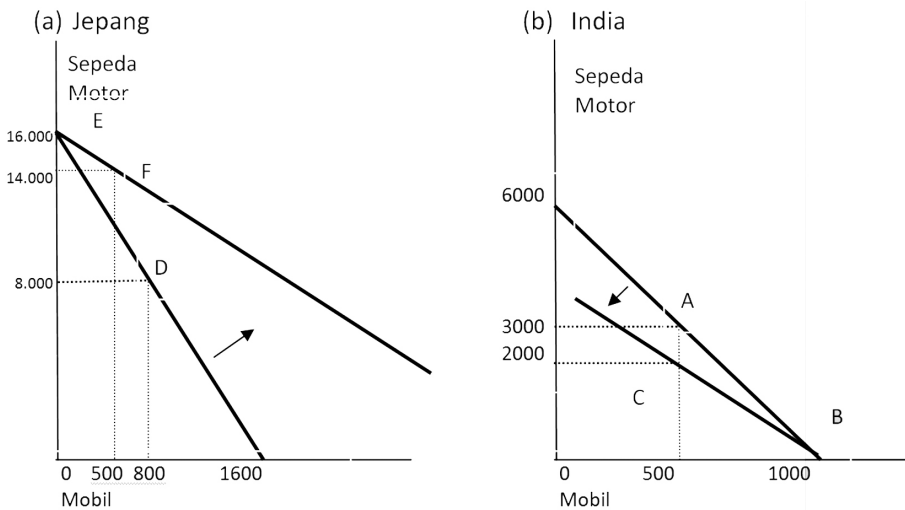
Dari gambar (a) setelah spesialisasi Jepang hanya memproduksi 16 000 sepeda motor, ditunjukkan dari pergeseran titik D ke E. dan gambar (b) setelah spesialisasi India hanya memproduksi 1.000 mobil, ditunjukkan dari pergeseran titik A ke B.

Setelah Perdagangan

Setelah kedua negara sepakat untuk melakukan perdagangan antar dua negara dan kurs perdagangan akan menguntungkan apabila 1 unit mobil ditukar antara 6 sampai dengan 10 sepeda motor. Dalam kasus ini disepakati 1 mobil ditukar 8 sepeda motor. Maka kurva kemungkinan produksi yang baru akan bergeser kekanan yang menunjukkan bahwa kedua negara mengalami peningkatan kesejahteraan. Untuk Jepang sebelum perdagangan penduduknya hanya dapat menikmati produksi sepeda motor sebesar 8.000 unit sepeda motor dan 800 unit mobil, sekarang dengan adanya perdagangan penduduk Jepang dapat mengkonsumsi 12.000 unit sepeda motor dan 500 unit mobil.

Perdagangan Tidak Selalu Menguntungkan

Dalam hal perdagangan tidak selalu menguntungkan apabila kurs salah satu negara berada di luar perbandingan harga relative. Dalam kasus diatas keuangtungan perdagangan akan terjadi apabila Kurs perdagangan yang disepakati 1 unit mobil berbanding 6 sampai dengan 10 sepeda motor. Misalkan Jepang memaksa India agar mau menggunakan kurs perdagangan 1 mobil



Gambar 21.6 Perdagangan Tidak Selalu Menguntungkan

Dalam kasus ini disepakati 1 mobil ditukar 5 sepeda motor. Maka kurva kemungkinan produksi yang baru untuk negara India akan bergeser kekiri yang menunjukkan bahwa kesejahteraan India mengalami penurunan kesejahteraan, sebelum adanya perdagangan India dapat memproduksi 500 mobil dan 3.000 sepeda motor. Setelah perdagangan India hanya mengkonsumsi 500 unit mobil dan 2.000 sepeda motor, hal ini ditunjukkan pada pergeseran titik A ke titik C yang berada di bawah garis sebelum adanya perdagangan. Sedangkan untuk Untuk Jepang sebelum perdagangan penduduknya hanya dapat menikmati produksi sepeda motor sebesar 8.000 unit sepeda motor dan 800 unit mobil, sekarang dengan adanya perdagangan penduduk Jepang dapat mengkonsumsi 14.000 unit sepeda motor dan 500 unit mobil, bergeser dari titik D ke F, dalam hal ini Jepang mengalami peningkatan kesejahteraan.

H. Kebijakan Perdagangan Internasional

Tidak selamanya kebijakan perdagangan internasional membawa keuntungan yang signifikan terhadap pendapatan negara, bahkan jika kebijakan perdagangan tersebut tidak dimonitor secara baik oleh pemerintah bisa menimbulkan masalah sosial, seperti banyaknya industri dalam negeri yang gulung tikar diakibatkan kalah saing dari produk impor, banyaknya PHK dari industri dalam negeri untuk menutup biaya operasional disebabkan produk impor menawarkan harga yang lebih murah. Pemerintah sebagai *agent of stability* harus dapat menerapkan kebijakan yang tepat dan seimbang agar industri dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor dari perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut.

1. Tarif

Penerapan tarif pada barang-barang impor. Tarif dapat diartikan sebagai hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-barang impor. Konsekuensi dari penerapan tarif atas barang impor adalah harga-harga barang impor menjadi mahal. Ketika harga barang impor mahal maka masyarakat enggan untuk membeli barang tersebut dan apabila ada barang yang bersifat substitusi dari barang impor tersebut dan merupakan produk dalam negeri maka masyarakat akan cenderung membeli produk tersebut dan industri dalam negeri dalam posisi yang kuat.

2. Kuota

Penerapan kuota untuk barang-barang yang akan diimpor. Kuota juga merupakan suatu hambatan perdagangan untuk menentukan jumlah maksimum atas barang yang akan diimpor. Penerapan kuota juga dapat melindungi industri dalam negeri, contoh industri dalam negeri hanya mampu men-supply 6 sepatu, sedangkan kebutuhan dalam negeri adalah 10, maka pemerintah hanya mengimpor 4 sepatu. Dengan demikian, diberlakukannya kuota dapat melindungi barang-barang dalam negeri dari persaingan barang luar negeri.

3. Larangan Impor

Larangan impor merupakan kebijakan mutlak dari pemerintah dengan melarang masuknya barang-barang impor tertentu ke dalam negeri. Kebijakan tersebut dapat diterapkan untuk menghindari

kerugian yang lebih besar terjadi di masyarakat. Biasanya barang-barang yang dikenakan larangan impor adalah barang-barang yang dapat mengganggu kesehatan dan keberadaan barang tersebut meresahkan masyarakat. Misalnya melarang impor daging sapi yang mengandung penyakit Anthrax.

4. Subsidi

Subsidi adalah kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri. Subsidi yang dilakukan pemerintah dapat berupa keringanan pajak, pemberian fasilitas, pemberian kredit bank yang murah ataupun pemberian hadiah atau insentif dari pemerintah. Adanya subsidi, harga barang dalam negeri menjadi murah, sehingga barang-barang hasil produksi dalam negeri mampu bersaing dengan barang-barang impor.

5. Dumping

Dumping adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri. Kebijakan dumping tidak dapat dilakukan asal-asalan. Jika dilakukan dengan kurang cermat akan merugikan negara itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Ari Sudarman, (1989), *Teori Mikroekonomi*, Edisi Ketiga, Jilid 1, BPFE, Yogyakarta.
- Barron, M. John, Ewing, T. Bradley, Lynch, J. Gerald, (2008), *Understanding Macroeconomic Theory*, Routledge Taylor and Francis Group, United States.
- Bilas, Richard A, (1994), *Micro Economics Theory*, Mc.Graw-Hill, International Book Company.
- Boediono, (1989), *Mikroekonomi*, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Borio, C. (2009). Implementing The Macroprudential Approach to Financial Regulation and Supervision. Banque de France Financial Stability Review, 13.
- Budiono, (1982). *Makroekonomi*: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2, Edisi Keempat, Jogjakarta: BPFE UGM.
- Dornbusch, Rudiger., dan S. Fischer. (1997). *Makroekonomi*. Edisi Keempat. Jakarta. Erlangga.
- Froyen, R.T., (1998). *Macroeconomics: Theories and Policies*, Sixth Edition, Prentice Hall.

- Ferguson, C.E., and J.P. Gould. (1975). **Microeconomic Theory**. Fourth Edition, Yale University.
- Henderson, J.M. and R.E. Quandt. **Microeconomic Theory: A Mathematical Approach**. Third Edition, McGraw-Hill International Book Company.
- Koutsoyiannis, A. (1985). **Modern Microeconomics**. ELBS Edition, Macmillan Publishers Ltd, London.
- M. Farid Wijaya, (1990), *Mikroekonomi*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Mankiw, N. Gregory. (2006). *Pengantar Makroekonomi*. Edisi Tiga, Jakarta: Salemba Empat.
- McEachern, A. William. (2000). *Macroeconomics: Contemporary Approach*. Thomson Learning. United States.
- Nasution, Mulia. (1997), *Teori Ekonomi Makro: Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Nicholson, Walter. (1999). *Teori Mikroekonomi*. Alih bahasa: Daniel Wirajaya, Edisi ke-5, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. (2000), *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi Kedua, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2003), *Pengantar Teori Mikroekonomi*, Edisi Ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Salvatore, Dominick, (1992), *Theory and Problems Of Microeconomics Theory*, Third Edition,
- Samuelson, Paul A. & William D. Nordhaus, (1992), *Economics*, 12th Ed, Mc.Graw Hill, International Book Company., Inc.
- Sexton, L. Robert, (2010), *Exploring Macroeconomics*, 5th Ed, Pepperdine University.
- Sritua Arief, (1996), *Teori Mikro Ekonomi Dan Makro Lanjutan* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Warjiyo, Perry., dan Juhro, M. Solikin. (2016), *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



GLOSARIUM

Absolute Advantage (Keunggulan Mutlak), yaitu keunggulan yang dimiliki dari suatu negara pada produksinya baik dari segi sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun faktor-faktor lainnya dalam kegiatan perdagangan internasional.

Aggregate (agregat), yaitu total persamaan dalam makroekonomi secara menyeluruh.

Average Propensity to Consume (APC), yaitu rasio antara konsumsi dengan pendapatan ($APC = C/Y$).

Average Propensity to Save (APS), yaitu rasio antara tabungan dengan pendapatan ($APC = S/Y$).

Bank Indonesia, yaitu bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan / atau pihak lain.

Cadangan Devisa, yaitu simpanan mata uang asing oleh bank sentral atau otoritas moneter, simpanan tersebut bersifat asset bank sentral yang tersimpan dalam beberapa bentuk mata uang negara lain.

Comparative Advantage (Keunggulan Komparatif), yaitu keunggulan setiap negara yang melakukan spesialisasi terhadap barang produksinya, karena barang tersebut akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak dan mampu meningkatkan ekspor.

Countercyclical, yaitu kebijakan makroprudensial dengan menghimbau bank-bank untuk menambah modal sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Disposable Income, yaitu pendapatan yang digunakan untuk konsumsi setelah dikurangi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Dumping, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara dengan cara menjual barang ke luar negeri lebih murah daripada dijual di dalam negeri.

Gross National Product (GNP), yaitu pendapatan total pendapatan dari produksi barang dan jasa dalam suatu negara selama satu tahun.

Hyperinflation, yaitu inflasi yang mencapai 5 – 10 kali lebih besar dari jumlah biasanya.

Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang mengukur harga rata-rata dari suatu barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK juga digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.

Indeks Kualitas Hidup, yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia, yaitu indeks yang digunakan untuk mengukur pengembangan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kualitas hidup yang diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan.

Inflasi, yaitu suatu proses meningkatnya harga-harga pada barang atau jasa secara terus menerus yang disebabkan berbagai faktor.

Kebijakan Fiskal, yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya kehidupan ekonomi masyarakat melalui anggaran belanja negara atau APBN.

Kebijakan Makroprudensial, yaitu instrumen regulasi prudensial yang ditujukan untuk mendorong stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, bukan kesehatan lembaga keuangan secara individu.

Kebijakan Moneter, yaitu kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk memengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga, dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat.

Kuota, yaitu hambatan perdagangan untuk menentukan jumlah maksimum atas barang yang akan diimpor.

Kurva IS, yaitu kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (i) pada pasar barang dan jasa.

Kurva LM, yaitu kurva yang menggambarkan keseimbangan antara pendapatan nasional (Y) dan tingkat bunga (i) pada pasar uang.

Laissez-Faire, yaitu kegiatan perekonomian yang menganut pada pasar bebas.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yaitu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya dibentuk.

Makroekonomi atau Teori Ekonomi Makro, yaitu teori yang mempelajari kegiatan perekonomian secara menyeluruh dengan sudut pandang yang lebih luas.

Marginal Propensity to Consume (MPC), yaitu perubahan dari tambahan dari setiap unit dari *disposable income* untuk konsumsi.

Marginal Propensity to Save (MPS), yaitu perubahan dari tambahan dari setiap unit dari *disposable income* untuk ditabung.

Mikroekonomi atau Teori Ekonomi Mikro, yaitu ilmu yang mempelajari tentang peran individu-individu pelaku ekonomi baik rumah tangga atau perusahaan bahkan individu dalam mengambil keputusan dan interaksinya pada pasar.

National Income, yaitu jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi yang digunakan dalam suatu negara dalam kurun waktu satu tahun.

Neraca Pembayaran Internasional, yaitu suatu catatan resmi yang sistematis yang berisi hubungan ekonomi atau transaksi antar penduduk dari suatu Negara dengan Negara lainnya yang dinilai dalam mata uang pada kurun waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Pajak, yaitu pungutan wajib yang diambil dari rakyat untuk negara dan digunakan untuk kepentingan roda pemerintahan dan masyarakat umum.

Pembangunan Ekonomi, yaitu memiliki cakupan yang lebih luas dari pertumbuhan dan pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan meliputi berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, taraf pembangunan ekonomi yang dicapai suatu negara telah meningkat, tidak mudah untuk diukur secara kuantitatif.

Pendapatan Regional Perkapita, yaitu pendapatan regional yang dibagi dengan jumlah penduduk pada daerah tersebut.

Pengangguran, yaitu seseorang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan atau seseorang yang berhenti dari suatu pekerjaan dan berusaha mencari pekerjaan yang lebih layak.

Perdagangan Internasional, yaitu suatu proses jual beli yang dilakukan oleh penduduk, badan usaha atau negara dengan penduduk, badan usaha atau negara lain atas dasar kesepakatan bersama.

Perekonomian dua sektor, yaitu perekonomian sederhana yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan.

Perekonomian empat sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan perekonomian.

Perekonomian tiga sektor, yaitu perekonomian yang terdiri dari rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dalam kegiatan perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi, yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Peningkatan pada output perkapita terjadi karena terdapat kenaikan faktor produksi yang digunakan selama proses produksi.

Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan perekonomian yang beroperasi pada suatu negara, tanpa memperhatikan faktor produksi berasal dari negara lain.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan perekonomian yang

beroperasi pada daerah tertentu, tanpa memperhatikan faktor produksi berasal dari daerah lain.

Sektor sederhana, yaitu perekonomian dua sektor yang kegiatan perekonomiannya tidak melibatkan campur tangan pemerintah.

Sektor tertutup, yaitu perekonomian dua sektor yang tidak melakukan kegiatan dan menjalin kesepakatan dengan pihak luar.

Subsidi, yaitu kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada produk dalam negeri.

Tarif, yaitu hambatan perdagangan berupa penetapan pajak atas barang-barang impor.

Transaksi Berjalan, yaitu transaksi ekspor dan impor barang/jasa, pendapatan dari investasi, pendapatan atau kompensasi tenaga kerja dan tranfer pemerintah.

Transaksi Modal, yaitu transaksi pada tranfer modal dan tranfer finansial berupa investasi langsung dan investasi portofolio.

Usaha Kecil Mikro (UKM), yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan besar.

Velocity of Money (perputaran uang), yaitu kecepatan uang berpindah tangan, atau banyaknya frekuensi uang yang sama berpindah tangan dalam waktu tertentu.



INDEKS

Absolute Advantage	Indeks Harga Konsumen (IHK)
Agregat	Indeks Kualitas Hidup
Average Propensity to Consume (APC)	Indeks Pembangunan Manusia; 219.
Average Propensity to Save (APS).	Inflasi
Bank Indonesia	Investasi
Bank Sentral	Kebijakan Fiskal
Cadangan Devisa	Kebijakan Makroprudensial
Comparative Advantage	Kebijakan Moneter
Countercyclical	Kuota
Deflator	Kurva IS
Disposable Income	Kurva LM
Dumping	Laissez-Faire
Gross National Product (GNP)	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Hyperinflation	Jumlah Uang Beredar (JUB)

Keynes
Makroekonomi
Marginal Propensity to Consume
(MPC)
Marginal Propensity to Save
(MPS)
Mikroekonomi
National Income.
Neraca Pembayaran
Pajak
Perdagangan Internasional
Personal Income
Perekonomian dua sektor
Perekonomian tiga sektor

Perekonomian empat sektor
Pengangguran
Produk Domestik Bruto (PDB)
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Sektor Sederhana
Sektor Tertutup
Transaksi Berjalan
Transaksi Modal
Unit of Account
Usaha Kecil Mikro (UKM)
Velocity of Money
Velocity



BIDOATA PENULIS



NANO PRAWOTO adalah Dosen Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak tahun 1992. Mengajar Mata Kuliah Statistik, Teori Ekonomi, Ekonomi Internasional dan Pengantar Teori Ekonomi. S1 diselesaikan di Program Studi Manajemen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, kemudian pada tahun 1995 melanjutkan Magister Sains di Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung jurusan Ekonomi Pembangunan. Dan gelar Doktor Ilmu

Ekonomi diperoleh dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2011.

Penulis selain mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga mengajar diberbagai Universitas di Yogyakarta. Selain sebagai dosen penulis juga menjadi konsultan di berbagai daerah di Indonesia. Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor SDM di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga sebagai Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Indonesia.

Selain Buku Pengantar Teori Ekonomi, penulis juga menyusun Buku Statistik Untuk Ekonomi dan Bisnis dan Regresi untuk Penelitian Ekonomi dan Bisnis.